



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4).

10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
dan
BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sistematika penulisan dokumen PERUBAHAN RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;

BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;

BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;

BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;

BAB VIII: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

BAB IX : Penutup.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penyusunan Renstra OPD, RKPD, Renja OPD, KUA-PPAS dan RAPBD didasarkan pada urusan pemerintah dan perangkat daerah yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 19 Juni 2024
BUPATI KONAWE SELATAN,

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 19 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ST. CHADIDJAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA: (1/24/2024)

PEMERINTAH KABUPATEN KONawe SELATAN



**PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KONawe SELATAN
TAHUN 2021 - 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kekuatan-Nya jualah, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (P-RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan tahun 2021 – 2026 dapat disusun dan diselesaikan pada waktunya.

Tujuan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (P-RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan tahun 2021 – 2026 adalah untuk menyelaraskan kondisi daerah, masalah pembangunan, Isu Strategis, Program Strategis, Kerangka Pendanaan, Indikator Kinerja, dan gambaran pengelolaan keuangan daerah, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (P-RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan tahun 2021 – 2026 merupakan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen tahunan. Sejumlah Program Yang mengalami penambahan yang termuat dalam dokumen tersebut diharapkan mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat Konawe Selatan, Dengan sinergi yang optimal dari Organisasi Perangkat Daerah dan dukungan dari semua pihak, Insya Allah harapan tersebut dapat tercapai.

Semoga ALLAH SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, menyatukan hati kita, dan memberikan kekuatan untuk melaksanakan RPJMD ini dengan penuh rasa tanggung jawab, komitmen, dan dedikasi untuk pembangunan Konawe Selatan





BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4).

10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
dan
BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sistematika penulisan dokumen PERUBAHAN RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
- BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
- BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
- BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- BAB VIII: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- BAB IX : Penutup.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penyusunan Renstra OPD, RKPD, Renja OPD, KUA-PPAS dan RAPBD didasarkan pada urusan pemerintah dan perangkat daerah yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 19 Juni 2024
BUPATI KONAWE SELATAN,

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 19 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ST. CHADIDJAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA: (1/24/2024)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. LATAR BELAKANG.....	I-1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-3
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....	I-8
1.4. SINKRONISASI RPJMD DAN RTRW	I-10
1.4.1. Amanat Integrasi.....	I-10
1.4.2. Kedudukan RPJMD terhadap RTRW	I-10
1.5. INTEGRASI RPJMD KLHS.....	I-11
1.6. MAKSUD DAN TUJUAN	I-12
1.6.1. Maksud	I-12
1.6.2. Tujuan.....	I-13
1.7. SISTEMATIKA PENULISAN	I-14
BAB II KONDISI UMUM DAERAH	II-1
2.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS	II-1
2.1.1. Karakteristik Fisik Wilayah	II-1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II-4
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	II-9
2.1.4. Demografi	II-10
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	II-13
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-13
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-18
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM	II-21
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-23

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Pendapatan Asli Daerah.....	I-1
3.1.1. Pendapatan Asli Daerah	III-1
3.1.2. Dana Perimbangan	III-3
3.1.2. Lain-lain Pendapatan yang Sah	III-6
3.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-8
3.2.1. Arah Kebijakan Belanja Tidak Langsung	III-11
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Langsung	III-16
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....	IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	IV-7
4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	IV-9
4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan.....	IV-14
4.1.4. Urusan Penunjang Pemerintah	IV-16
4.2. Isu Strategis	IV-18
4.2.1. Kemiskinan	IV-18
4.2.2. Ketahanan Pangan	IV-19
4.2.3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	IV-21
4.2.4. Pendidikan Berkualitas	IV-22
4.2.5. Kesenjangan Gender.....	IV-23
4.2.6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	IV-24
4.2.7. Pertumbuhan Ekonomi	IV-25
4.2.8. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	IV-25
4.2.9. Berkurangnya Kesenjangan	IV-26
4.2.10. Penanganan Perubahan Iklim dan Lingkungan	IV-27
4.2.11. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	IV-27
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1. Visi	V-1
5.2. Misi.....	V-2
5.3. Tujuan dan Sasaran	V-3

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	I-1
6.1. Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026.....	VI-1
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026.....	VI-5
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah	VII-1
7.2. Program Perangkat Daerah	VII-9
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
BAB IX PENUTUP	IX-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah.....	I-8
Gambar 2.1. Peta Konawe Selatan Konawe Selatan.....	I-1
Gambar 2.2. Rencana Kawasan Strategis Konawe Selatan	II-4
Gambar 4.1. Tujuan SDGs	IV-7

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020.....	I-2
Tabel 2.2. Ketinggian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan.....	II-3
Tabel 2.3. Sebaran Kawasan Pertanian di Kabupaten Konawe Selatan	II-5
Tabel 2.4. Sebaran Kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Konawe Selatan	II-7
Tabel 2.5. Jenis dan Objek Wisata di Konawe Selata, Beserta Lokasinya	II-8
Tabel 2.6. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2010-2020.....	II-10
Tabel 2.7. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020	II-11
Tabel 2.8. Perkembangan PDRB Kabupaten Konawe Selatan 2016-2020	II-13
Tabel 2.9. PDRB Kabupaten Konawe Selatan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)	II-14
Tabel 2.10. PDRB Kabupaten Konawe Selatan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah)	II-15
Tabel. 2.11. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Konawe Selatan, 2015 – 2020.....	II-17
Tabel 2.12. Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan	II-22
Tabel 2.13 AKI, AKB dan AKABA Kabupaten Konawe Selatan.....	II-22
Tabel 2.14 Studi Kasus Gizi Kabupaten Konawe Selatan.....	II-23
Tabel 2.15. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Konawe Selatan (km)	II-23
Tabel 2.16. Jumlah dan Panjang Jembatan Berdasarkan Jenis Konstruksinya 2020	II-24
Tabel 2.17. Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Kantor Depnaker Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020	II-25
Tabel 2.18. Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020.....	II-25
Tabel 2.19. Rasio Ketergantungan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 - 2018	II-26
Tabel 2.20 Sambungan Rumah (SR) Air Bersih.....	II-26
Tabel 2.21 Tangki Sepitek / Sanitasi.....	II-27
Tabel 3.1. Capaian PAD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2019, Anggaran 2020	III-2
Tabel 3.2. Capaian Dana Perimbangan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2019 dan Anggaran 2020	III-4
Tabel 3.3. Capaian Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2019 dan Anggaran 2020	III-5
Tabel 3.4. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2019, Anggaran 2020	III-7

Tabel 3.5. Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019-2023, Anggaran 2020.....	I-9
Tabel 5.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Konawe Selatan Tahun 2021-2026.....	V-4
Tabel 6.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD Konawe Selatan 2021-2026	VI-6
Tabel 7.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 - 2026.....	VII-2
Tabel 7.2. Proyeksi Kerangka Pendanaan Per-OPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 - 2026	VII-5
Tabel 7.3. Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kab. Konawe Selatan 2021-2026	VII-9
Tabel 7.4. Prioritas Program Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif Tahun 2021-2025	VII-32
Tabel 8.1. Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Kabupaten Konawe Selatan 2021-2026	VIII-2

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Persentase Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di Kabupaten Konawe Selatan.....	II-3
Grafik 2.2. Piramida Penduduk Kabupaten Konawe Selatan 2020.....	II-12
Grafik 2.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018-2020 (dalam persen)	II-16
Grafik 2.4. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Konawe Selatan	II-18
Grafik 2.5. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020.....	II-19
Grafik 2.6. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020.....	II-20
Grafik 2.7. Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan	II-21
Grafik 2.8. Proporsi Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020	II-23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan yang baik akan menjadi arah dalam pencapaian cita-cita pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan perlu mengacu atau berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai landasan bagi perencanaan dari pusat hingga daerah, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang tersebut menjelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Pelaksanaan pembangunan dalam Periode Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2021 secara umum telah menunjukkan capaian hasil yang cukup baik di berbagai bidang. Capaian yang baik ini akan menjadi modal yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja pembangunan dalam RPJMD periode selanjutnya (tahun 2021-2026). RPJMD ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan dan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, serta memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan program

kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 harus mengacu pada syarat dan kaidah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya secara efektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Oktober 2016 telah terbit beberapa peraturan perundangan di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur antara lain Pembentukan, Jenis, dan Kriteria Tipologi Perangkat Daerah, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah, Kriteria serta Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dan lain-lain berkenaan dengan perangkat daerah. Oleh karena itu sebagai bentuk penyesuaian terhadap Kebijakan Nasional, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Bersama DPRD Kabupaten Konawe Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan RPJMD harus mempertimbangkan berbagai faktor atau isu, baik yang bersifat isu lokal, nasional, dan global. Hal ini dikarenakan perubahan yang terjadi baik bersifat global maupun nasional dapat mempengaruhi berbagai dinamika pembangunan di tingkat lokal atau daerah. Beberapa isu yang harus diakomodir dalam penyusunan RPJMD antara lain prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs), digitalisasi, ketahanan pangan dan energi, krisis (bencana) lingkungan serta integrasi kawasan ekonomi. Tentu saja beragam isu tersebut berimplikasi terhadap peraturan dan kebijakan pembangunan di daerah sehingga perlu mengakomodir pula isu-isu tersebut kedalam dokumen Perubahan RPJMD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen RPJMD dapat dilakukan perubahan berdasarkan hasil pengendalian

dan evaluasi yang menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan memerlukan penyesuaian atau mengalami perubahan. Perubahan RPJMD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021- 2026 perlu dilakukan dengan pertimbangan antara lain menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; penyesuaian dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi terutama akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan beberapa target indikator kinerja perlu penyesuaian; serta mengakomodir program baru atau perubahan program prioritas yang fokus pada pencapaian sasaran strategis RPJMD.

Dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 merupakan revisi substansial dokumen perencanaan daerah Kabupaten Konawe Selatan yang mengakomodir perubahan program prioritas yang relevan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan dan merupakan penjabaran visi misi pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Dokumen perubahan RPJMD ini tetap menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sebagai wujud pendekatan perencanaan yang bersifat ilmiah, terbuka dan partisipatif, perubahan RPJMD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 tentunya menggunakan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, dan terukur.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Konawe Selatan tahun 2021-2026 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4739);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5588) sebagaimana beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020– 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

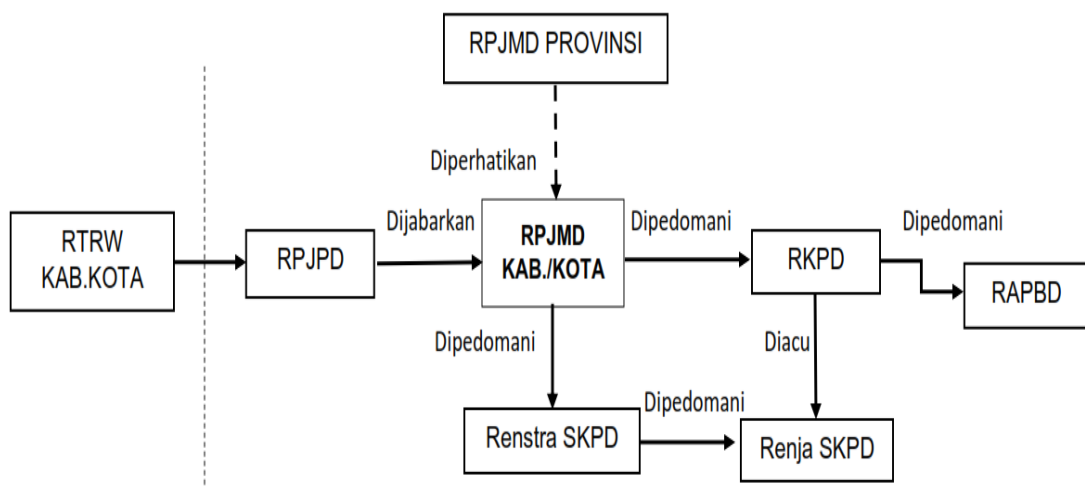
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 9 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan No. 10 Tahun 2012 Tentang RPJPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 10);
- Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Desa Mandara Mendidoha (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 22);
- Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan No. 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2020–2040.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perubahan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan merupakan revisi substansial dokumen RPJMD periode 2021-2026. Dokumen ini menjadi payung hukum dalam keseluruhan proses dan mekanisme penyusunan rencana kerja tahunan daerah untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang dituangkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Selatan.

Sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Sistem Pemerintahan Daerah yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, menempatkan Perubahan RPJMD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021- 2026 sebagai satu bagian yang utuh dan merupakan kerangka acuan dalam mewujudkan kinerja pemerintahan di Kabupaten Konawe Selatan, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah dan atau akan ditetapkan serta keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi OPD untuk penyusunan Renstra OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Keberadaan dokumen maupun perubahan RPJMD Kabupaten Konawe Selatan memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan lainnya yang selanjutnya dapat diuraikan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1.
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

Sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan RPJMD dalam kerangka perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan adalah sebagai berikut:

- a) RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
- b) RPJMD maupun Perubahan RPJMD dilaksanakan dalam Renstra OPD dan diterjemahkan menjadi RKPD;
- c) Perubahan RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra OPD;
- d) Keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian visi dan misi Renstra OPD;
- e) Seluruh program selama tahun 2021-2026 pada Renstra OPD mempedomani program prioritas dalam Perubahan RPJMD;
- f) Renja OPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
- g) RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
- h) Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja OPD.

1.4 SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

1.4.1. Amanat Integrasi

Amanat pengintegrasian antara dokumen rencana tata ruang dengan dokumen rencana pembangunan telah tertuang dalam Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 25 Tahun 2004 maupun Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007. Lebih khusus lagi, UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk dapat melihat secara jelas bagaimana amanat integrasi tersebut dijabarkan secara lebih rinci, baik dari sudut pandang pelaksanaan penataan ruang, maupun dari sudut pandang sistem perencanaan pembangunan nasional.

1.4.2. Kedudukan RPJMD terhadap RTRW

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berjangka waktu 5 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten disusun berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dengan mengacu pada:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten;
- 2) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); dan
- 4) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

RTRW dan RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang seharusnya saling berkaitan dan terintegrasi. Kedua dokumen perencanaan jangka panjang tersebut menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sendiri dilakukan secara paralel dan integratif dengan penyusunan Renstra masing-masing SKPD. Dalam hal ini, Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga menjadi acuan dalam penyusunan Renstra SKPD, khususnya bagi

urusan-urusan yang bersifat spasial. Urusan-urusan yang bersifat spasial dan memiliki keterkaitan erat dengan rencana tata ruang adalah urusan-urusan yang kegiatannya memiliki implikasi terhadap ruang, misalnya pengembangan infrastruktur (urusan Pekerjaan Umum), pengembangan kawasan industri (urusan industri), pelayaran komoditas ataupun kawasan perikanan (urusan pertanian dan perikanan), dan sebagainya.

1.5 INTEGRASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Untuk memudahkan implementasi KLHS dalam perencanaan pembangunan, utamanya integrasi kepentingan lingkungan hidup (LH) dalam rencana pembangunan dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kunci keberlanjutan (*sustainability key questions*). Pertanyaan ini untuk memastikan apakah penyusunan rencana pembangunan sudah mempertimbangkan kepentingan lingkungan. Dengan kata lain, pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan representasi dari kepentingan LH yang seharusnya dipertimbangkan dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Persepsi tentang makna “kepentingan” Lingkungan Hidup ini penting untuk didiskusikan di antara pemangku kepentingan sehingga tidak timbul kerancuan ketika menentukan apakah penyusunan suatu rencana pembangunan telah mempertimbangkan kepentingan Lingkungan Hidup.

Makna kepentingan Lingkungan Hidup dalam hal ini, diusulkan, diwakili, oleh tiga prinsip Lingkungan Hidup yang merupakan kaidah-kaidah ekologi dan sosial ekonomi, yaitu: keterkaitan/ketergantungan, keberlanjutan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya. Masing-masing kaidah ini kemudian dijabarkan dalam kriteria dan beberapa indikator, terutama indikator-indikator input dan proses (implementasi):

- Keterkaitan/ketergantungan (*interdependence*) menunjukkan tingkat partisipasi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan. Keselarasan dalam proses pengambilan keputusan antar pemangku kepentingan, kejelasan mekanisme, prosedur, dan kewenangan dalam hubungan kerja antar sektor, antar Lembaga (formal dan non formal), dan antar wilayah, kejelasan digunakannya ekosistem, Daerah Aliran Sungai (DAS), ekosistem khas dalam perencanaan pembangunan. Keterkaitan RPJMD, Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, utamanya antar Kabupaten/Kota dalam satu ekosistem.

- Keberlanjutan (*sustainability*) menunjukkan sejauh mana faktor-faktor penunjang keberlanjutan antara lain, daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup serta sector kemampuan sumberdaya alam pulih kembali (alih fungsi menjadi sumberdaya produktif lainnya) menjadi pertimbangan perencanaan pembangunan.
- Keadilan sosial dan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA) (*environmental justice*). Mencegah terjadinya pembangunan yang berakibat pada marginalisasi dan kemiskinan akibat ketidakadilan dalam akses, pemanfaatan, penguasaan dan pengendalian terhadap sumberdaya alam. Pertimbangan keadilan juga termasuk keadilan dalam akses infrastruktur dasar dan informasi atas sumberdaya.

Untuk memudahkan integrasi prinsip dan kriteria kepentingan Lingkungan Hidup dalam perencanaan pembangunan tersebut di atas prinsip dan kriteria tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan termasuk indikator-indikator yang akan digunakan sebagai tolok ukur. Isu strategis KLHS dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Konawe Selatan tahun 2021-2026 adalah isu kemiskinan, pengangguran, pelayanan dasar dan infrastruktur. Namun isu krisis (bencana) lingkungan, alih fungsi lahan, ketahanan pangan dan energi, digitalisasi integrasi kawasan ekonomi belum masuk dalam substansi yang disebutkan sebagai isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Konawe Selatan.

1.6 MAKSUD DAN TUJUAN

1.6.1. Maksud

Perubahan RPJMD Kabupaten Konawe Selatan 2021-2026 adalah revisi dokumen perencanaan daerah yang dimaksudkan sebagai penjabaran dan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan pada periode tahun 2021-2026, yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

1.6.2. Tujuan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2021-2026;
- 2) Merumuskan rancangan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan untuk periode Tahun Anggaran 2021-2026;
- 3) Menetapkan perubahan program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026.

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka perubahan RPJMD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 juga mempunyai fungsi pokok sebagaimana RPJMD induk yang disusun sebelumnya dan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis OPD, langkah penempatan visi dan misi kepala daerah ke dalam lembaran daerah yaitu dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta perumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2021-2026. Adapun penjelasan bahwa perubahan RPJMD Kab. Konawe Selatan mempunyai fungsi pokok sebagai:

- 1) Acuan penyusunan RKPD setiap tahun selama tahun 2021-2026;
- 2) Tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati;
- 3) Tolok ukur penilaian keberhasilan kepala OPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah;
- 4) Pedoman seluruh pemangku kepentingan kepala OPD dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan; dan
- 5) Instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan 2021-2026 disusun dalam sembilan bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan perubahan RPJMD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menggambarkan umum kondisi Kabupaten Konawe Selatan yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Bab ini akan menjadi dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah serta perumusan rencana pembangunan dalam lima tahun mendatang.

BAB III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan kinerja keuangan dan pengelolaan keuangan daerah lima tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun ke depan.

BAB IV Permasalahan Pembangunan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun ke depan, berdasarkan hasil analisis data pada Bab II.

BAB V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Bab ini mendeskripsikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati untuk membangun Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 diuraikan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disertai dengan indikator kinerja dan targetnya.

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Penetapan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di bab sebelumnya, dijabarkan dalam bab ini. Bagian ini terdapat revisi program prioritas yang diintegrasikan dalam tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab yang memuat program prioritas dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan disajikan beserta indikator kinerja, nilai target indikator, pagu indikatif, serta perangkat daerah penanggung jawab penyelenggaraan bidang urusan.

BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini berisi penjelasan tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB IX Penutup

Dalam bab ini diuraikan kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

BAB II

Secara administratif Konawe Selatan terbagi ke dalam 25 kecamatan dengan sebaran luas sebagai berikut:

Tabel 2.1. Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2022

No	Kecamatan	Luas (km ²)	No	Kecamatan	Luas (km ²)
1	Tinanggea	320,37	14	Moramo	254,26
2	Lalembu	147,90	15	Moramo Utara	159,76
3	Andoolo	118,66	16	Konda	127,13
4	Buke	181,38	17	Wolasi	158,92
5	Andoolo Barat	79,67	18	Ranomeeto	90,25
6	Palangga	173,75	19	Ranomeeto Barat	69,50
7	Palangga Selatan	107,64	20	Landonno	109,76
8	Baito	151,71	21	Mowila	122,89
9	Lainea	205,11	22	Sabulakoa	66,53
10	Laeya	276,72	23	Angata	294,10
11	Kolono	340,29	24	Benua	133,91
12	Kolono Timur	125,01	25	Basala	48,73
13	Laonti	373,77	Luas Konawe Selatan		4.237,74

Sumber: Konawe Selatan dalam Angka (2023)

Kecamatan dengan luas terbesar adalah Kecamatan Laonti, diikuti Kecamatan Tinanggea. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Ranomeeto Barat.

Permukaan tanah Konawe Selatan pada umumnya bergunung dan berbukit yang diapit oleh dataran rendah yang sangat potensial untuk pengembangan di sektor pertanian. Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut (DPL), wilayah Kabupaten Konawe Selatan dapat dibedakan atas lima kelompok sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

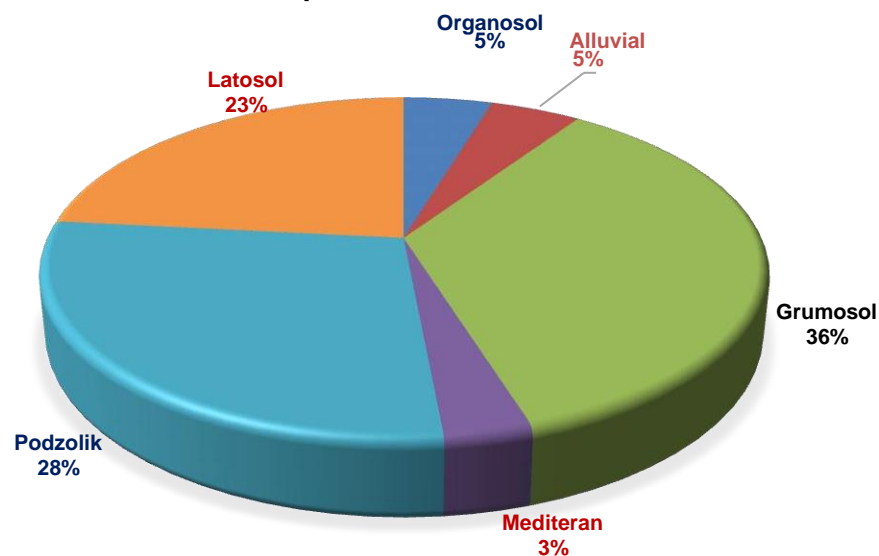
Tabel 2.2. Ketinggian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan

NO	KETINGGIAN	KECAMATAN
1	0-25 meter	Tinanggea, Lainea, Laeya, Kolono Timur, Moramo,
2	26-50 meter	Palangga Selatan, Kolono, Laonti, Moramo Utara, Konda, Sabulako, Ranomeeto Bara
3	51-75 meter	Angata, Lalembuu, Ranomeeto, Basala,
4	76-100 meter	Andoolo Barat, Benua, Mowila,
5	>100 meter	Andoolo, Buke, Palangga, Baito, Wolasi, Ladono

Sumber: Diaolah dari Konawe Selatan dalam Angka 2023

Berdasarkan jenis tanahnya, di Kabupaten Konawe Selatan sebagian besar merupakan tipe grumosol, diikuti tipe tanah podzolik, dan latosol. Sedangkan berdasarkan ketinggian, wilayah terluas mempunyai dengan tingkat kemiringan 1,8 – 13,5 derajat, yaitu seluas 147.208,06 Ha (32,61%).

Grafik 2.1. Persentase Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di Kabupaten Konawe Selatan

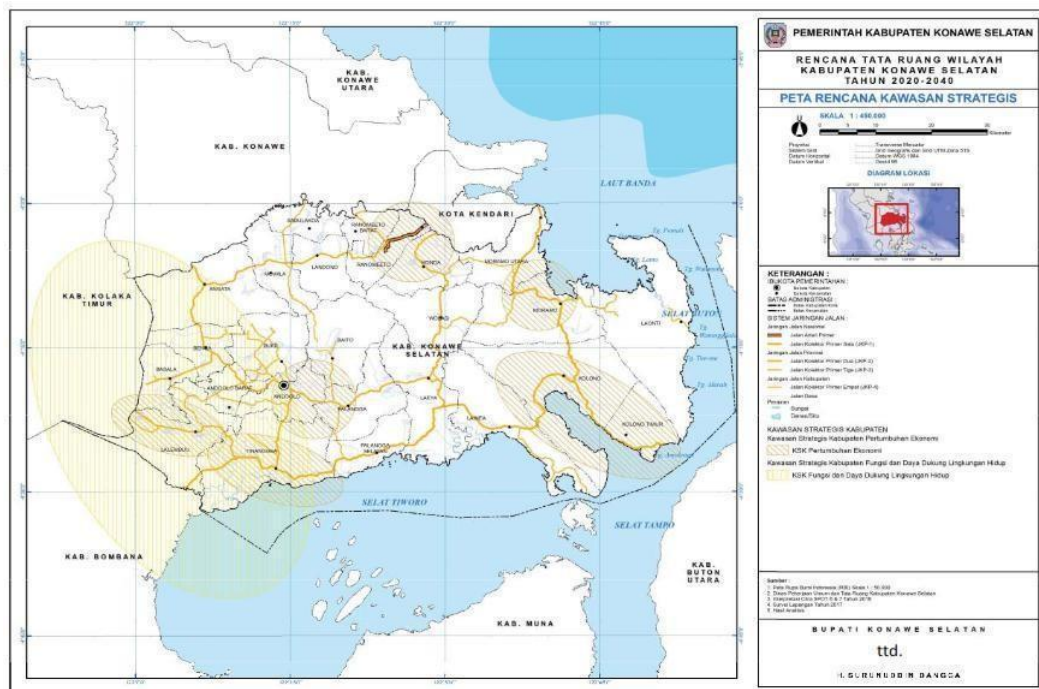


Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2023

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2040 (Perda Kabupaten Konsel No. 5 Tahun 2020), kawasan strategis yang dimiliki Kabupaten Konawe Selatan dikelompokkan menurut peruntukannya. Kawasan strategis berbasis perikanan budidaya ditetapkan berada di Kecamatan Tinanggea, Kolono, dan Kolono Timur. Sementara kawasan strategis berbasis pertanian berada di Kecamatan Lalembuu. Kawasan strategis ini berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.2. Rencana Kawasan Strategis Konawe Selatan



Sumber: Perda RTRW Kab. Konsel No. 5 Tahun 2020

Selain kawasan strategis, Kabupaten Konawe Selatan juga memiliki kawasan budidaya yang fungsi utamanya didasarkan pada kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan peruntukan budidaya ini antara lain terdiri atas: kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, dan kawasan pariwisata.

Kawasan hutan produksi terdiri dari hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Konawe Selatan luasnya kurang lebih 3.620 hektar. Potensi ini terdapat di Kecamatan Wolasi, Laeya, Moramo Utara, dan Moramo. Adapun kawasan hutan produksi tetap luasnya kurang lebih 66.767 hektar terdapat di Kecamatan Ranomeeto, Konda, Moramo Utara, Moramo, Kolono, Lainea, Laeya, Wolasi, Baito, Palangga, Palangga Selatan, Tinanggea, Buke, Benua, Angata, Mowila, dan Landonono. Total hutan produksi yang ada 70.387 hektar (Perda RTRW Kab. Konseil No. 5 Tahun 2020).

Kabupaten Konawe Selatan juga memiliki **kawasan pertanian** seluas kurang lebih 163.821 hektar terdiri atas: kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan. Secara umum, kawasan pertanian ada di setiap kecamatan. Namun demikian, sejumlah kecamatan telah ditetapkan sebagai wilayah khusus merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan seperti yang tampak dalam tabel berikut.

Tabel 2.3. Sebaran Kawasan Pertanian di Kabupaten Konawe Selatan

Kawasan	Wilayah Kecamatan	Keterangan
Tanaman Pangan	Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Konda, Moramo, Moramo Utara, Laonti, Kolono, Wolasi, Sabulakoa, Mowila, Landonono, Lainea, Laeya, Palangga, Palangga Selatan, Andoolo, Andoolo Barat, Buke, Angata, Basala, Lalembu, Baito, dan Tinanggea	Padi
Hortikultura	Ranomeeto, Lainea, Laeya, Moramo, Moramo Utara, Baito, Sabulakoa, dan Palangga	Cabai
	Konda, Wolasi, Laeya, Andoolo, Buke, Basala, Lalembuu, dan Tinanggea	Jeruk
Perkebunan	Benua, Basala, Andoolo, Andoolo Barat, Buke, Lalembuu, Angata, dan Tinanggea	Kakao
	Moramo, Kolono, Laeya, Lainea, Palangga, Tinanggea, Basala, Buke, Baito, Andoolo, Benua, Angata, Mowila, Landonono, Ranomeeto Barat, dan Wolasi	Sawit
	Moramo, Kolono, Laeya, Lainea, Palangga, Tinanggea, Basala, Buke, Baito, Andoolo, Benua, Angata, Mowila, Landonono, Ranomeeto Barat, Konda, dan Wolasi	Tebu
Pternakan	Laeya, Lainea, dan Wolasi	Wilayah pengembangan sapi
	Palangga, Tinanggea, Baito, Buke, Laeya, dan Konda	Sumber bibit Sapi Bali

Sumber: Perda RTRW Kab. Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2020 (diolah)

Kawasan perikanan di Kabupaten Konawe Selatan luasnya sekitar 5.551 hektar yang terdiri dari perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya. Potensi pengembangan wilayah di sektor perikanan tangkap berada di Kecamatan Kolono dan Kolono Timur sarana dan prasarana perikanan tangkap di daerah ini terdiri dari Tempat Pendaratan Ikan (TPI) sekaligus berfungsi sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Untuk saat ini sudah tersedia TPI/PPI Tinanggea di Kecamatan Tinanggea. Adapun kawasan budidaya air payau berupa tambak berada di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Kolono Timur, Kolono, Lainea, Laeya, Palangga Selatan, dan Tinanggea. Balai Benih Ikan Air Tawar (BBI) meliputi BBI Ranomeeto di Kecamatan Ranomeeto, dan rencana BBI Air Tawar di Kecamatan Laeya, Andoolo, Konda, Angata dan Tinanggea. Kawasan budidaya air tawar direncanakan ada di setiap kecamatan dengan mempersiapkan Balai Benih Ikan Air Laut di Kecamatan Kolono, Palangga Selatan, Tinanggea, Lainea, dan Kolono Timur.

Kawasan pertambangan dan energi di Kabupaten Konawe Selatan luasnya kurang lebih 17.582 hektar yang terdiri atas kawasan pertambangan mineral (logam dan batuan) serta kawasan panas bumi. Kawasan pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Laonti, Laeya, Palangga Selatan, Palangga, Tinanggea, Lalembuu, dan Andoolo. Adapun kawasan pertambangan batuan terdapat di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, dan Laonti. Sementara untuk potensi panas bumi terdapat di Desa Kaindi Kecamatan Lainea, Desa Lamokula Kecamatan Moramo Utara, dan Desa Moramo, Kecamatan Moramo.

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Konawe Selatan memiliki luas sekitar 4.445 hektar merupakan bagian dari perwilayahan industri yang dilaksanakan melalui pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah. Kawasan peruntukan industri direncanakan di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Laonti, Wolasi, Kolono, Kolono Timur, Lainea, Laeya, Palangga, Palangga Selatan, Tinanggea, Andoolo, Andoolo Barat, Baito, Benua, Buke, Angata, Mowila, Landono, Ranomeeto, dan Konda. Kawasan industri direncanakan di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Palangga Selatan, dan Tinanggea. Adapun sentra industri kecil dan menengah tersebar di beberapa kecamatan menurut jenis industrinya

Tabel 2.4. Sebaran Kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Konawe Selatan

NO	INDUSTRI	KECAMATAN	KET
1	Pengolahan hasil pertanian dan peternakan	Konda, Buke, Andoolo, Tinanggea, Palangga, Baito, Lainea, Laeya, Moramo, Landono, Mowila, Angata, Benua, dan Desa Lomboeya Kecamatan Moramo Utara	-
2	Industri pengolahan hasil perkebunan	Ranomeeto	kakao
		Andoolo, Andoolo Barat	tepung tapioka
		Angata, Moramo, dan Mowila	rencana pabrik gula
		Laeya dan Moramo	rencana pabrik pengolahan kelapa sawit
3	Pengolahan hasil perikanan	Tinanggea, Palangga Selatan, Lainea, Kolono, Moramo, Moramo Utara, Laonti, Laeya, dan Kolono Timur	-
4	Pengolahan hasil hutan	Laeya, Lainea, Basala, Landono, Moramo, Angata, Laonti, Wolasi, Tinanggea, Buke, Andoolo, Kolono, Palangga, Palangga Selatan, Baito, Benua	-
5	Pengolahan hasil pertambangan mineral bukan logam dan batuan	Moramo Utara, Moramo, Kolono, Palangga, Mowila, Ranomeeto, Ranomeeto Barat dan Lalembu	-
6	Sentra industri kreatif	Lainea, Basala	berbahan baku kayu
		Andoolo, Ranomeeto	tenun

Sumber: Perda RTRW Kab. Konawe No. 5 Tahun 2020

Untuk **kawasan pariwisata**, luasnya kurang lebih 57 hektar yang terdiri dari pariwisata alam laut atau bahari, alam pegunungan atau hutan, budaya dan sejarah, serta pariwisata buatan. Sebagian besar daerah yang menjadi potensi wisata alam laut/bahari berada di Kecamatan Laonti. Sementara pariwisata alam pegunungan atau hutan, budaya dan sejarah, serta pariwisata buatan tersebar di beberapa kecamatan. Secara umum, potensi wisata Kabupaten Konawe Selatan ada pada objek alam laut/bahari dan alam pegunungan/hutan seperti yang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.5. Jenis dan Objek Wisata di Konawe Selatan, Beserta Lokasinya

NO	JENIS WISATA	OBJEK	KECAMATAN
1	Alam laut atau bahari	Pulau Hari, Pulau Hari Kecil, Pulau Lemo, Pulau Cempedak Atas, Pulau Cempedak Bawah, Pulau Lalowatu, Pulau Palioboru, Pulau Palioboru Kecil, Pulau Gala, Pulau Pondiana Utara, Pulau Watulumango, Pulau Watulumango Tengah, Pulau Watulumango Utara, Pulau Watundoluboto, Pulau Burung, Pulau Kapal, Tanjung Gomo, Pantai Namu, Pantai Baho, Pantai Bondu-bontu	Laonti
		Pantai Polewali, Pantai Bangun Jaya, Mangrove Teluk Kalo-Kalo, Mangrove Lamokahi	Lainea
		Pulau Lara, Pulau Wawosunggu, Pulau Wawosunggu Kecil	Moramo
		Pulau Senja, Pulau Wawatu, Pulau Labotaone Kecil	Moramo Utara
		Pantai Watumelewe, Mangrove Lanowulu	Tinanggea
		Pulau Tabatabaro, Pantai Batu Putih	Kolono Timur
		Pantai Torobulu, Mangrove Muara Laeya	Laeya
		Teluk Kolono	Kolono
2	Alam pegunungan atau hutan	Pegunungan Popalia, agrowisata perkebunan, Air Terjun Wolasi	Wolasi
		Air Panas Lainea, Air Panas Kaindi	Lainea
		Air Terjun Moramo, Air Panas Amohola	Moramo
		Air Terjun Boro-Boro, agrowisata perkebunan	Ranomeeto Barat
		Air Terjun Lasidaka, agrowisata perkebunan	Konda
		Air Terjun Namu	Laonti
		Air Panas Sungai Roda	Kolono
		Agrowisata perkebunan	Lalembu, Ranomeeto
3	Budaya dan sejarah	Situs makam	Andoolo, Tinanggea, Mowila, Lainea, Palangga, Laeya, Lalembuu
		Situs Benteng Lapadi	Lainea
		Situs peninggalan Jepang	Lainea, Laonti
4	Buatan	Wisata pemancingan buatan	Tinanggea, Mowila, Ranomeeto, Konda
		Wisata rekreasi bendung	Mowila, Lalembuu, Andoolo, Laeya, dan Tinanggea
		Bumi Perkemahan	Andoolo, Tinanggea
		Hutan kota dan taman kota, Alun-alun kabupaten, sarana olah raga (GOR)	Andoolo

Sumber: Perda RTRW Kab. Konawe No. 5 Tahun 2020 (diolah)

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana dapat digambarkan sebagai kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Suatu wilayah disebut sebagai rawan bencana jika dalam jangka waktu tertentu mempunyai kondisi dan karakter geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, dan geografis, yang kurang mempunyai kemampuan untuk mencegah, meredam, dan mencapai kesiapan dalam menanggapi dampak buruk dari bahaya bencana yang mungkin muncul. Dalam Perda RTRW No. 5 Tahun 2020 pasal 21, wilayah rawan bencana tersebut meliputi:

- a) **Kawasan rawan gempa bumi** berada di Kecamatan Moramo, Moramo Utara, Laonti, Kolono, Lainea, Laeya, Palangga Selatan, Tinanggea, Lalembuu, Basala, Benua, Angata, Mowila, Landono, Sabulakoa, Ranomeeto Barat, Ranomeeto, Konda, dan Baito. Sementara patahan aktif terdapat di Kecamatan Kolono, Kolono Timur, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Konda, Landono, Lainea, Laeya, Lalembuu, Wolasi, Sabulakoa, Mowila, Buke, Andoolo, Tinanggea, Palangga, Palangga Selatan, dan Andoolo Barat.
- b) **Kawasan rawan tsunami** terdapat pada pesisir pantai di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, dan Laonti.
- c) **Kawasan rawan abrasi** dengan kerawanan tinggi yang terdapat pada pesisir pantai di sebagian Kecamatan Moramo Utara, dan Tinanggea.
- d) **Kawasan rawan longsor** dengan kerawanan tinggi di Kecamatan Angata, Benua, Mowila, Buke, Baito, Palangga, dan Laeya.
- e) **Kawasan rawan banjir** terdapat di Kecamatan Angata, Basala, Benua, Kolono, Kolono Timur, Konda, Laeya, Lainea, Lalembu, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Mowila, Palangga, Palangga Selatan, Sabulakoa, dan Tinanggea.
- f) **Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan** dapat terjadi di setiap kecamatan.
- g) **Kawasan rawan bencana angin puting beliung** terdapat di Kecamatan Laeya, Lainea, Tinanggea, Konda, Andoolo, dan Basala.

2.1.4. Demografi

Berdasarkan hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe Selatan tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Konawe Selatan 317.826 jiwa. Jumlah tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 3,02 persen antara tahun 2020-2022. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tinanggea yaitu 25.716 jiwa, kemudian Kecamatan Konda 22.471 jiwa, sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Kolono Timur dengan jumlah penduduk 5.574 jiwa.

Tabel 2.6. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2020-2022

No.	Kecamatan	Jumlah	Pertumbuhan (%)
1	Tinanggea	25.716	2,98
2	Lalembuu	16.127	0,44
3	Andoolo	10.901	3,20
4	Buke	14.811	1,74
5	Andoolo Barat	9.031	3,20
6	Palangga	15.315	3,54
7	Palangga Selatan	7.654	3,54
8	Baito	9.302	3,31
9	Lainea	10.269	2,30
10	Laeya	21.942	2,26
11	Kolono	11.853	4,00
12	Kolono Timur	5.574	3,99
13	Laonti	10.473	1,59
14	Moramo	16.189	3,55
15	Moramo Utara	9.227	4,06
16	Konda	22.471	3,44
17	Wolasi	5.848	3,39
18	Ranomeeto	22.111	5,05
19	Ranomeeto Barat	8.297	3,89
20	Landono	8.691	3,56
21	Mowila	14.231	3,88
22	Sabulakoa	5.630	3,57
23	Angata	17.187	2,24
24	Benua	11.124	2,08
25	Basala	7.852	1,68
Konawe Selatan		317.826	3,02

Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2023

Laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Ranomeeto 5,05. Sedangkan Kecamatan dengan laju pertumbuhan terendah ialah Kecamatan Lalembuu 0,44. Sebaran jumlah dan pertumbuhan penduduk per kecamatan disajikan dalam Tabel 2.6. Selain jumlah dan pertumbuhan penduduk, tabel berikut menunjukkan persentase dan kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2022.

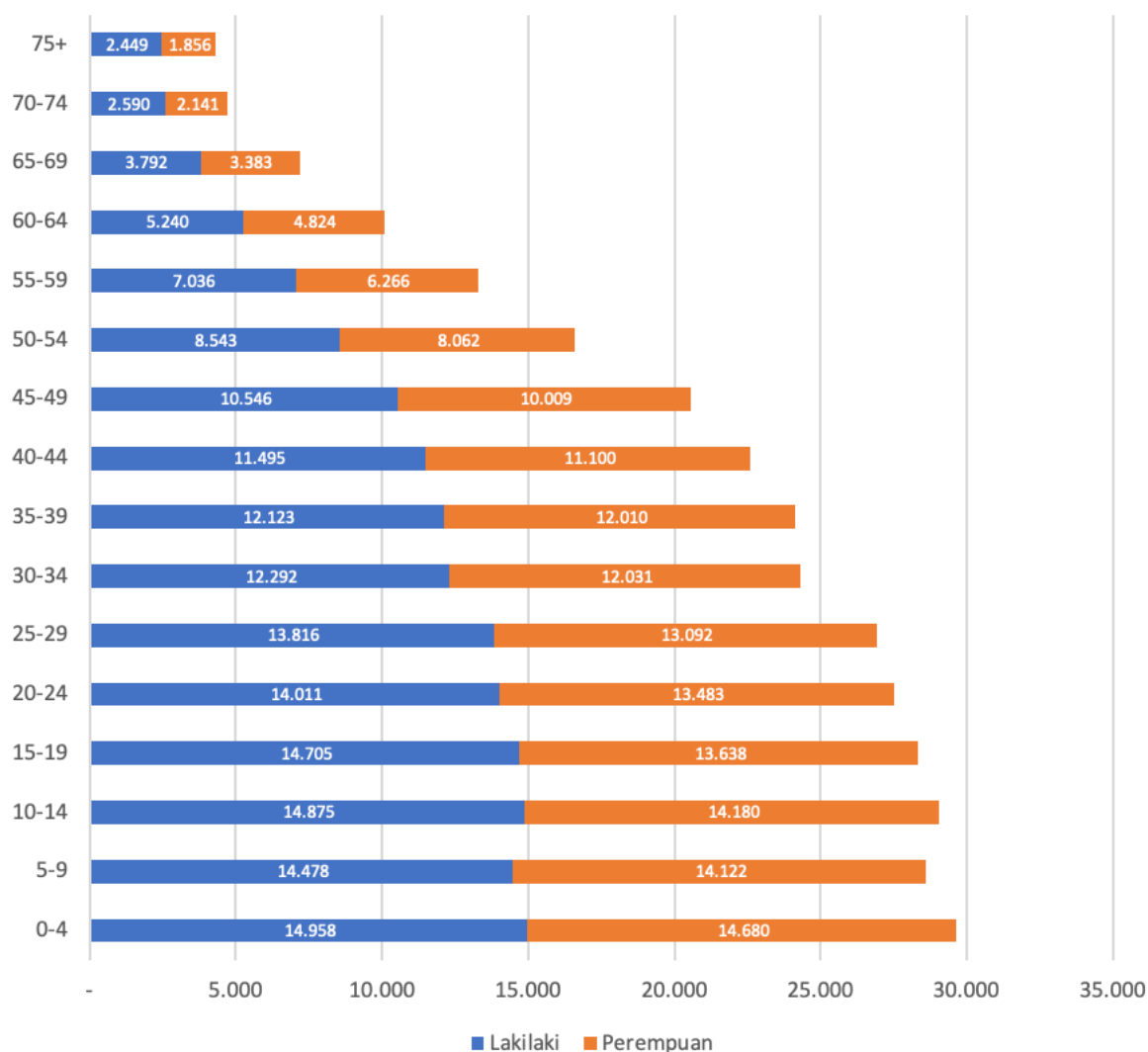
Tabel 2.7. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Tinanggea	8,09	80,37
2	Lalembuu	5,07	109,04
3	Andoolo	3,43	91,87
4	Buke	4,66	81,66
5	Andoolo Barat	2,84	113,36
6	Palangga	4,82	88,14
7	Palangga Selatan	2,41	71,11
8	Baito	2,93	61,31
9	Lainea	3,23	50,07
10	Laeya	6,90	79,29
11	Kolono	3,73	34,83
12	Kolono Timur	1,75	44,59
13	Laonti	3,30	28,02
14	Moramo	5,09	63,67
15	Moramo Utara	2,90	57,76
16	Konda	7,07	176,76
17	Wolasi	1,84	36,80
18	Ranomeeto	6,96	244,97
19	Ranomeeto Barat	2,61	119,38
20	Landono	2,73	79,18
21	Mowila	4,48	115,80
22	Sabulakoa	1,77	84,62
23	Angata	5,41	58,44
24	Benua	3,50	83,07
25	Basala	2,47	161,13
KONAWA SELATAN		100,00	75,00

Sumber: Konawe Selatan Dalam Angka, 2023

Dari data terlihat persentase penduduk tertinggi berada di kecamatan Tinanggea (8,09%), dan terendah di Kecamatan Kolono Timur (1,75%). Ketika dibandingkan dengan luas area, Ranomeeto merupakan kecamatan dengan penduduk terpadat yakni 244,97 jiwa per km². Sementara yang terlengang adalah Kecamatan Laonti dengan penduduk 28,02 jiwa per km².

Grafik 2.2. Sebaran Penduduk Menurut Kelompok Usia di Kabupaten Konawe Selatan 2022



Sumber: BPS Konawe Selatan 2023 (diolah)

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Secara umum, perekonomian Konawe Selatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami perkembangan meskipun cenderung melambat. Meski demikian secara nominal PDRB Kabupaten Konawe Selatan terus mengalami peningkatan baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. PDRB perkapita Konawe Selatan juga menunjukkan peningkatan konsisten dari tahun-ke tahun, meski demikian potensi disparitas harga juga membayangi peningkatan pendapatan perkapita masyarakat ditandai oleh selisih antara PDRB perkapita atas dasar harga konstan dan harga berlaku yang relatif besar. Secara agregat, pertumbuhan ekonomi Konawe Selatan mengalami peningkatan dimana capaian tersebut menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang berada di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Tabel 2.8. Perkembangan PDRB Kabupaten Konawe Selatan 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
PDRB ADHK (miliar Rupiah)	8.443,37	8.256,32	8.649,17	9.154,74
PDRB ADHB (miliar Rupiah)	12.105,05	11.823,22	12.654,68	14.536,50
PDRB Perkapita ADHK (ribu Rupiah)	26.822,64	25.858,28	27.661,95	28.804,26
PDRB Perkapita ADHB (ribu Rupiah)	38.454,96	37.029,61	40.472,46	45.737,29
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,69	-2,22	4,76	5,85

Sumber: BPS Konawe Selatan 2023 (diolah)

**Tabel 2.9. PDRB Kabupaten Konawe Selatan Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)**

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.226.176,78	3.352.830,81	3.558.555,77	3.759.366,67
2	Pertambangan dan Penggalian	2.717.043,29	2.574.175,36	2.783.419,4	3.063.228,03
3	Industri Pengolahan	297.056,53	299.559,28	327.039,76	339.707,09
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2.822,78	2.905,71	3.166,43	3.475,93
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.243,31	4.425,29	4.615,61	4.552,45
6	Konstruksi	1.191.823,43	1.200.515,21	1.412.892,93	1.547.184,35
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.153.350,27	1.155.353,85	1.257.978,79	1.442.046,23
8	Transportasi dan Pergudangan	2.198.853,93	1.828.856,87	1.835.048,85	2.785.336,18
9	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	28.596,9	29.200,69	30.963,79	32.634,99
10	Informasi dan Komunikasi	49.101,65	52.166,81	54.291,82	55.942,98
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	91.195	97.938,96	113.364,94	129.627,46
12	Real Estat	79.673,46	80.885,45	81.745,35	82.992,56
13	Jasa Perusahaan	1.212,07	1.251,32	1.318,22	1.447,23
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	448.769,06	483.516,06	510.648,12	558.705,96
15	Jasa Pendidikan	444.438,28	475.717,2	482.496,84	521.982,49
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	87.048,48	98.576,56	106.623,52	110.789,09
17	Jasa Lainnya	83.640,46	85.344,36	90.514,5	97.481,74
PDRB		12.105.045,68	11.823.219,79	12.654.684,64	14.536.501,44

Sumber : BPS Kab. Konawe Selatan 2023

Tabel 2.10. PDRB Kabupaten Konawe Selatan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.261.515,83	2.287.151,52	2.379.100,31	2.436.263,73
2	Pertambangan dan Penggalian	2.022.349,03	1.919.303,60	1.998.712,69	2.041.886,99
3	Industri Pengolahan	224.626,47	218.009,71	227.894,49	231.835,12
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2.477,20	2.477,84	2.643,41	2.791,69
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.395,82	3.511,62	3.646,65	3.546,54
6	Konstruksi	831.612,48	829.870,23	936.757,35	967.766,97
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	812.181,19	801.094,02	862.861,64	932.459,82
8	Transportasi dan Pergudangan	1.297.084,55	1.165.621,79	1.176.836,54	1.413.694,67
9	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	21.477,88	20.840,3	21.915,70	22.655,42
10	Informasi dan Komunikasi	48.471,34	52.164,85	54.449,72	56.199,78
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	63.031,07	67.523,36	73.614,76	78.147,47
12	Real Estat	63.883,00	64.703,66	65.282,50	66.091,81
13	Jasa Perusahaan	939,2	939,11	966,99	1.010,43
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	325.501,98	334.648,59	348.845,44	380.474,77
15	Jasa Pendidikan	329.740,86	348.569,06	348.403,96	365.599,43
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	66.939,19	72.890,09	77.445,73	80.047,18
17	Jasa Lainnya	68.139,03	66.995,93	69.793,83	74.270,00
PDRB		8.443.366,12	8.256.315,29	8.649.171,71	9.154.741,82

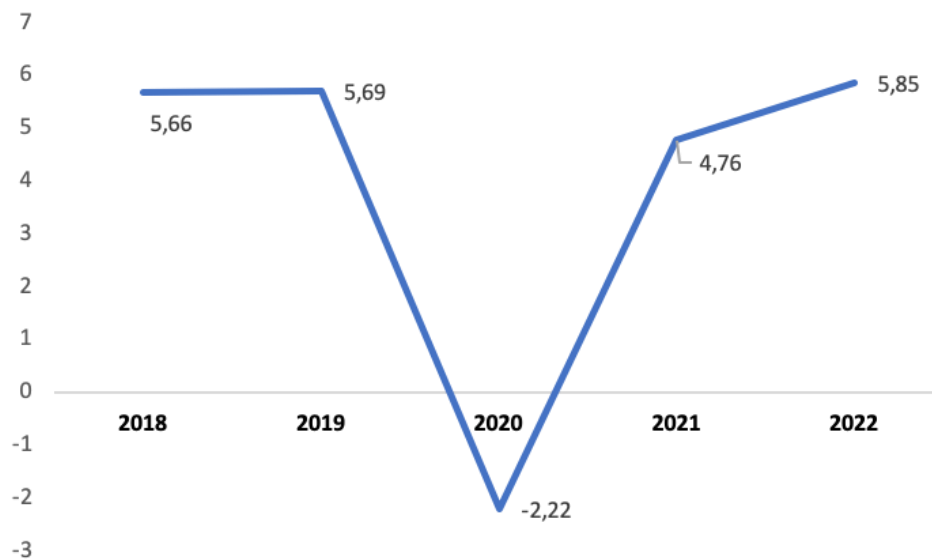
Sumber : BPS Kab. Konawe Selatan 2023

Struktur perekonomian Konawe Selatan ditopang oleh tiga lapangan usaha atau sektor yakni: (i). pertanian; (ii). pertambangan dan penggalian; serta (iii). transportasi dan pergudangan. Peran ketiga lapangan usaha ini mencapai seperdua dari keseluruhan nilai tambah yang terbentuk di dalam perekonomian Kabupaten Konawe Selatan. Lapangan usaha lainnya yang memiliki peran

penting dalam pembentukan nilai tambah dalam perekonomian Kabupaten Konawe Selatan adalah: (i). perdagangan; (ii). konstruksi; serta (iii). industri pengolahan.

Awal tahun 2020 perekonomian global, nasional dan regional di seluruh dunia menghadapi tekanan akibat pandemic Covid-19 dan berimplikasi terhadap kinerja perekonomian tiap-tiap daerah termasuk Kabupaten Konawe Selatan. Meski tumbuh tipis pada tahun 2018 dan 2019, perekonomian Konawe Selatan mengalami kontraksi atau tumbuh negatif pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 dan tahun 2022 kinerja perekonomian Konawe Selatan sudah mengalami *recovery*.

Grafik 2.3.
Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2018-2022 (dalam persen)



Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2023

Aspek lain yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah yakni kondisi kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. persentase penduduk miskin di Kabupaten Konawe Selatan terus mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan, pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin mencapai 34.050 jiwa pada garis kemiskinan sebesar 181.796 rupiah, sementara pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin berjumlah 33.890 jiwa pada garis kemiskinan sebesar 235.654 rupiah. Adapun di tahun 2022 jumlah penduduk

miskin Konawe Selatan sebanyak 35,79 jiwa pada garis kemiskinan sebesar 294.510 rupiah.

Tabel. 2.11.
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin
di Kabupaten Konawe Selatan, 2015 – 2022

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2015	181.796	34,05	11,58
2016	195.175	33,94	11,36
2017	200.663	33,73	11,14
2018	219.979	33,73	10,95
2019	235.654	33,89	10,81
2020	261.382	34,22	10,74
2021	275.339	36,17	11,34
2022	294.510	35,79	11,08

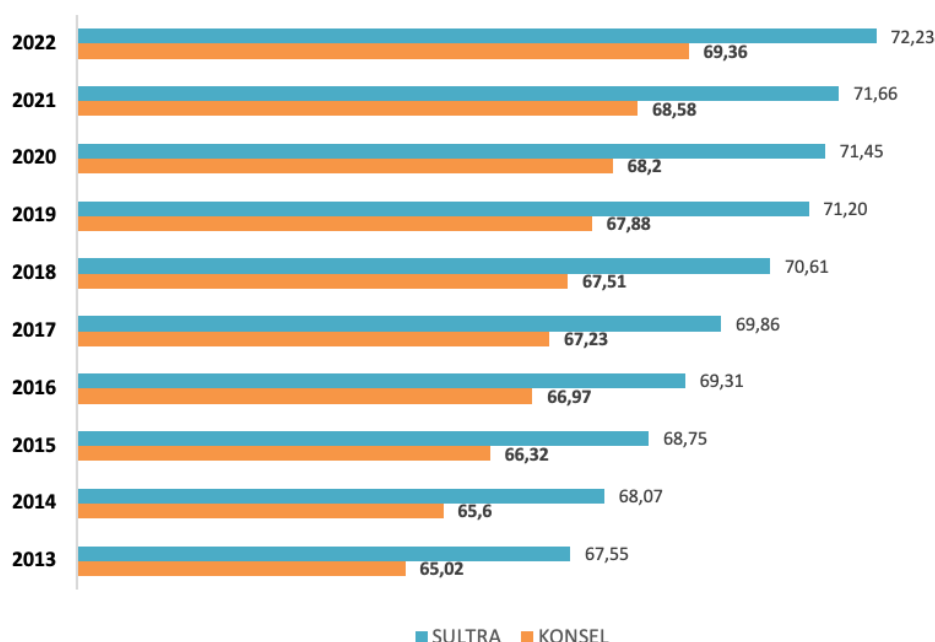
Sumber : BPS Kab. Konawe Selatan 2023

Selain isu kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga kerap menjadi rujukan hasil pembangunan masyarakat. IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup atau daya beli masyarakat untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang

baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Grafik 2.4. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Konawe Selatan



Sumber: BPS Kab. Konawe Selatan 2023 (diolah)

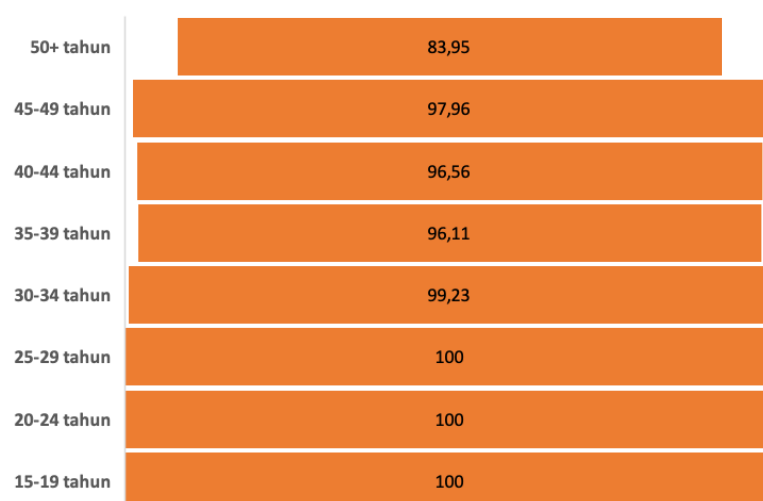
Secara umum, pembangunan manusia Konawe Selatan terus mengalami kemajuan selama periode 2015 hingga 2022. IPM Konawe Selatan meningkat dari 66,32 pada tahun 2015 menjadi 69,36 pada tahun 2022, walaupun IPM Konawe Selatan masih berada dibawah IPM Provinsi. Selama periode 2015 hingga 2022, IPM Konawe Selatan menunjukkan kemajuan walaupun masih dengan kategori sedang.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya,

tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Grafik berikut menunjukkan persentase melek huruf di Kabupaten Konawe Selatan.

Grafik 2.5. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022



Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2023

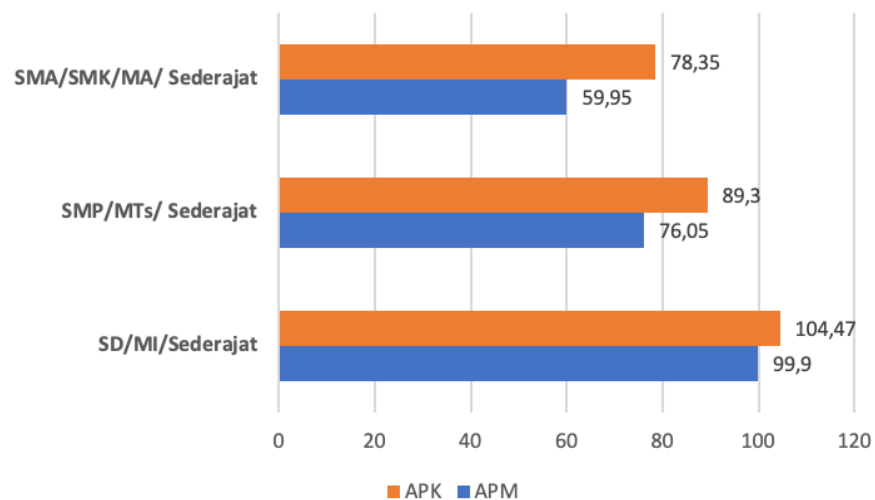
Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Misal, APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Untuk meningkatkan angka partisipasi kasar yang belum mencapai target dapat dilakukan, misalnya dengan menambah fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Adapun Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia

yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Berikut ini Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Kasar di Konawe Selatan.

Grafik 2.6. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022

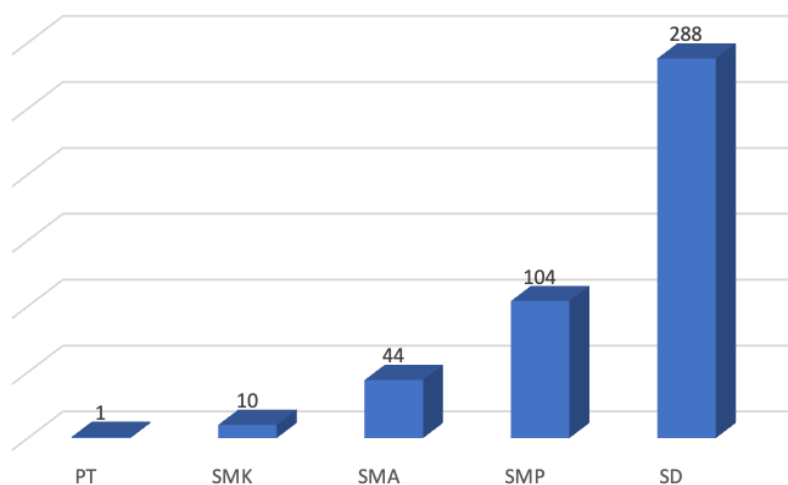


Sumber: Konawe Selatan dalam Angka 2023

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pendidikan merupakan salah satu aspek layanan umum yang penting. Salah satu kunci pencapaian layanan pendidikan yang berkualitas dapat dilihat dari kondisi ketersediaan fasilitas pendidikan. Grafik berikut menggambarkan jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan.

Grafik 2.7.
Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2022



Sumber : BPS Kab. Konawe Selatan, 2023 (diolah)

Selain fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan juga menjadi tulang punggung dan bagian dari layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat serta wajib disediakan oleh pemerintah. Tabel berikut menunjukkan perkembangan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Konawe Selatan.

Tabel 2.12.
Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan
Kabupaten Konawe Selatan

FASILITAS DAN TENAGA KESEHATAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rumah Sakit	1	1	1	1	1
Puskesmas	24	24	24	25	26
Puskesmas Pembantu	54	54	54	67	51
Puskesmas Keliling	19	19	19	29	31
Puskesmas Plus	0	0	0	0	0
Poliklinik Desa	31	31	31	56	69
Pos Pelayanan Terpadu	409	416	424	411	403
Pos Kesehatan Desa	131	131	131	123	135
Fasilitas Kesehatan	669	676	684	712	716
Tenaga Kesehatan	1.683	900	992	856	868

Sumber: BPS Konawe Selatan Sumber : BPS Kab. Konawe Selatan 2023 (diolah)

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Konawe Selatan meningkat setiap tahunnya dimana pada tahun 2018 sebesar 67,51 tahun dan tahun 2022 telah mencapai 71,64 tahun dan di tahun 2023 mencapai 71,72 tahun didukung pula dengan peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang semakin meningkat yang terdiri dari 8 (delapan) jenis fasilitas. Sedangkan jumlah tenaga kesehatan fluktuatif.

Tabel 2.13
AKI, AKB DAN AKABA
KAB. KONAWE SELATAN

NO	TAHUN	JUMLAH LAHIR HIDUP	JUMLAH KEMATIAN IBU	ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) PER 100.000 KH	JUMLAH KEMATIAN BAYI	ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) PER 1000 KH	JUMLAH KEMATIAN ANAK BALITA	ANGKA KEMATIAN ANAK BALITA (AKABA) PER 1000 KH
1	2020	5930	2	34	61	10	3	1
2	2021	5,796	19	328	47	8	4	1
3	2022	5,980	5	84	68	11	3	1
4	2023	5,109	12	235	67	13	2	0

Sumber Data : Profil Dinkes SULTRA 2020, 2021, 2022 dan 2023

2.14 Tabel
STUDI STATUS GIZI
KAB. KONAWE SELATAN

NO	TAHUN	STUDI
		SSGI
1	2021	28,3 %
2	2022	28%

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Selatan Tahun 2023

Stunting di Kabupaten Konawe selatan dengan jumlah sasaran keluarga beresiko stunting dengan jumlah 2165 KK dengan anak Stunting dengan jumlah anak stunting berjumlah 673 anak dengan lokasi sasaran terdapat di 25 kecamatan di lokasi 34 desa. Dalam kepersetan JKN yang berada di Konawe Selatan dengan jumlah PST JKN Konawe Selatan 319.729 peserta dengan persentase sebesar 99,77 % di tahun 2023 yang merupakan data yang di keluarkan oleh dinas kesehatan Konawe Selatan, **Untuk penyakit menular** Jumlah kasus HIV di Konawe Selatan pada tahun 2022 sebanyak 40 kasus untuk penemuan kusta di umur 1-14 tahun terdapat 13 kasus baru kusta ditahun 2022, untuk campak di tahun 2022 terdapat 9 kasus, untuk DBD ada 99 kasus DBD di tahun 2022 untuk penyakit malaria sebanyak 21 kasus positif, **Untuk penyakit tidak menular** meliputi hipertensi 15.571 yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan penyakit DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebesar 73,9% di tahun 2022. Persentase sarana air minum yang di awasi/diperiksa sebesar 70,3% sarana air minum di inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) untuk persentase dengan akses terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat) sebesar 100% ditahun 2022 dan data desa sanitasitotal berbasis masyarakat (STBM) sebesar 100% dan tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan sebesar 86% di tahun 2022.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Panjang jalan yang menjadi wewenang pemerintah Provinsi di Kabupaten Konawe Selatan adalah sepanjang 237,84 kilometer sementara Panjang jalan yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten Konawe Selatan adalah sepanjang 1.032 kilometer. Konektivitas antar wilayah di dalam Kabupaten Konawe Selatan bertumpu pada daya dukung infrastruktur jalan dan jembatan terutama untuk menopang kegiatan rantai pasok ragam barang dan jasa di Konawe Selatan.

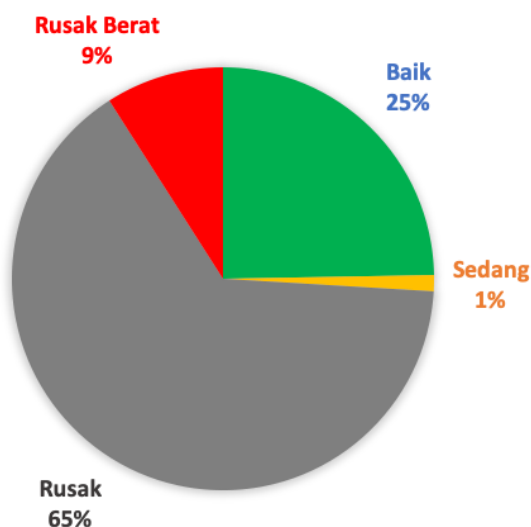
Tabel 2.15. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Konawe Selatan (km)

Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2020	2021	2022
Negara	n/a	n/a	165,8
Provinsi	237,84	237,84	238,75
Kabupaten	1.032,00	1.032,00	1.032,00
Total	n/a	n/a	1.436,55

Sumber: BPS Konawe Selatan 2023

Proporsi Panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Konawe Selatan adalah 255,09 km dalam keadaan baik, 12,7 km kondisi sedang, 670,76 km kondisi rusak, dan 93,45 km rusak berat.

Grafik 2.8. Proporsi Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022



Sumber: BPS Konawe Selatan, 2023

Selain jaringan jalan, infrastruktur penopang konektivitas adalah jembatan. Jumlah jembatan menurut jenis konstruksinya di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2022 adalah, beton 351 unit, bailey 5 unit, semi permanen 44 unit, kayu 3 unit dan darurat 16 unit.

Tabel 2.16. Jumlah dan Panjang Jembatan Berdasarkan Jenis Konstruksinya 2022

Jenis Konstruksi Jembatan	Jumlah Total (Unit)	Panjang (meter)
Beton	351	2.704,67
Rangka	-	-
Semi Rangka	-	-
Bailey	5	175,50
Semi Permanen	44	298,00
Kayu	3	16,00
Darurat	16	23,00
Jumlah	419	3.217,17

Sumber: BPS Konawe Selatan 2023

Investasi di daerah merupakan salah indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan meningkatnya investasi di daerah, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan di daerah tersebut. Tantangan terbesar dari perencanaan investasi di daerah adalah koordinasi realisasi penanaman modal baik bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Tantangan ini juga berkaitan dengan beberapa wewenang daerah dalam perencanaan dan perizinan kegiatan investasi yang sebelumnya berada di daerah saat ini menjadi wewenang pemerintah pusat.

Pencari kerja di Kabupaten Konawe Selatan didominasi oleh luaran Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang secara kumulatif hingga tahun 2022 mencapai 1.190 orang pencari kerja, pencari kerja dengan kualifikasi pendidikan sarjana strata satu secara kumulatif hingga tahun 2022 mencapai 248 orang.

Tabel 2.17.
Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Kantor Disnakertrans Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022

Pendidikan	Sisa 2020	Sisa 2021	Terdaftar 2022	Ditempatkan
SD	9	3	264	4
SLTP	51	17	149	6
SLTA	872	377	1.190	258
Diploma III	37	12	70	2
Sarjana/S1	233	207	248	88
Sarjana/S2	-	1	-	-
Jumlah	1.202	617	1.921	358

Sumber: BPS Konawe Selatan (2023)

Berdasarkan lapangan usaha, penduduk Kabupaten Konawe Selatan mayoritas bekerja pada sektor pertanian atau mencapai 46,72 persen terhadap total penduduk bekerja di Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2022, selain pada sektor pertanian penduduk Konawe Selatan yang bekerja juga terkonsentrasi pada sektor jasa atau mencapai 34,77 persen.

Tabel 2.18.
Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022

Lapangan Usaha	Pekerja		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36.524	18.687	55.211
Industri Pengolahan, Pertambangan dan penggalian, serta Industri Lainnya	31.267	9.730	40.997
Jasa	32.433	29.429	61.682
Jumlah	100.224	57.846	158.070

Sumber: BPS Konawe Selatan 2023

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan

penduduk usia 65 tahun ke atas.

Tabel 2.19.
Rasio Ketergantungan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022

VARIABEL	SATUAN	JUMLAH
Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	Jiwa	87.293
Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	Jiwa	16.211
Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	Jiwa	103.504
Jumlah Penduduk Usia Produktif	Jiwa	214.322
Rasio Ketergantungan	Persen	48,29

Sumber: Konawe Selatan Dalam Angka 2023 (diolah)

Tabel 2.17 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 setiap 100 orang berusia produktif menanggung 48,29 jiwa yang belum/tidak produktif. Rasio ini cenderung lebih baik dari tahun 2017 sebesar 59 jiwa. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya.

Tabel 2.20
Jumlah Sambungan Rumah (SR) Air Minum

Keterangan	2022	2023	2024	2025	2026
Total Sambungan Rumah (SR) Air Minum	7,786 Kk	9,920 Kk	11,655 Kk	13,529 Kk	15,512 Kk

Sumber : Dinas PUPR Kab. Konawe Selatan Tahun 2023

Pada Tabel 2.20 Menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2022 sampai tahun 2026, Pada Tahun 2022 Jumlah Sambungan Rumah Air Bersih berjumlah 7,786 Kk terjadi ,Peningkatan sambungan Sambungan Rumah Air Bersih di Tahun 2023 di angka 9,920 Kk, di Tahun 2024 di angka 11,655 Kk, terjadi peningkatan di tahun 2025 di angka 13,529 begitupun di tahun 2026 berada diangka 15,512 Kk.

Tabel. 2.21
Jumlah Tangki Sepitek / Sanitasi

Keterangan	2022	2023	2024	2025	2026
Total Tangki Sepitek / Sanitasi	581 Kk	1,369 Kk	2,229 Kk	3,054 Kk	3,864 Kk

Sumber : Dinas PUPR Kab. Konawe Selatan Tahun 2023

Pada Tabel 2.21 Menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2022 sampai tahun 2026, Pada Tahun 2022 Jumlah Tangki Sepitek berjumlah 581 Kk terjadi Peningkatan Tangki Sepitek / Sanitasi di Tahun 2023 di angka 1,369 Kk, di Tahun 2024 di angka 2,229 Kk, terjadi peningkatan di tahun 2025 di angka 3,054 Kk dan begitupun di tahun 2026 berada diangka 3,869 Kk.

Tabel. 2.22
Luasan Irigasi Fungsional

Keterangan	2022	2023	2024	2025	2026
Luasan Irigasi Fungsional	832 Ha	1,139 Ha	1,538 Ha	1,963 Ha	2,432 Ha

Sumber : Dinas PUPR Kab. Konawe Selatan Tahun 2023

Pada Tabel 2.21 Menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2022 sampai tahun 2026, Pada Tahun 2022 Luasan Irigasi Fungsional berjumlah 832 Ha terjadi Peningkatan Luasan Irigasi Fungsional di Tahun 2023 di angka 1,139 Ha, di Tahun 2024 di angka 1,538 Ha, terjadi peningkatan di tahun 2025 di angka 1,963 Ha dan begitupun di tahun 2026 berada diangka 2,432 Ha.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian direvisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada 4 (empat) sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PAD yang sah. Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Pajak daerah merupakan sumber penerimaan PAD terbesar di Kabupaten Konawe Selatan. Pada Tahun 2019 Lain-lain Pendapatan daerah yang sah berjumlah Rp.28.055.754.735 meningkat menjadi Rp. 32.685.651.648 pada tahun 2023. Adapun perolehan PAD pada tahun 2019 senilai Rp.66.600.201.039, meningkat menjadi Rp.106.614.594.751 pada tahun 2023. nilai PAD pada tahun 2024 diproyeksikan meningkat sebesar 5 persen atau mencapai Rp. 111.945.324.462. Adapun sumber pendapatan lainnya yakni hasil Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan keuangan Daerah yang Dipisahkan yang keduanya juga mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023.

Tabel 3.1.
Capaian PAD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	66.600.201.039,78	67.654.714.638	83.071.257.238	100.133.442.300	106.614.594.751
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	20.726.072.196,00	19.329.939.959	23.986.978.149	42.794.233.323	40.290.569.818
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.411.751.623,00	6.161.884.686	6.649.168.221	4.215.192.480	27.095.000.000
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan Daerah yang Dipisahkan	7.406.622.485,00	9.586.581.160	5.868.937.183	6.543.373.285	6.543.373.285
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.055.754.735,78	32.576.308.833	46.566.173.685	46.580.643	32.685.651.648

Sumber : BKAD Kab.Konawe Selatan, 2023

Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2023, meliputi:

- Optimalisasi pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan keadaan historis perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dan menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan Perundang-Undangan terkait.
- Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.
- Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan, termasuk melakukan penyesuaian dan atau revisi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.
- Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut.
- Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD.

3.1.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan merupakan transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh yang dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Tabel 3.2.
Capaian Dana Perimbangan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.2.	Dana Perimbangan	1.018.719.609.046,00	1.298.342.310.523	1.075.938.772.456	1.156.658.597.058	1.494.496.279.120
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	62.191.369.349,00	62.065.919.012	126.979.961.252	266.194.649.687	228.673.323.441
1.2.2	Dana Alokasi Umum	694.858.872.000,00	673.726.247.000	661.510.848.000	660.907.007.900	697.253.400.222
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	261.669.367.697,00	237.374.633.178	287.447.963.204	229.556.939.471	275.413.377.250

Sumber :BKAD Kab. Konawe Selatan 2023

Tabel 3.3.
Capaian Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	339.329.696.259	386.209.300.333	344.086.204.149	295.061.251.808	3012.481.863.395
1.3.1	Pendapatan Hibah	57.230.471.000	61.033.780.000	57.299.050.300	0,00	0,00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	30.685.547.259	28.884.457.943	34.835.383.208	41.460.013.808	48.880.625.395
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	251.213.678.000	295.551.062.390	251.853.566.000	253.601.238.000	253.601.238.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	200.000.000	740.000.000	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	98.204.641	0,00	0,00

Sumber : BKAD Kab.Konawe Selatan, 2023

3.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dana penyesuaian dana otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

Berdasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya dan kebijakan pemerintah pusat serta provinsi, maka kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dan mengacu pada tahun sebelumnya.
- Target pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan alokasi bagi hasil tahun 2022 dengan memperhatikan realisasi tahun 2019.
- Penetapan penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau perorangan yang tidak mengikat dan mempunyai konsekuensi pada pengeluaran berdasarkan pada kepastian penerimaan dimaksud.

Secara umum pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Konawe Selatan masih bertumpu pada dana perimbangan. Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang disumbangkan dari PAD masih berada pada kisaran 3-5% dari total APBD. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Besarnya pendapatan daerah selama tahun 2016 hingga tahun 2020 selalu mengalami peningkatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2019, Anggaran 2020

No.	Uraian	Realisasi				Anggaran
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan	1.367.419.035.344,78	1.427.030.805.161,08	1.503.158.043.543,04	1.551.853.291.166,84	1.561.614.773.391,00
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	66.600.201.039,78	67.654.714.638,08	83.071.257.238,04	100.133.442.300,84	106.614.594.751,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	20.726.072.196,00	19.329.939.959,00	23.986.978.149,00	100.133.442.300,84	40.290.569.818,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.411.751.623,00	6.161.884.686,00	6.649.168.221,00	42.794.233.323,00	27.095.000.000,00
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan Daerah yang Dipisahkan	7.406.622.485,00	9.586.581.160,00	5.868.937.183,00	6.543.373.285,00	6.543.373.285,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.055.754.735,78	32.576.308.833,08	46.566.173.685,04	46.580.643.212,84	32.685.651.648,00
1.2.	Dana Perimbangan	1.018.719.609.046,00	1.298.342.310.523,00	970.613.269.036,00	924.479.867.045,00	1.416.143.686.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	62.191.369.349,00	32.288.141.000,00	21.654.457.832,00	34.015.919.674,00	36.056.874.854,44
1.2.2	Dana Alokasi Umum	694.858.872.000,00	751.547.127.000,00	661.510.848.000,00	660.907.007.900,00	700.561.428.374,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	261.669.367.697,00	299.327.971.000,00	287.447.963.204,00	229.556.939.471,00	243.330.355.839,26
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	282.099.225.259,00	396.297.553.073,00	309.102.421.036,00	253.601.238.000,00	38.856.492.640,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	60.499.400.000,00	57.360.860.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	30.685.547.259,00	46.917.642.073,00	34.835.383.208,00	0,00	38.856.492.640,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	251.213.678.000,00	288.400.511.000,00	251.853.566.000,00	253.601.238.000,00	268.817.312.280,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	200.000.000,00	480.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-

Sumber: BKAD Kab. Konawe Selatan, 2023

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
2. Menggali potensi sumber pendapatan asli daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan.
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.
4. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Dana Perimbangan.
5. Mengoptimalkan pendapatan daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
6. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya.
7. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
8. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

3.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Struktur belanja dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c) Belanja modal.

Tabel 3.5
Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019-2023

Uraian	Realisasi				Anggaran
	2019	2020	2021	2022	2023
Belanja	1.488.508.764.082,97	1.525.399.772.509,00	1.074.726.206.068	1.247.158.399.290,00	575.825.238.471,00
Belanja Tidak Langsung	813.277.888.623,00	935.752.536.589,00	847.584.284.544	890.542.003.800,00	487.101.654.841,00
Belanja Pegawai	461.754.138.662,00	508.552.778.099,00	488.604.630.471,00	522.034.921.139,00	256.035.092.676,00
Belanja Bunga	10.817.098.006,00	12.250.000.000,00	495.767.751,00	4.821.988.269,00	8.926.795.196,00
Belanja Hibah	11.073.435.750,00	83.515.107.390,00	9.386.021.283,00	20.666.070.283,00	5.689.971.283,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	60.000.000,00	7.845.221.150,00	12.453.103.800,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	329.168.816.205,00	329.374.651.100,00	332.865.085.704,00	323.485.708.500,00	215.887.583.260,00
Belanja Tidak Terduga	464.400.000,00	2.000.000.000,00	8.766.935.389,00	7.080.211.809,00	562.212.426,00
Belanja Langsung	675.230.875.459,97	589.647.235.920,00	227.141.921.524,25	356.616.395.490,00	88.723.583.630,00
Belanja Modal	406.042.203.823,00	283.913.891.888,00	227.141.921.524,25	356.616.395.490,00	88.723.583.630,00

Sumber: BKAD Kab.Konawe Selatan,2023

Pada Tahun 2021, komposisi antara belanja langsung dan belanja tidak langsung menunjukkan persentase belanja langsung yang lebih besar yaitu 51,09 persen sedangkan persentase belanja tidak langsung sebesar 48,91 persen. Namun pada tahun 2018, porsi belanja tidak langsung berada pada angka 47,84 dan persentase belanja langsung 52,16. Dari pos belanja tidak langsung, pengeluaran belanja pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya. Proporsi belanja pegawai terhadap belanja tidak langsung mencapai 79,16 persen. Komposisi anggaran belanja langsung dengan belanja tidak langsung tersebut tidak memperhitungkan komponen dana desa. Adapun pada tahun 2019 realisasi Belanja Langsung adalah sebesar 98,09 persen dan realisasi Belanja Tidak langsung adalah sebesar 84,34 persen.

Mendasarkan pada data realisasi belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar serta urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM).

Pada tahun 2021 belanja langsung diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan sesuai bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah yang diarahkan pada dengan tujuan dan target sasaran yang jelas. Sedangkan untuk belanja tidak langsung, pengalokasian anggaran dalam bentuk bantuan diarahkan secara selektif dan tidak terus-menerus, utamanya pada kondisi yang benar-benar memerlukan. Selain itu juga diperlukan keterpaduan alokasi anggaran dengan penganggaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Pemerintah Pusat. Adapun kebijakan perencanaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

3.2.1. Arah Kebijakan Belanja Tidak Langsung

3.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada belanja tidak langsung adalah untuk membiayai gaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 3) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- 4) Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN daerah dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- 6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi

pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- 7) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriteria yang ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- 8) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 9) Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui DAK dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

3.2.1.2 Belanja Bunga

Daerah memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2021.

3.2.1.3 Belanja Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3.2.1.4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

3.2.1.5. Belanja Bagi Hasil Pajak

- 1) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2020, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2019 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- 2) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2019 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
- 3) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- 4) Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

3.2.1.6. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021. Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk

mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

- 2) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- 3) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2019 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan. Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penyaluran dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa, pemerintah daerah selaku pemegang saham/modal pengendali dapat menyalurkan melalui BUMD Lembaga Keuangan Perbankan.

3.2.1.7. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan Umum belanja langsung pada APBD diarahkan untuk mencapai pemenuhan pencapaian sasaran pembangunan dalam upaya pencapaian misi pembangunan terutama pada aspek belanja modal yang memiliki konsekuensi bertambahnya aset yang dimiliki, terdapat 3 komponen belanja langsung yakni: (i). belanja operasi; (ii). belanja modal; (iii). belanja tidak terduga. Paralel dengan hal tersebut kebijakan belanja secara umum juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi wewenang daerah dalam hal ini urusan pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dan diatur dalam Permendagri No.77 Tahun 2020.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan sebagai acuan penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat dimasa sekarang maupun masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi/keadaan yang tidak ideal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Sedangkan pada sisi lain permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal. Analisis isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal dimasa depan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan. Dengan demikian rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Konawe Selatan.

1.1. Permasalahan Pembangunan

Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, pelestarian dan perlindungan nilai-nilai budaya daerah, keamanan dan ketertiban, serta kemampuan dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan kemandirian. Di samping itu juga membantu pemerintah pusat dan provinsi dalam mempertahankan, memelihara, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Kabupaten Konawe Selatan beberapa tahun terakhir, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula

berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Identifikasi permasalahan pada semua urusan pembangunan merupakan bagian terpenting dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan. Hasil identifikasi permasalahan akan memberikan data dan informasi sebagai bahan analisis permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Konawe Selatan. Analisis permasalahan berdasarkan pada hasil analisis kinerja capaian pembangunan. Adapun permasalahan pembangunan yang dihadapi pada masing-masing urusan di Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai berikut:

a. Era New Normal (Pandemi Covid-19)

Laporan Bank Indonesia (2021) menyebutkan pandemi Covid-19 memberikan tekanan berat kepada Indonesia pada tahun 2020, tidak hanya kepada aspek kesehatan dan kemanusiaan, tapi juga aspek sosial dan ekonomi. Perekonomian dunia yang melambat serta kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk memitigasi penyebaran Covid-19 yang menurunkan mobilitas perekonomian, telah mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi 2020. Di Konawe Selatan, perlambatan pertumbuhan ekonomi juga terjadi. Beberapa daerah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja perekonomian.

Ekonomi Indonesia 2020 tumbuh negatif (kuartal I 2020), pertumbuhan ekonomi masih tumbuh 2,97 persen (yoy), kuartal II berkontraksi hingga 5,32 persen (yoy) sehingga menyebabkan angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Dampak ekonomi tersebut tidak hanya dirasakan pada daerah perkotaan tapi daerah pedesaan juga mendapatkan dampak yang cukup signifikan. Berbagai kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah (pemerintah pusat dan daerah) diharapkan menjadi pendorong perekonomian agar dapat bergerak kearah yang lebih baik lagi.

Kebijakan pelonggaran aktivitas sosial dan ekonomi telah memberikan dampak yang cukup baik terhadap perekonomian nasional yang ditandai capaian

pertumbuhan ekonomi pada kuartal III yang mencapai minus 3,49 persen, atau terjadi pemulihan dibanding kuartal II. Sementara pada kuartal IV, ekonomi masih minus di kisaran minus 2,9 persen hingga minus 0,9 persen. Akibat dari pertumbuhan negatif maka permintaan konsumen terhadap barang jadi (daya beli) mengalami penurunan yang cukup tajam, hal tersebut terlihat dari rilis Bank Indonesia pada akhir tahun 2020 yaitu Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang menunjukkan optimisme dan pesimisme konsumen terhadap perekonomian. Pada Desember 2020, IKK keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi menguat, mendekati zona optimis. IKK meningkat dari 92 pada November 2020 menjadi 96,5 pada Desember 2020. Sejak April 2020, IKK berada di level pesimis. IKK terburuk terjadi pada Mei, pada angka 77,8, setelah itu merangkak naik hingga akhir tahun.

Implikasi pembatasan aktivitas ekonomi menyebabkan kemampuan daya beli masyarakat mengalami penurunan terutama kelompok pekerja yang berpendapatan harian serta para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Di tengah semua ketidakpastian, masyarakat yang berada pada kelompok pendapatan menengah ke atas merubah perilaku konsumsi yang diarahkan hanya pada pemenuhan kebutuhan pokok. Implikasi lain yang dari dampak Covid-19 adalah angka pengangguran mengalami peningkatan. Badan Pusat Statistik dalam Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020 menunjukkan, Covid-19 berimbas pada sektor ketenagakerjaan. Sebanyak 29,12 juta orang atau 14,28 persen dari 203,97 juta orang penduduk usia kerja terdampak pandemi. Jumlah pengangguran meningkat sejumlah 2,56 juta orang menjadi 9,77 juta orang. Jumlah pekerja formal turun 39,53 persen menjadi 50,77 juta orang dari total 128,45 juta penduduk yang bekerja. Sebaliknya, jumlah pekerja informal melonjak 60,47 persen menjadi 77,68 juta orang.

Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu kabupaten yang turut terdampak Covid-19. Sektor transportasi sebagai salah satu sektor pembentuk pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Pembatasan bepergian yang menggunakan moda transportasi udara termasuk di Bandara Halu Oleo menyebabkan *share* sektor transportasi terhadap perekonomian Kabupaten Konawe Selatan akan cenderung menurun. Penggunaan tenaga kerja juga tentu mengalami penurunan. Sektor utama lainnya pembentuk PDRB Konawe Selatan juga tertekan walaupun masih tumbuh positif antara lain sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan sektor pertambangan dan penggalian.

Kebijakan pemulihan ekonomi di Kabupaten Konawe Selatan akibat pandemi Covid-19 setidaknya difokuskan pada sektor-sektor yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian daerah. Data BPS Kab. Konawe Selatan Tahun 2020, menunjukkan bahwa terdapat tiga sektor utama yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yakni; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (26%), Pertambangan dan penggalian (21,9%) dan Transportasi dan Pergudangan (19,7%). Kebijakan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan setidaknya diarahkan pada sektor terdampak covid, mendorong pemulihan sektor perekonomian utama sekaligus mengurai masalah ketenagakerjaan (pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan).

b. Bonus Demografi

Disela kemajuan zaman dengan segala plus minusnya bagi generasi muda, saat ini, Indonesia dianugerahi “Bonus Demografi” yang harus mendapat perhatian serius. Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus tersebut di tahun 2020-2030 dimana penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Melimpahnya jumlah penduduk usia produktif tersebut akan berimplikasi pada dinamika kegiatan ekonomi terutama pada sektor-sektor yang menyerap lapangan kerja tertinggi sehingga dalam jangka panjang akan memacu pertumbuhan ekonomi. Bonus tersebut tentu mensyaratkan kualitas sumber daya manusia.

Bonus demografi bagi daerah membutuhkan arah kebijakan yang tepat agar manfaatnya dapat dinikmati bagi daerah. Berbagai kebijakan yang tepat diperlukan untuk menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk ke angkatan kerja; menjaga penurunan fertilitas; menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan tabungan serta dukungan sarana dan prasarana.

Terkait dengan hal tersebut, Kabupaten Konawe Selatan juga mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi. Penduduk usia produktif saat ini mendominasi total populasi penduduk di Kabupaten Konawe Selatan. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja tersebut selain meningkatkan angkatan kerja dalam daerah juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi daerah lain bahkan negara lain yang proporsi penduduk usia kerjanya

menurun. Kondisi ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan untuk menyiapkan kebijakan yang tepat bagi generasi mudanya untuk lebih mandiri, kreatif dan berjiwa wirausaha sehingga pada saatnya nanti generasi bonus demografi Kabupaten Konawe Selatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Konawe Selatan.

Akan tetapi, apabila tidak didukung dengan kebijakan yang tepat, bonus demografi tidak akan dapat diraih, bahkan dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan. Penduduk yang besar akan meningkatkan tekanan pada kebutuhan pangan dan energi serta kelestarian dan kualitas lingkungan. Jika tidak ada perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi terkait tahun “Bonus Demografi” tersebut maka pada tahun 2020-2030 Kabupaten Konawe Selatan akan diperhadapkan pada kelompok penduduk usia produktif yang tidak berkualitas dan bahkan berpotensi tidak terserap di lapangan kerja yang berkonsekuensi menjadi beban daerah. Daerah yang memiliki kelompok penduduk dengan usia produktif yang tidak bekerja/menganggur berpotensi menciptakan kerawanan ekonomi, sosial dan masalah keamanan.

c. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat secara resmi telah menetapkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015–2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) 2000–2015.

SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. Adapun SDGs tersebut memiliki 17 Tujuan dan 169 Target yang harus dicapai. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun [7 target]
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan [8 target]
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia [13 target]

4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang [10 target]
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan [9 target]
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang [8 target]
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang [5 target]
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang [11 target]
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi [8 target]
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara [10 target]
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan [10 target]
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan [11 target]
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya [5 target]
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan [10 target]
15. Melindungi, memperbaiki, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati [12 target]
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan [12 target]
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (*means of implementation*) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan [19 target]

Gambar 4.1. Tujuan SDGs



Terkait dengan pelaksanaan SDGs, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres SDGs). Oleh karena itu, dalam rangka pencapaian target SDGs kedepannya, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan melakukan adaptasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan untuk memasukkan agenda SDGs sebagai arah kebijakan pembangunan daerah kedepan.

Hasil identifikasi permasalahan akan memberikan data dan informasi sebagai bahan analisis permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Konawe Selatan. Analisis permasalahan berdasarkan pada hasil analisis kinerja capaian pembangunan. Adapun permasalahan pembangunan yang dihadapi pada masing-masing urusan di Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai berikut:

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan Pendidikan

- a. Belum optimalnya peningkatan kompetensi kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini terindikasi dari masih terdapatnya guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau D4.
- b. Menuntaskan wajib pendidikan dasar 9 tahun.
- c. Masih terdapat penduduk usia sekolah yang belum bersekolah.
- d. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar.
- e. Masih tingginya Angka Putus Sekolah (APS) Konawe Selatan.

- f. Masih rendahnya ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan.
- g. Pemerataan/distribusi tenaga guru belum merata sehingga terjadi kesenjangan mutu/kualitas antar sekolah dan daerah.
- h. Masih ada gedung sekolah yang bermasalah dengan aset atau permasalahan legalitas kepemilikan lahan dan gedung sekolah.
- i. Implementasi pengangkatan kepala sekolah dan mutasi guru belum mempunyai SOP yang baku.
- j. Masih adanya Sekolah Dasar yang belum memiliki gedung permanen.

Urusan Kesehatan

- a. Belum optimalnya program penanganan masalah Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang ditandai dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Konawe Selatan.
- b. Masih terdapat kasus gizi kurang, gizi buruk (*malnutrition*) dan stunting.
- c. Kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan rendah dan pemerataan/distribusi tenaga kesehatan belum proporsional.
- d. Belum memadainya tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis sehingga masih sangat tergantung dengan dokter dari Kota Kendari dengan sistem sewa jasa.
- e. Masih tingginya angka kesakitan pada penyakit menular dan ada kecenderungan meningkatnya angka kesakitan pada penyakit tidak menular.
- f. Sanitasi lingkungan permukiman masih buruk dan belum tertata dengan baik.
- g. Belum semua masyarakat Kabupaten Konawe Selatan mendapat jaminan kesehatan.

Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

- a. Banyak aktivitas pembangunan belum berbasis tata ruang.
- b. Masih sering terjadi konflik kepemilikan lahan antara masyarakat dan investor dan pemerintah serta investor dan investor.
- c. Masih terdapat lahan atau ruang yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- d. Masih terdapat kondisi jalan, jembatan, drainase dan irigasi yang belum mantap.
- e. Belum optimalnya pemenuhan air minum dan sanitasi serta ketersediaan fasilitas umum dalam mewujudkan Lingkungan yang Sehat dan Aman.
- f. Belum optimalnya penataan sungai, pantai dan talud.

Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

- a. Masih banyak rumah penduduk dengan Kondisi tidak Layak Huni.
- b. Masih Adanya Konflik Sengketa Lahan di Masyarakat
- c. Masih perlunya Pengukuran dan pemanfaatan Lahan yang pasti dan Fungsi Lahan tersebut.

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Belum optimalnya penegakan dan penanganan pelanggaran Perda/Perkada yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan penanganan pelanggaran Perda/Perkada yang belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Konawe Selatan, serta ketaatan atau kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah.
- b. Kurangnya kegiatan pengawasan/patrol yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan belum menjangkau seluruh wilayah Kab. Konawe Selatan.
- c. Terbatasnya jumlah personil/anggota Sat Pol PP sehingga pelayanan belum maksimal.
- d. Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum masyarakat terutama di daerah perbatasan atau pinggiran.

Urusan Sosial

- a. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- b. Belum maksimalnya penanganan korban bencana alam dan non alam.
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana tanggap darurat bencana.
- d. Masih terbatasnya jaminan sosial yang diberikan kepada penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia.
- e. Masih rendahnya kapasitas SDM Bidang Kesejahteraan Sosial.

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Tenaga Kerja

- a. Rendahnya pengetahuan dan kompetensi tenaga kerja lokal yang berimplikasi pada persaingan perekrutan tenaga kerja.
- b. Dampak Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terhadap penyerapan tenaga kerja lokal menjadi riskan.

- c. Belum maksimalnya mutu dan produktivitas tenaga kerja.
- d. Lahan transmigrasi sudah bersinggungan dengan pemanfaatan sektor lain.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Konawe Selatan belum mencapai target nasional.
- b. Isu gender hanya sebagai idiom semata.
- c. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d. Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) belum optimal.
- e. Minimnya akses dan kesempatan kerja bagi perempuan dalam meningkatkan perekonomian.

Urusan Ketahanan Pangan

- a. Belum optimalnya diversifikasi pola pangan harapan. Ketersediaan cadangan pangan masih riskan diakibatkan tata niaga yang sulit dikendalikan.
- b. Masih ada daerah rawan pangan.
- c. Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan masih belum seperti harapan.
- d. Sistem pengelolaan cadangan pangan belum berjalan dengan baik.

Urusan Pertanahan

- a. Masih banyak lahan/tanah pemerintah daerah Konawe Selatan yang belum memiliki legal formal/sertifikasi.
- b. Masih belum optimalnya penanganan sengketa tanah milik pemerintah daerah Konawe Selatan dengan masyarakat.

Urusan Kebencanaan

Belum terbangunnya sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Konawe Selatan yang didukung oleh regulasi, kebijakan serta perencanaan dan penganggaran Penanggulangan Bencana yang memadai.

Urusan Lingkungan Hidup

- a. Konversi lahan hutan ke lahan pertanian dan lahan terbuka menyebabkan menurunnya fungsi imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama atau daerah aliran sungai.
- b. Konversi lahan pertanian ke lahan terbangun menyebabkan menurunnya luas lahan pertanian yang berpotensi pada menurunnya tingkat produksi pertanian.
- c. Menurunnya daya tampung dan daya dukung Lingkungan.
- d. Masih kurangnya RTH pada kawasan perkotaan di Kabupaten Konawe Selatan.
- e. Meningkatnya kuantitas sampah domestik menyebabkan rawan terjadinya penumpukan sampah secara tidak terkendali.
- f. Masih lemahnya pengawasan, penataan dan pengelolaan terhadap usaha/ kegiatan yang memiliki dampak terhadap kerusakan lingkungan.
- g. Sumber Air Minum dan Air Pertanian mulai terdegradasi.
- h. Belum optimalnya pengelolaan daerah sumber air dan daerah penyangga.
- i. Perlunya kerjasama daerah dalam rangka pengelolaan persampahan dalam skala regional.

Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur pengelola SIAK yang tidak merata.
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk kepemilikan kelengkapan dokumen kependudukan (KK, KTP dan Akta Catatan Sipil)
- c. Database kependudukan sebagai dasar berbagai penyelenggaraan pemerintahan masih perlu ditingkatkan keakuratan dan validitas datanya.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Belum optimalnya sinkronisasi di tingkat perencanaan antara RPJMD kabupaten dan RPJMDes.
- b. Masih terdapat status Desa Tertinggal.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

- d. Belum terwujudnya secara optimal pembangunan desa terpadu melalui pengembangan desa mandiri, peningkatan kualitas kelembagaan dan kualitas aparatur desa.
- e. Belum optimalnya lembaga keuangan mikro di desa (BUMDES dan KUD) yang belum berperan aktif dan dalam memberikan kontribusi positif dalam penyediaan serta memfasilitasi modal usaha di desa.
- f. Belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) desa sesuai dengan Permendagri Nomor 2 tahun 2017 tentang SPM Desa.
- g. Belum tercapainya Standarisasi Operasional Prosedur pemerintahan desa yang efektif dan efisien (Jumlah SOP masih kurang),
- h. Belum menerapkan sistem informasi pemerintahan desa yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- i. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat masih rendah.
- j. Komitmen dan tanggung jawab masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian pasca program masih rendah.

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Belum maksimalnya cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Konawe Selatan.
- b. Belum optimalnya pengadaan alat kontrasepsi yang diadakan oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah perlu melakukan pendampingan pengadaan alat kontrasepsi.

Urusan Perhubungan

- a. Moda transportasi umum dalam daerah belum dikelola dengan baik.
- b. Terminal yang dibangun belum berfungsi sesuai yang diharapkan.
- c. Kualitas jalan kewenangan kabupaten masih sangat rendah.
- d. Masih kurang jalan alternatif sebagai penghubung antar wilayah dan kawasan

Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Cakupan jaringan telekomunikasi di pedesaan belum memadai.
- b. Belum optimalnya jaringan komunikasi antar perangkat daerah dan

pengembangan website pemerintah daerah kabupaten Konawe Selatan.

- c. Belum optimalnya sumber daya aparatur penyelenggara informasi dan komunikasi.
- d. Belum optimalnya pembentukan dan pengembangan jaringan kerjasama informasi dan komunikasi untuk mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat.
- e. Jaringan komunikasi masih mengandalkan satelit.

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Koperasi dan lembaga UMKM masih tergantung dengan bantuan pemerintah.
- b. Belum optimalnya peningkatan kualitas kewirausahaan (*entrepreneurship*) masyarakat pengusaha kecil, mikro dan menengah
- c. Akses pasar produk UKM belum ada
- d. Kualitas SDM pengelola UKM masih rendah
- e. Akses permodalan untuk UKM masih kurang.
- f. Rendahnya kesadaran UKM untuk mengurus izin usaha (berbadan hukum)
- g. Proporsi koperasi sehat masih sangat rendah.
- h. Pembinaan ekonomi kreatif masih perlu dilakukan.

Urusan Penanaman Modal

- a. Rendahnya realisasi investasi di daerah yang diakibatkan belum optimalnya promosi dan daya tarik investasi serta kerjasama investasi.
- b. Belum tersedianya data dan informasi investasi yang diwujudkan dalam peta potensi investasi di Konawe Selatan.
- c. Belum optimalnya pelayanan perizinan usaha, dukungan regulasi dan kepastian hukum.
- d. Dukungan infrastruktur untuk mendukung investasi daerah masih minim (jaringan jalan, jembatan, listrik, komunikasi, perbankan, dll).
- e. Pengembangan investasi kurang memperhatikan daya dukung lingkungan.
- f. Nilai manfaat pengembangan investasi terhadap masyarakat masih rendah.
- g. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan sumberdaya lokal dalam upaya peningkatan daya saing daerah dan investasi daerah belum berjalan optimal.

Urusan Pemuda dan Olahraga

- a. Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.
- b. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara berjenjang.
- c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi.
- d. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga.

Urusan Kebudayaan

- a. Kegiatan kebudayaan daerah belum mendapat penanganan yang serius.
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan festival seni dan budaya di kabupaten Konawe Selatan.
- c. Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya daerah menjadi objek wisata.
- d. Pelestarian cagar budaya daerah belum dilakukan secara optimal.
- e. Menurunnya minat generasi muda dalam melestarikan seni dan budaya lokal.

Urusan Perpustakaan

- a. Sumber daya manusia pengelolaan perpustakaan yang masih rendah secara kualitas dan kuantitas
- b. Belum tersedianya *Electronic Library*.
- c. Masih rendahnya minat baca masyarakat, dilihat dari jumlah pengunjung tidak sebanding dengan jumlah penduduk kabupaten Konawe Selatan.
- d. Belum optimalnya sarana dan prasarana perpustakaan daerah.
- e. Masih kurangnya layanan perpustakaan keliling yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten Konawe Selatan.

4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Dukungan infrastruktur pada sentra perikanan masih kurang.
- b. Dukungan listrik pada sentra perikanan masih kurang.
- c. Belum optimalnya budidaya perikanan air Laut dan air tawar.

- d. Belum adanya industri pengolahan perikanan yang representatif.
- e. Kurangnya sarana perikanan tangkap.
- f. Usaha pengolahan hasil perikanan skala rumah tangga masih kurang.

Urusan Pariwisata

- a. Potensi cukup besar tapi belum menjadi prioritas utama pembangunan.
- b. Kurangnya promosi destinasi wisata daerah.
- c. Belum optimalnya produk unggulan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) daerah yang menjadi ciri khas Konawe Selatan (cinderamata, minuman khas, makanan khas).
- d. Masih rendahnya infrastruktur penunjang pada objek wisata dan menuju tempat wisata.

Urusan Pertanian

- a. Masih terdapat alih fungsi lahan pertanian.
- b. Agribisnis pertanian yang di dukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pola pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan masih kurang optimal;
- c. Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang;
- d. Produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam rangka berkontribusi pada pencapaian swasembada nasional belum mengalami peningkatan yang signifikan
- e. Sumber daya air pertanian makin kurang akibat rusaknya dan alih fungsi lahan kawasan penangkapan air dan daerah aliran sungai.
- f. Masih terbatasnya penangkaran benih tanaman pangan dan hortikultura, sehingga pada saat tanam petani kesulitan benih.
- g. Sering terjadinya kelangkaan pupuk di sentra-sentra pertanian.
- h. Masih terbatasnya fasilitas untuk Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugasnya.
- i. Jaringan irigasi tersier sudah banyak yang rusak.
- j. Masih banyaknya Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi yang belum tertangani.

Urusan Perdagangan

- a. Akses pasar komoditas unggulan masih rendah.
- b. Masih menjual bahan mentah.
- c. Peran tengkulak masih cukup tinggi.
- d. Pemanfaatan sarana dan prasarana pasar masih belum optimal.
- e. Pengelolaan pasar masih belum optimal.
- f. Pembangunan infrastruktur pasar yang belum merata.

Urusan Perindustrian

- a. Belum optimalnya pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Daerah.
- b. Daya saing produk UMKM lokal belum baik dan kuat.
- c. Infrastruktur pada sentra-sentra belum baik.
- d. Penggunaan teknologi tepat guna belum optimal.
- e. Sumber energi untuk industri rumah tangga masih kurang.

Urusan Transmigrasi

- a. Belum optimalnya pemerintah daerah dalam penanganan sengketa lahan transmigrasi dan eks transmigrasi.
- b. Masih terdapat fasilitas infrastruktur daerah transmigrasi yang belum maksimal.

4.1.4. Urusan Penunjang Pemerintahan

Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang menjawab permasalahan sektoral pada pembangunan daerah.
- b. Belum optimalnya harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan antar perangkat daerah.
- c. Belum optimalnya implementasi perencanaan berbasis partisipatif dalam menjawab isu dan tantangan pembangunan daerah.
- d. Belum optimalnya implementasi perencanaan pembangunan daerah yang berkesesuaian dengan hasil reses/aspirasi masyarakat.

Urusan Pengawasan

- a. Masih tingginya temuan pemeriksaan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- b. Masih terdapat temuan pemeriksaan oleh BPK.
- c. Masih kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- d. Masih kurangnya ketersediaan tenaga pemeriksa yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan.
- e. Masih kurangnya kuantitas APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah).
- f. Belum tersedianya SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) yang terintegrasi antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Urusan Keuangan

- a. Belum optimalnya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Terbatasnya kapasitas riil keuangan daerah kabupaten Konawe Selatan dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah.

Urusan Kepegawaian

- a. Belum optimalnya kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Konawe Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan.
- b. Belum meratanya jumlah dan sebaran birokrasi yang profesional berbasis pada kompetensi dan kinerja.
- c. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah belum berjalan secara optimal.
- d. Masih kurangnya keterlibatan perempuan yang menduduki jabatan strategis dalam birokrasi.
- e. Fasilitas penunjang pendukung tupoksi aparatur masih terbatas.
- f. Pemberian reward dan punishment belum diterapkan secara optimal.

Urusan Sekretariat Daerah

- a. Belum maksimalnya keterbukaan informasi publik
- b. Belum maksimalnya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis data secara online
- c. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), baik pelayanan kepada masyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- d. Belum dilaksanakannya Evaluasi/Survey Kepuasan Masyarakat terhadap unit kerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan.
- e. Belum optimalnya upaya penguatan satuan kerja yang mendukung dan menunjang keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan.

4.2 Isu Strategis

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu strategis merupakan hasil analisis dari FGD (*Focus Group Discussion*) dengan seluruh OPD dan bagian-bagian yang ada dalam Sekretariat Daerah. Disamping itu, isu strategis tersebut merujuk pada (*Sustainable Development Goals/SDGs* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Adapun isu strategis pembangunan Kabupaten Konawe Selatan yang disimpulkan dari hasil analisis tersebut yakni;

4.2.1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu yang memerlukan penanganan multi sektor. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Konawe Selatan masih menjadi isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pembangunan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Konawe Selatan dalam kurun waktu 7 tahun terakhir menunjukkan *tren* penurunan yang cukup baik, dari data yang diperoleh antara tahun 2013 sampai tahun 2017 terus mengalami penurunan yaitu 12,45 % atau 35.170 jiwa pada tahun 2013 dan terus mengalami penurunan sebesar 11,14 % atau 33.730 jiwa pada tahun 2017. Pada tahun 2018 terus mengalami penurunan sebesar 33,73 jiwa atau 10,95 % dan tahun 2019 secara persentase terus mengalami penurunan 33,89 jiwa atau 10,81%. Angka tersebut lebih baik dibanding dengan kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara (11,69 persen). (BPS Sulawesi Tenggara, 2020). Namun demikian, tahun 2021 tingkat kemiskinan di Kabupaten Konawe Selatan berpotensi mengalami peningkatan akibat pandemi Covid-19.

Salah satu problem dalam penanganan kemiskinan adalah kemampuan pemerintah daerah mempertahankan penurunan persentase kemiskinan secara konsisten yang diakibatkan ragam kriteria dan penyebab kemiskinan. Rendahnya persentase kemiskinan juga menjadi tantangan pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan secara detail penduduk yang mengalami kondisi miskin tersebut. Beragam indikator tentu juga membutuhkan intervensi yang berbeda pula dalam penanganan penduduk miskin.

Oleh karena itu, data penduduk miskin memerlukan *updating* secara rutin dengan melibatkan pemerintah hingga di level desa serta penduduk setempat untuk memastikan validitas data, baik ditinjau dari jenisnya ataupun ditinjau dari penyebabnya. Selain itu, perlunya arah kebijakan pembangunan daerah tidak bias terhadap penyelesaian akar masalah kemiskinan, adanya kebijakan yang mampu menciptakan distribusi hasil pembangunan yang merata di semua kelompok masyarakat, menciptakan pemerataan kesempatan bekerja maupun pemerataan kesempatan berusaha. Karenanya kebijakan pembangunan yang partisipatif dan akomodatif serta memberikan keberpihakan terhadap penduduk miskin pada akhirnya akan mendorong perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan.

Meskipun kondisi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Konawe Selatan yang cenderung mengalami penurunan, hal ini mengharuskan adanya upaya dan aksi nyata dari Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam melakukan penanggulangan kemiskinan dengan kerja keras serta keseriusan dari seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Pusat, Daerah maupun seluruh komponen (Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, LSM dan lain-lain). Belum optimalnya penurunan angka kemiskinan di Indonesia termasuk di Kabupaten Konawe Selatan, salah satu faktornya dikarenakan belum optimalnya komitmen, konsistensi dan keterpaduan (harmonisasi) dalam menangani masalah kemiskinan. Ego sektoral pada bidang dan urusan tertentu masih mewarnai dalam penetapan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

4.2.2. Ketahanan Pangan

Kebutuhan pangan senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Disisi pemenuhannya, tidak semua kebutuhan pangan dapat dipenuhi, karena kapasitas produksi dan distribusi pangan semakin terbatas. Hal ini dapat berimplikasi pada ketidakstabilan pangan antara kebutuhan dan

pemenuhannya. Permasalahan secara umum mengenai ketahanan pangan adalah jumlah penduduk yang semakin besar dengan pertumbuhan penduduk yang positif. Dengan demikian permintaan akan pangan semakin meningkat. Peningkatan permintaan pangan juga didorong oleh peningkatan pendapatan, kesadaran akan kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi, serta ragam aktivitas masyarakat. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya lahan semakin berkurang, karena tekanan penduduk, serta persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pangan dengan sektor non pangan.

Potensi pangan di Kabupaten Konawe Selatan meliputi; luas lahan persawahan mencapai 25.340 Ha dengan luas panen sebesar 39.854 Ha dan produktivitas sebesar 36,67 kuintal/Ha. Potensi ternak besar seperti sapi sebesar 67.746 ekor, ternak kerbau sebesar 369 ekor. Untuk ternak kecil seperti kambing sebesar 10.467 ekor dan babi sebesar 4.942 ekor. Sedangkan unggas seperti ayam sebesar 1.423.678 ekor. Potensi perikanan meliputi perikanan laut produksi sebesar 3.900 ton dan produksi ikan darat sebesar 8.440 ton (BPS Konawe Selatan, 2021).

Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Selatan mencapai 81,82, sedangkan Indeks Ketersediaan Pangan 91,81 tahun 2020. Adapun Indeks Keterjangkauan Pangan sebesar 86,36 dan Indeks Pemanfaatan Pangan sebesar 70,91 pada tahun 2020 (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2020). Secara umum permasalahan ketahanan pangan dan pertanian di kabupaten Konawe Selatan antara lain disebabkan oleh *pertama*, jumlah penduduk yang terus bertambah dari tahun ke tahun menyebabkan tingginya tingkat kebutuhan atau permintaan akan pangan saat ini jumlah penduduk Konawe Selatan sebesar 304.214 jiwa. *Kedua*, sumber daya air pertanian makin kurang akibat rusaknya daerah sumber air. *Ketiga*, ketersediaan sumber daya lahan semakin berkurang akibat tekanan penduduk serta persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pangan dengan sektor non pangan. Penggunaan lahan yang paling luas di Konawe Selatan yaitu sebagai pekarangan/tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya sebesar 34,59% dari total luas lahan di Konawe Selatan. *Keempat*, alih fungsi lahan kawasan penangkapan air dan daerah aliran sungai serta lahan perkebunan serta *kelima* sistem pengelolaan cadangan pangan belum berjalan dengan baik.

4.2.3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah secara bersungguh-sungguh dan terus menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan baik yang bersifat promosi, preventif, kuratif dan rehabilitatif di seluruh jenjang fasilitas pelayanan kesehatan.

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Konawe Selatan sebagai bagian terpadu dari pembangunan daerah dimana, Kabupaten Konawe Selatan bertujuan mewujudkan masyarakat maju, damai dan sejahtera. Perwujudan derajat kesehatan yang optimal dalam tujuan pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang khususnya masyarakat Kabupaten Konawe Selatan, maka telah dilaksanakan upaya kesehatan dengan paradigma baru yaitu paradigma sehat melalui visi pembangunan kesehatan yaitu Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) 2016 terutama penyakit menular yang ada kaitannya dengan lingkungan (penyakit berbasis lingkungan), yang mana ditandai dengan lingkungan dengan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal.

Permasalahan dibidang kesehatan yang menjadi isu dan masalah pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan adalah masih terdapatnya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan pada tahun 2017 yaitu 7 kasus atau 125 per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2017 sebesar 15 kasus atau 3 per 1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita (AKABA) pada tahun yang sama yaitu 3 per 1000 kelahiran hidup. Selain itu masih terdapat prevalensi kasus Gizi Buruk (*Malnutrition*) dan stunting pada tahun 2017 sebesar 17 kasus.

Disamping itu isu lainnya adalah masih rendahnya mutu pelayanan kesehatan, ketersediaan fasilitas baik sarana maupun prasarana kesehatan yang belum memadai, serta sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang masih relatif terbatas dan tidak merata di semua wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Upaya untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan dilakukan melalui peningkatan atau pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas dan mutu sumber daya manusia kesehatan. Hal yang tidak kalah

pentingnya juga adalah perlunya pemerintah daerah memastikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin maupun perlindungan social lainnya guna mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*.

4.2.4. Pendidikan Berkualitas

Pendidikan sebagai modal dan investasi yang bersifat jangka panjang yang tentu memberikan dampak positif bagi pembangunan suatu daerah di masa mendatang. Salah satu upaya pemerintah menciptakan pendidikan yang berkualitas melalui adanya Program wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang merupakan tanggungjawab bersama pemerintah pusat maupun daerah. Rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah merupakan indikator yang dapat menggambarkan kualitas Pendidikan di suatu daerah. Tahun 2020 rata-rata lama sekolah Kabupaten Konawe Selatan yakni 7,86 tahun yang artinya jumlah penduduk Konawe Selatan yang berumur 25 tahun ke atas rata-rata menjalani pendidikan formal selama 7,86 tahun. Permasalahan mutu pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan tidak terlepas dari kondisi kualitas sarana dan prasarana pendidikan maupun akses/keterjangkauan yang berbeda-beda antar kecamatan. Terdapat beberapa kecamatan yang berstatus terpencil dan sangat terpencil yang berimplikasi pada ketersediaan (kuantitas dan kualitas) sarana dan prasarana yang tidak memadai serta dukungan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang belum merata pula.

Disamping itu, problem lainnya adalah belum optimalnya peningkatan kompetensi kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang terlihat dari masih terdapat guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau D4. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan (2020) diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konawe Selatan yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan strata satu (S-1) yaitu sebanyak 1.810 orang (67.8 %) serta 129 orang (4.8 %) telah berkualifikasi strata dua (S-2 Magister) dari total tenaga Aparatur Sipil Negara dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 2.668 orang. Sedangkan tenaga Aparatur Sipil Negara dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah tersertifikasi sebanyak 1.565 orang di seluruh tingkatan satuan pendidikan.

Oleh karena itu, peningkatan mutu dan akses pendidikan perlu dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta meningkatkan manajemen pendidikan yang merata di semua wilayah kecamatan, terutama pada daerah-daerah terpencil yang ada di Konawe Selatan.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Data menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 yaitu 67.88. Nilai IPM yang bernilai sedang ini masih berada dibawah angka IPM provinsi Sulawesi Tenggara yaitu sebesar 71,20.

Capaian IPM di Kabupaten Konawe Selatan dipengaruhi oleh beberapa komponen yaitu dari aspek kesehatan yakni angka harapan hidup yang masih rendah; aspek pendidikan yakni Rata-rata Lama Sekolah; dan aspek ekonomi (pengeluaran per kapita dan paritas daya beli). Capaian kualitas IPM tersebut juga belum diimbangi perbaikan kualitas pembangunan SDM yang lainnya yakni capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender.

4.2.5. Kesetaraan Gender

Ideologi patriarki yang dianut oleh sebagian besar masyarakat dunia sejak dulu telah membatasi gerak kaum perempuan khususnya di ruang publik. Ideologi ini merupakan akar masalah yang menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan, dan kemudian muncul ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Hal ini termanifestasikan dalam bentuk *stereotip*, marginalisasi, subordinasi, tindak kekerasan dan beban kerja terhadap perempuan. Secara nasional isu pembangunan gender di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender baik di level pusat maupun daerah.

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Konawe Selatan dibandingkan dengan capaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) juga cenderung belum membaik. Faktor utama yang menyebabkan masih rendahnya IPG dan IDG Kabupaten Konawe Selatan adalah masih rendahnya kontribusi pendapatan perempuan dalam keluarga serta masih kurangnya peran aktif perempuan dalam lingkup birokrasi, kehidupan ekonomi maupun politik. Belum optimalnya pembangunan gender di Kabupaten Konawe Selatan ditunjukkan dengan masih rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2015 yaitu 88,46 dan masih berada dibawah angka provinsi yaitu 90,30 dan

berada pada urutan ke 10 dari 17 kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Rendahnya angka IPG Kabupaten Konawe Selatan dipengaruhi oleh faktor rendahnya Angka Harapan Hidup berjenis kelamin laki-laki jika dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup berjenis kelamin perempuan. Sedangkan nilai IDG Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2015 yaitu 78,80 dan berada diatas angka capaian Provinsi Sulawesi Tenggara.

4.2.6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Di Bidang infrastruktur pengairan, pembangunan diarahkan kepada upaya pemenuhan ketersediaan air baku masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, pemenuhan ketersediaan air irigasi untuk pertanian serta upaya penanggulangan bahaya banjir dan abrasi kawasan pantai. Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut di atas, diantaranya melalui pembangunan sarana pengelolaan air minum, sanitasi, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, rehabilitasi/normalisasi sungai. Pembangunan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat bidang air minum, sanitasi dan air limbah, juga diarahkan untuk mendukung program pemerintah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan target sasaran pada tahun 2024 yaitu 90% rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak termasuk 15% akses aman; dan 100% rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak termasuk 15% akses aman. Dari data yang diperoleh pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan (2020) diketahui bahwa untuk persentase penduduk berakses air minum menunjukkan peningkatan, dimana sebanyak 90 % pada tahun 2020 meningkat dari tahun 2019 yang capaiannya masih 78,07%. Hal ini semua terjadi karena adanya peningkatan pembangunan infrastruktur secara kolaboratif baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bidang sanitasi dan air minum pada kurun waktu tersebut.

4.2.7. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan tren penurunan selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2015-2019). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2015 sebesar 8,13 %, trend menurun terlihat pada tahun 2016 yaitu sebesar 6,95 %, tahun 2017 yaitu sebesar 6,69 %, tahun 2018 sebesar 5,67 %, dan tahun 2019 sebesar 5,71 %. (BPS Konawe Selatan, 2021). Penurunan pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap kemampuan daya saing daerah. Dari 17 sektor ekonomi/lapangan usaha, kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Selatan antara lain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 26,68 %, serta sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 22,33 %. Sedangkan sektor yang memiliki kontribusi terendah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Selatan adalah sektor Jasa perusahaan yaitu hanya sebesar 0,01 %.

Jika dilihat dari sisi pengeluaran agregat, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Konawe Selatan pada tahun 2017 yang mencapai 55,14 %. *Share* pengeluaran investasi sebagai salah satu komponen yang memiliki dampak ganda terhadap perekonomian daerah justru masih rendah. Salah satu faktor utama pemicu masih investasi di Kabupaten Konawe Selatan disebabkan oleh aspek regulasi diantaranya belum tersedia rencana detail tata ruang untuk keseluruhan wilayah Kabupaten Konawe Selatan yang mengakibatkan tumpang tindih lokasi. Hal lain, pad aspek pemantauan lingkungan hidup terhadap kegiatan investasi yang ada saat ini belum dilakukan secara optimal. Demikian pula belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan investasi sehingga turut menghambat rendahnya daya tarik investasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengurangi hambatan regulasi disertai dengan upaya promosi investasi yang kontinu sehingga mendorong tumbuhnya kegiatan investasi di Kabupaten Konawe Selatan pada masa yang akan datang.

4.2.8. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur sangat berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Daerah dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai akan menciptakan dinamika aktivitas perekonomian sehingga berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Program pembangunan

infrastruktur di beberapa daerah pada umumnya ditargetkan dalam jangka menengah dan jangka Panjang dengan fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan wilayah diantaranya energi, air bersih, jaringan informasi dan telekomunikasi (IT), transportasi, irigasi, jembatan, pasar, rumah sakit, puskesmas, sekolah maupun fasilitas publik lainnya.

Salah satu permasalahan utama yang ada di Kabupaten Konawe Selatan adalah belum optimalnya kondisi mantap jalan, jembatan, drainase, maupun infrastruktur kesehatan dan ekonomi lainnya. Selain itu, keberadaan industri yang berbasis IKM diperhadapkan dengan daya saing yang rendah. Aspek inovasi yang dapat mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi kreatif juga belum optimal.

Infrastruktur jalan di Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2019 mencapai 1.032,04 Km dalam kondisi mantap jalan dengan persentase jalan yang sudah diaspal baru mencapai 155.04 Km, jalan beton sepanjang 2,6 Km, jalan kerikil sepanjang 874,36 Km, serta jalan dalam kondisi baik sepanjang 124,87 Km. Karenanya pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum memerlukan perencanaan yang responsif dan terarah karenanya implikasinya cukup luas terhadap perekonomian Kabupaten Konawe Selatan.

4.2.9. Berkurangnya Kesenjangan

Penurunan pertumbuhan ekonomi juga akan berimplikasi terhadap rendahnya daya saing serta melemahnya berbagai kinerja makro ekonomi daerah lainnya. Demikian pula akan menurunkan kegiatan di sektor konsumsi dan daya beli masyarakat Konawe Selatan. Dari 17 lapangan usaha/sektor ekonomi, persentase terbesar yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe Selatan adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 26.68 %, serta sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 22,33 %. Adapun sektor terendah yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Selatan adalah sektor jasa perusahaan yaitu hanya sebesar 0,01 %. Dari sisi pengeluaran, sektor pengeluaran konsumsi rumah tangga berkontribusi paling tinggi hingga tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan konsumsi rumah tangga memiliki peran penting dalam mendinamisir perekonomian Kabupaten Konawe Selatan.

4.2.10. Penanganan Perubahan Iklim dan Lingkungan

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Faktor penting untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah dan juga masyarakat dan swasta melalui sinergi bersama guna peningkatan kualitas lingkungan, pencegahan pencemaran dan peningkatan daya dukung lingkungan.

Penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Konawe Selatan ditandai dengan banyaknya degradasi hutan serta menurunnya kualitas sumber daya air, masih banyaknya lahan yang berpotensi kritis dan meningkatnya volume sampah akibat semakin meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Konawe Selatan.

Alih fungsi lahan merupakan salah satu permasalahan di Kabupaten Konawe Selatan yang perlu mendapat perhatian dan penanganannya memerlukan perencanaan yang matang. Alih fungsi lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Saat ini luas lahan pertanian produktif di Kabupaten Konawe Selatan yaitu lahan persawahan sebesar 5.61 %, lahan perkebunan sebesar 6.29 %, lahan tanaman kayu/hutan rakyat sebesar 4.82 %, lahan perkebunan sebesar 20.01 %, lahan tambak/kolam ikan sebesar 19.84 %, lahan ladang sebesar 4.41%, padang rumput sebesar 1.73 %, lahan tidur sebesar 2.69 % dan lahan pekarangan untuk bangunan sebesar 34.59 %. Selain itu pula, masih terjadi pemanfaatan ruang secara ilegal yang mengganggu kenyamanan dan kualitas lingkungan hidup, hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat kesesuaian penggunaan pola ruang yang tidak sesuai dengan tata ruang Kabupaten Konawe Selatan.

4.2.11. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sekarang ini sedang diperhadapkan pada satu agenda besar, khususnya untuk waktu lima tahun yang akan datang. Agenda besar tersebut terkait dengan, *Pertama*, posisi daya saing dan kemajuan yang telah dicapai selama ini. Beberapa hal yang kemudian harus terus diperkuat adalah penguatan regulasi dan kebijakan yang selama ini sudah menunjukkan keberpihakan pada publik. *Kedua*, adalah terkait dengan upaya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan. Kondisi saat

ini Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan perubahan-perubahan yang sangat mendasar terkait dengan birokrasi dan tata kelola pelayanan publik.

Namun demikian, belum optimalnya pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Konawe Selatan masih merupakan masalah pembangunan. Upaya untuk melakukan peningkatan pelayanan publik dilakukan dengan usaha-usaha perbaikan *service delivery*, maupun *manufacturing* secara internal OPD. Sedangkan peningkatan tata kelola pemerintahan dilakukan dengan efektifitas pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unsur manajemen pemerintahan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, berjanji kepada masyarakat dan berkomitmen untuk menjalankan pembangunan dengan visi tertentu. Selain berfungsi sebagai penuntun arah, visi juga diarahkan untuk menjawab permasalahan pembangunan serta isu strategis daerah. Bupati terpilih **H. Surunuddin Dangga, ST., MM** dan Wakil Bupati terpilih **Rasyid, S.Sos., M.Si** yang dilantik pada Tanggal 26 April Tahun 2021, Di masa pembangunan tahun 2021-2026, Memiliki Visi “**Menuju Konawe Selatan yang Sejahtera, Unggul dan Amanah Berbasis Perdesaan**”. Dari kalimat yang lugas dan bernas ini, sedikitnya ada empat kata kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sejahtera** : Merujuk pada terpenuhinya sebagian besar kebutuhan dan hajat hidup masyarakat, serta tercapainya keadaan hidup yang lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya dengan mengoptimalkan sumber daya alam, sumberdaya manusia serta sumberdaya pengetahuan.
- Unggul** : Bermakna masyarakat memiliki prestasi dan daya saing dalam segala aspek kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
- Amanah** : Untuk mencapai kesejahteraan dan daya saing masyarakat, pemerintah menjalankan segala urusan terkait kepentingan publik secara terbuka dan bertanggung jawab (akuntabel).
- Berbasis Perdesaan** : Konawe Selatan memiliki ciri daerah pemukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air. Hal ini menjadikan desa agraris maupun pesisir sebagai prioritas pembangunan.

5.2. Misi

Misi Kabupaten Konawe Selatan 2021-2026 dirancang untuk memperjelas dan mencapai visi tersebut, dirumuskan empat misi yang ikut mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Empat misi yang saling menopang dalam rangka pencapaian dimensi sejahtera, unggul dan amanah yang mengambil perdesaan sebagai basis pembangunan ini akan menjadi pilar dalam pengembangan arah kebijakan umum pembangunan daerah dan rencana capaian pembangunan lima tahunan yang disinergikan dengan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Konawe Selatan. Pendekatan pencapaian misi kerja dilaksanakan dengan mengintegrasikan pembangunan sektoral dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan terutama untuk mengarahkan sumber daya pembangunan secara tepat dan bernilai guna.

Pada misi pertama, **Melanjutkan Pengembangan SDM** berfokus pada pengembangan kompetensi dan keterampilan bagi guru, tenaga kesehatan, pekerja kreatif, aparat desa, pengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan petani milenial serta komunitas produktif. Di misi kedua, ditujukan pada **Penguatan dan Pengembangan Perekonomian Berbasis Perdesaan yang Inklusif dan Berkelanjutan**. Untuk misi ketiga, **Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah** yang difokuskan pada penataan birokrasi yang kredibel, berorientasi pada kinerja serta fungsi, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan daerah yang transparan dan terbuka. Sementara di misi keempat, **Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Wilayah untuk Menopang Konektivitas** yang tertuju pada pengembangan infrastruktur dasar, pembangunan sarana dan prasarana penopang keterhubungan wilayah, sanitasi, sarana pendidikan, kesehatan, dan perekonomian warga.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan misi, Permendagri No 86 tahun 2017 mewajibkan ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Adapun sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi dalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Konawe Selatan 2021-2026 terdiri dari 4 misi, 5 tujuan dan 17 sasaran. Misi (1); Melanjutkan pembangunan sumberdaya manusia dijabarkan kedalam tujuan 1 dan sasaran 1-7. Misi (2); Penguatan dan pengembangan perekonomian berbasis pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan yang dijabarkan kedalam tujuan 2 dan sasaran 8-11. Misi (3); Penguatan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah dijabarkan kedalam tujuan 3 dan tujuan 5 serta sasaran 12-15. Misi (4); Pengembangan infrastruktur dasar dan wilayah untuk menopang konektivitas dijabarkan kedalam tujuan 5 dan sasaran 16-17. Berangkat dari tuntutan tersebut, berikut ini matriks yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan Konawe Selatan.

Tabel 5.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Konawe Selatan Tahun 2021-2026

Misi 1: Melanjutkan pembangunan sumber daya manusia.

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	CAPAIAN/TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Tujuan 1 Meningkatkan kualitas hidup manusia.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	68,2	69,7	69,7	70,1	71,5	72,3	72,8
1.1	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat)	Persen	76,19	76,7	76,7	77,2	77,9	78,6	78,9
1.2	Sasaran2 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,86	7,90	7,90	8,10	8,5	8,7	9,10
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,36	12,7	12,7	13,5	13,9	14,4	14,7
1.3	Sasaran 3 Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	93,5	93,9	93,9	94,5	94,8	95,3	96,2
1.4	Sasaran 4 Meningkatnya standar hidup layak	Tingkat Kemiskinan	Persen	10,74	10,6	10,6	10,3	9,9	9,5	9,1
1.5	Sasaran 5 Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Demokrasi / Tingkat Partisipasi Politik	Nilai / Persen	83,5	84,7	84,7	85,5	86,7	88,5	88,9
1.6	Sasaran 6 Meningkatnya kesetaraan gender	Indek Pembangunan Gender	Nilai	87,73	88,6	88,6	89,3	90,2	91,7	92,3
1.7	Sasaran 7 Terpeliharanya kualitas lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	n/a	68,07	68,07	68,36	68,65	68,94	69,2

Misi 2. Penguatan dan pengembangan perekonomian berbasis perdesaan yang inklusif dan berkelanjutan.

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	CAPAIAN/TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Tujuan 2 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-2,2	-0,97	3,6	5,4	5,7	5,8	6,2
1.1	Sasaran 8 Meningkatnya nilai tambah sektor ekonomi utama	PDRB Sektoral	Persen	50,15	50,3	52,8	56,9	57,4	57,9	58,5
1.2	Sasaran 9 Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	26,83	26,9	27,3	28,3	28,6	28,9	29,3
1.3	Sasaran 10 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,58	2,59	2,44	2,38	2,33	2,30	2,27
1.4	Sasaran 11 Meningkatnya pemerataan pendapatan antarkelompok masyarakat	Gini Ratio	Nilai	0,344	0,34	0,32	0,31	0,29	0,28	0,28

Misi 3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	CAPAIAN/TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Tujuan 3 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	CC	CC	CC	B	B	B	BB
1.1	Sasaran 12 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	62,54 (B)	B	B	B	BB	BB	A
1.2	Sasaran 13 Meningkatnya kualitas kebijakan Pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	A (81,92)	A	A	A	A	A	A
2	Tujuan 4 Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	Nilai	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.1	Sasaran 14 Meningkatnya Kapasitas Fiskal	Indeks Kapasitas Fiskal	Nilai	0,677 (Rendah)	0,747 (Sedang)	0,747 (Sedang)	1,168 (Sedang)	1,755 (Tinggi)	1,955 (Tinggi)	2,115 (Tinggi)
2.2	Sasaran 15 Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah	Opini LKPD	Nilai	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Misi 4. Pengembangan infrastruktur dasar dan wilayah untuk menopang konektivitas.

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	CAPAIAN/TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Tujuan 5 Meningkatkan infrastruktur dasar dan wilayah	Indeks Infrastruktur Wilayah	Nilai	Tidak Tersedia	53,27	53,27	55,75	60,32	62,55	65,77
1.1	Sasaran 16 Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah /Kawasan yang mendorong produktivitas sektor utama, sektor pendukung dan produktivitas Kawasan Perdesaan.	Indeks Williamson	Nilai	Tidak Tersedia	0,47	0,47	0,42	0,40	0,37	0,35
1.2	Sasaran 17 Meningkatnya Konektivitas Wilayah/Kawasan Perdesaan Serta Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Perdesaan	Indeks Desa Membangun	Nilai Rerata	0,61	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Ini juga merupakan salah satu rujukan penting dalam mengimplementasikan tujuan dan sasaran pembangunan. Hal tersebut akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan.

Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya terukur dalam mewujudkan visi pembangunan Konawe Selatan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Konawe Selatan.

6.1. Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada Bab V, visi pembangunan Konawe Selatan 2021-2026 adalah **“Menuju Konawe Selatan yang Sejahtera, Unggul dan Amanah Berbasis Perdesaan”**. Dari visi ini diturunkan empat misi. Untuk masing-masing misi tersebut, berikut turunan tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya. Strategi secara singkat merupakan langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah atau Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Di misi pertama (Misi 1 atau M1), Pemerintah Konawe Selatan **“Melanjutkan Pembangunan Sumber Daya Manusia”** yang bertujuan **meningkatkan kualitas hidup manusia** (Tujuan 1 atau T1) yang meliputi tujuh sasaran. Pada sasaran pertama (Sasaran 1 atau S1), yakni **meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, strategi yang dilakukan adalah meningkatkan kesehatan ibu dan anak, kualitas gizi, dan tenaga kesehatan, serta perilaku dan lingkungan hidup sehat**. Strategi ini ditentukan untuk menjawab isu-isu

strategis bidang kesehatan yang menjadi perhatian Konawe Selatan yang melihat belum optimalnya program penanganan masalah Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang ditandai dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA). Selain itu, masih tingginya prevalensi kasus gizi kurang dan gizi buruk (malnutrition). Isu tenaga kesehatan juga menjadi hal yang penting dalam strategi untuk mencapai sasaran bidang kesehatan ini. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang rendah, serta belum merata pendistribusiannya. Strategi ini juga diarahkan untuk menjawab masalah kesehatan lingkungan (termasuk rumah layak huni) dan jaminan sosial masyarakat.

Di sasaran kedua (S2), titik perhatian ditujukan pada **meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat**. Oleh karena itu, strategi dalam RPJMD dimaksudkan untuk **meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, mutu tenaga pendidik, fasilitas/koleksi perpustakaan, serta literasi**. Hal ini didorong oleh komitmen Pemerintah Konawe Selatan untuk menuntaskan wajib pendidikan dasar 9 tahun, mengatasi tingginya angka putus sekolah, termasuk masih adanya penduduk usia sekolah yang belum bersekolah. Strategi ini juga ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik yang masih terdapat yang belum mencapai kualifikasi Diploma 4 bahkan Strata 1. Isu terkait sarana prasarana serta fasilitas pendidikan juga dimaksudkan oleh strategi bidang pendidikan ini, termasuk peningkatan literasi (informasi, media, budaya) serta kualitas layanan perpustakaan.

Masih berhubungan dengan tujuan pertama (T1) yakni **meningkatkan kualitas hidup manusia**, sasaran ketiga (S3) yang dituju adalah **terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat**. Untuk mencapai sasaran tersebut, strategi yang diterapkan berupa **meningkatkan kualitas konsumsi pangan pokok masyarakat secara proporsional berbasis triguna pangan sebagai sumber karbohidrat, protein dan vitamin**. Strategi ini masih memiliki relevansi dengan strategi di sasaran sebelumnya yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Selain itu, strategi ini untuk menjawab isu optimalisasi diversifikasi pangan, ketersediaan serta cadangan pangan. Masih memiliki relevansi sasaran ketiga, pada sasaran keempat (S4) yakni **meningkatkan standar hidup layak**, strategi yang diterapkan adalah **meningkatkan pendapatan masyarakat yang siap dibelanjakan (*disposable income*)**. Strategi ini diarahkan pada kebijakan untuk

penguatan saluran distribusi dan stabilitas harga kebutuhan pokok, serta persiapan pengembangan aplikasi *Smart Logistic*.

Meningkatnya partisipasi politik masyarakat merupakan sasaran kelima (S5). Di sasaran ini, strategi yang ditetapkan adalah **meningkatkan partisipasi warga dalam pemilihan umum, keterwakilan perempuan di DPRD, serta saluran suara publik bagi pelayanan masyarakat**. Upaya untuk meningkatkan partisipasi ini menasar juga para pemilih pemula dan kelompok minoritas. Partisipasi politik tentu dilihat dalam arti yang luas. Tidak hanya berhubungan dengan pemilihan kepala daerah, presiden, atau pemilu legislatif. Partisipasi juga harus difasilitasi dalam bentuk kanal atau saluran untuk menyampaikan aspirasi publik terkait apa saja karena hal tersebut merupakan bentuk pelayanan yang berhak untuk diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini pula maka sasaran keenam (S6) yaitu **meningkatnya kesetaraan gender** menjadi hal yang juga turut menyertai dengan strategi **meningkatkan kesetaraan perempuan dan perlindungan anak**. Strategi ini utamanya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mencapai target nasional Indeks Pembangunan Gender (IPG). Selain itu, salah satu isu strategi yang juga menjadi perhatian Pemerintah Daerah Konawe Selatan terkait dengan akses ekonomi dan pendidikan perempuan, serta perlindungan anak.

Masih dalam konteks tujuan pertama (T1) yakni **meningkatkan kualitas hidup manusia**, sasaran berikutnya atau sasaran ketujuh (S7) adalah **terpeliharanya kualitas lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan**. Strategi yang ditetapkan yaitu **meningkatkan kualitas biofisika serta daya tampung dan dukung lingkungan**. Isu yang menjadi salah satu titik perhatian adalah kuantitas sampah domestik dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) karena membutuhkan pengelolaan khusus. Hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah yang terkait dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan, ruang terbuka hijau (RTH), serta tata kelola air dan tanah. Revitalisasi sumber air dan fungsi tanah menjadi arah dari strategi ini diharapkan juga mampu mengurangi risiko bencana lingkungan.

Berpindah ke misi kedua (M2) **penguatan dan pengembangan perekonomian berbasis perdesaan yang inklusif dan berkelanjutan**, RPJMD menetapkan tujuan kedua (T2) yakni **meningkatkan pertumbuhan ekonomi**. Dari tujuan ini ditetapkan empat sasaran dan empat strategi. Pemerintah Daerah Konawe Selatan mengarahkan perhatian pada **meningkatnya nilai tambah sektor ekonomi utama** sebagai sasaran kedelapan (S8). Di sasaran ini, strategi yang diambil berupa **meningkatkan pertumbuhan dan peranan sektor primer**

dan sekunder dalam perekonomian. Arah kebijakan yang ingin dituju dari strategi ini adalah pemantapan dan perluasan hilirisasi produk unggulan subsektor pertanian melalui penguatan kawasan perdesaan terutama pada Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Tinanggea serta pemantapan hilirisasi subsektor pertambangan. Hal ini diharapkan dapat memberi dampak pada pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat untuk **meningkatkan pendapatan masyarakat** perdesaan yang menjadi sasaran kesembilan (S9) RPJMD. Untuk sasaran ini, strategi yang ditetapkan adalah **meningkatkan rata-rata pendapatan masyarakat** dengan menguatkan lapangan usaha industri, perdagangan, meningkatkan pertumbuhan usaha pertanian dan pertambangan serta meningkatkan kualitas perekonomian di kawasan perdesaan terutama pada KPPN Tinanggea.

Sasaran yang juga menjadi bagian dari tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah **meningkatnya penyerapan tenaga kerja** (S10) dan **meningkatnya pemerataan pendapatan antar kelompok pendapatan** (S11). Untuk masing-masing sasaran ini, disiapkan dua strategi yakni **meningkatkan penyerapan tenaga kerja** dan **meningkatkan pendapatan masyarakat pada kelompok pendapatan 40 persen terbawah**. Diharapkan dengan strategi-strategi ini, akan terwujud dua hal. Pertama, penguatan peran serta dan perluasan kelembagaan pelatihan siap kerja pada sektor formal dan ekonomi kreatif. Kedua, peningkatan kapasitas dan akses rumah tangga kelompok pendapatan terbawah terhadap peluang usaha.

Dalam misi ketiga (M3), Pemerintah Daerah Konawe Selatan melakukan **penguatan tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah** yang dijabarkan dalam tujuan **meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik** (T3). Untuk tata kelola pemerintahan ini, RPJMD membidik dua sasaran. Pertama, yang **meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah** (S12) yang akan dijalankan dengan strategi meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja. Kedua, sasaran **meningkatnya kualitas pelayanan publik** (S13) yang akan dilakukan dengan strategi yang **meningkatkan kualitas pelayanan publik**, baik yang merupakan urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah, dengan melakukan penganggaran yang responsif gender.

Masih dalam lingkup misi ketiga, untuk tujuan **meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah** (T4) sasaran RPJMD Konawe Selatan adalah **meningkatnya kapasitas fiskal** (S14) yang ditempuh dengan strategi **meningkatkan realisasi pendapatan daerah (PAD)** yang dimulai dengan

pemetaan potensi dan intensifikasi PAD. Adapun untuk sasaran **meningkatnya pengelolaan aset daerah** (S15), strategi yang diterapkan adalah **meningkatkan tata kelola barang milik daerah** yang diawali dengan melakukan identifikasi, penelusuran, dan pendataan barang milik daerah. Muara dari kedua strategi ini adalah pemantapan dan evaluasi penggunaan Sistem Informasi PAD, ketersediaan data barang milik daerah berbasis SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah), serta realisasi pemanfaatan barang atau aset daerah.

Selanjutnya di misi keempat (M4) yang berkaitan dengan **pengembangan infrastruktur dasar dan wilayah untuk menopang konektivitas**, Pemerintah Daerah Konawe Selatan bertujuan untuk **meningkatkan infrastruktur dasar dan wilayah** (T5). Dari tujuan ini, sasaran yang ditetapkan adalah **meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah/kawasan yang mendorong produktivitas sektor utama, sektor pendukung maupun produktivitas di kawasan perdesaan** terutama pada KPPN Tinanggea (S16) dengan strategi **meningkatkan produktivitas sektor utama dan pendukung pada tiap wilayah maupun terhadap kawasan perdesaan** terutama pada KPPN Tinanggea. Diharapkan hal ini akan menciptakan akses terhadap infrastruktur dasar dan wilayah yang lebih merata. Sasaran lainnya berupa **meningkatnya konektivitas wilayah/kawasan perdesaan serta ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan pedesaan** (S17) yang akan dilaksanakan dengan strategi **meningkatkan keterhubungan antar wilayah pedesaan dan perluasan akses rumah tangga terhadap sistem sanitasi**.

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Sementara Program pembangunan daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program yang dimaksud di sini adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tabel 6.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD Konawe Selatan 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 1: Melanjutkan Pengembangan Sumberdaya Manusia								
1. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia	1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat.	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak, kualitas gizi, dan tenaga kesehatan, serta perilaku dan lingkungan hidup sehat.	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, serta kualitas tenaga kesehatan.	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, serta kualitas tenaga kesehatan.	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan (khususnya ibu dan anak), fasilitas kesehatan, kualitas tenaga kesehatan, jaminan sosial kesehatan, dan literasi hidup sehat.	Peningkatan akses, mutu pelayanan kesehatan (khususnya ibu dan anak), fasilitas kesehatan, kualitas tenaga kesehatan, jaminan sosial kesehatan, dan literasi hidup sehat.	Peningkatan akses, mutu pelayanan kesehatan (khususnya ibu dan anak), fasilitas kesehatan, kualitas tenaga kesehatan, jaminan sosial kesehatan, dan literasi hidup sehat.	Penuntasan akses serta mutu pelayanan kesehatan (khususnya ibu dan anak), kualitas tenaga kesehatan, gizi dan lingkungan hidup sehat, serta jaminan sosial kesehatan.
	2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat.	Meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, mutu tenaga pendidik, fasilitas/koleksi perpustakaan, serta literasi.	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan	Peningkatan akses, mutu layanan pendidikan, serta tenaga pendidik.	Peningkatan akses, mutu layanan pendidikan, tenaga pendidik, dan pengembangan perpustakaan.	Peningkatan akses, mutu layanan dan tenaga pendidik, pengembangan perpustakaan, serta literasi informasi dan budaya.	Penuntasan akses, mutu layanan dan tenaga pendidik, pengembangan perpustakaan, serta literasi informasi dan budaya.
	3. Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Masyarakat.	Meningkatkan kualitas konsumsi pangan pokok masyarakat secara proporsional berbasis triguna pangan sebagai sumber karbohidrat, protein dan vitamin.	Peningkatan produksi dan keamanan pangan pokok masyarakat	Peningkatan produksi dan keamanan pangan pokok masyarakat	Peningkatan produksi dan keamanan pangan pokok masyarakat	Penganeka-ragaman pangan pokok masyarakat	Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat	Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat

	4. Meningkatnya Standar Hidup Layak.	Meningkatkan pendapatan masyarakat yang siap dibelanjakan (<i>disposable income</i>).	Pemetaan saluran distribusi dan stabilitas harga kebutuhan pokok. .	Pemetaan saluran distribusi dan stabilitas harga kebutuhan pokok. .	Perbaikan saluran distribusi dan stabilitas harga kebutuhan pokok.	Penguatan saluran distribusi dan stabilitas harga kebutuhan pokok.	Penguatan saluran distribusi dan stabilitas harga kebutuhan pokok.	Persiapan pengembangan aplikasi Smart Logistic.
	5. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Meningkatkan partisipasi warga dalam pemilihan umum, keterwakilan perempuan di DPRD, serta saluran suara publik bagi pelayanan masyarakat.	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam politik, khususnya kelompok pemilih pemula.	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam politik, khususnya kelompok pemilih pemula.	Peningkatan keterlibatan dan saluran pelibatan masyarakat dalam politik, khususnya perempuan, pemilih pemula dan kelompok minoritas.	Peningkatan keterlibatan dan saluran pelibatan masyarakat dalam politik, khususnya perempuan, pemilih pemula dan kelompok minoritas..	Penuntasan keterwakilan perempuan di DPRD, partisipasi politik pemilih pemula dan kelompok minoritas.	Penuntasan keterwakilan perempuan di DPRD, partisipasi politik pemilih pemula dan kelompok minoritas.
	6. Meningkatnya Kesenjangan Gender.	Meningkatkan kesetaraan perempuan dan perlindungan anak.	Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi dan perlindungan anak.	Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi dan perlindungan anak.	Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi dan pendidikan, serta perlindungan anak.	Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi dan pendidikan, serta perlindungan anak.	Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi dan pendidikan, serta perlindungan anak.	Pemantapan pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi dan pendidikan, serta perlindungan anak.
	7. Terpeliharanya kualitas lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas biofisika serta daya tampung dan dukung lingkungan.	Peningkatan kualitas pengolahan sampah dan limbah B3.	Peningkatan kualitas pengolahan sampah dan limbah B3.	Peningkatan kualitas pengolahan sampah dan limbah B3, revitalisasi sumber daya air dan fungsi tanah, serta peningkatan RTH.	Peningkatan kualitas pengolahan sampah dan limbah B3, revitalisasi sumber daya air dan fungsi tanah, serta peningkatan RTH.	Peningkatan kualitas pengolahan sampah dan limbah B3, revitalisasi sumber daya air dan fungsi tanah, serta peningkatan RTH.	Pemantapan kualitas pengolahan sampah dan limbah B3, revitalisasi sumber daya air dan fungsi tanah, serta peningkatan RTH.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 2: Penguatan dan pengembangan perekonomian berbasis pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan.								
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	8. Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Ekonomi Utama	Meningkatkan pertumbuhan dan peranan sektor primer dan sekunder dalam perekonomian	Peningkatan nilai tambah sektor primer, penguatan kawasan pedesaan serta penguatan peran sektor sekunder dan tersier	Peningkatan nilai tambah sektor primer, penguatan kawasan pedesaan serta penguatan peran sektor sekunder dan tersier	Peningkatan nilai tambah sektor primer, penguatan kawasan pedesaan, serta penguatan peran sektor sekunder dan tersier	Konsolidasi kawasan pedesaan dan Industri dalam rangka percepatan hilirisasi produk pertanian dan pertambangan	Pemantapan kawasan pedesaan dan pengembangan industri dalam rangka hilirisasi produk pertanian dan pertambangan.	Pemantapan kawasan pedesaan dan perluasan hilirisasi produk subsektor pertanian dan pertambangan.
	9. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.	Meningkatkan rata-rata pendapatan masyarakat.	Peningkatan peranan dan pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Pertambangan, Perdagangan, Konstruksi, Industri serta kualitas perekonomian di Kawasan Pedesaan	Peningkatan peranan dan pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Pertambangan, Perdagangan, Konstruksi,Industri serta kualitas perekonomian di Kawasan Pedesaan	Peningkatan Peranan dan Kualitas Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Pertambangan, Perdagangan, Konstruksi, Industri serta kualitas perekonomian di Kawasan Pedesaan	Peningkatan Peranan dan Kualitas Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Pertambangan, Perdagangan, Konstruksi, Industri serta kualitas perekonomian di Kawasan Pedesaan.	Penguatan Lapangan Usaha Industri, Perdagangan serta peningkatan kualitas pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian dan Pertambangan serta kualitas perekonomian di Kawasan Pedesaan	Pemantapan Peranan dan Kualitas Pertumbuhan Sektor Industri, Pertanian, Pertambangan serta Perdagangan serta kualitas perekonomian di Kawasan Pedesaan
	10. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja.	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan penduduk usia kerja.	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan penduduk usia kerja.	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan penduduk usia kerja.	Penguatan peran serta dan perluasan kelembagaan pelatihan siap kerja pada sektor kreatif.	Penguatan peran serta dan perluasan kelembagaan pelatihan siap kerja pada sektor formal dan ekonomi kreatif.	Pemantapan kerjasama multipihak dalam persiapan dan pelatihan siap kerja pada sektor formal dan ekonomi kreatif.
	11. Meningkatnya Pemerataan pendapatan antar kelompok pendapatan.	Meningkatkan pendapatan masyarakat pada kelompok pendapatan 40 persen terbawah.	Pemetaan, Pengukuran serta pemutakhiran data Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Pendapatan.	Pemetaan, Pengukuran serta pemutakhiran data Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Pendapatan.	Penguatan dan Perluasan Dukungan Bagi Rumah Tangga Kelompok Pendapatan Terbawah.	Penguatan dan Perluasan Dukungan Bagi Rumah Tangga Kelompok Pendapatan Terbawah.	Peningkatan kapasitas dan akses Rumah Tangga Kelompok Pendapatan Terbawah Terhadap Peluang Usaha.	Pemantapan sistem dukungan bagi rumah tangga kelompok pendapatan terbawah.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 3: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah								
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	12. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Evaluasi Kinerja.	Peningkatan kualitas kinerja dan akuntabilitas serta evaluasi kinerja.	Peningkatan kualitas kinerja dan akuntabilitas, evaluasi kinerja, serta kesejahteraan ASN.	Penguatan Kapasitas Tenaga Fungsional Perencana serta kesejahteraan ASN.	Penguatan Pemanfaatan Instrumen Pengukuran Kinerja, Pelaporan, Evaluasi Kinerja, serta kesejahteraan ASN.	Penguatan dan Perluasan Pemanfaatan Instrumen Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja, serta kesejahteraan ASN.	Pemantapan Implementasi Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi Kinerja, serta kesejahteraan ASN.
	13. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.	Peningkatan. kualitas layanan urusan wajib Pemda.	Peningkatan. kualitas layanan urusan wajib Pemda.	Peningkatan kualitas layanan urusan wajib Pemda dengan penganggaran responsif gender.	Peningkatan kualitas layanan urusan wajib dan pilihan Pemda dengan penganggaran responsif gender.	Peningkatan kualitas layanan urusan wajib dan pilihan Pemda dengan penganggaran responsif gender.	Pemantapan kualitas layanan urusan wajib dan pilihan Pemda dengan penganggaran responsif gender.
4. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14. Meningkatnya Kapasitas Fiskal	Meningkatkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Pemetaan Potensi dan Intensifikasi Penerimaan Asli Daerah..	Pemetaan Potensi dan Intensifikasi Penerimaan Asli Daerah..	Intensifikasi dan Pengembangan Sistem Informasi PAD.	Penguatan dan Perluasan Pemanfaatan Sistem Informasi PAD dan Peningkatan Kapasitas pengelola PAD.	Penguatan dan Perluasan Pemanfaatan Sistem Informasi PAD.	Pemantapan dan Evaluasi Penggunaan Sistem Informasi PAD
	15. Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah.	Meningkatkan Tata Kelola Barang Milik Daerah.	Identifikasi, Penelusuran dan pendataan Barang Milik Daerah.	Identifikasi, Penelusuran dan pendataan Barang Milik Daerah.	Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Pengelola Barang Milik Daerah. (BMD)	Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah dan Peningkatan Kapasitas Pengelola BMD	Penguatan Tata Kelola Barang Milik Daerah serta Identifikasi Potensi Pemanfaatan Barang/Aset Daerah.	Pemantapan Ketersediaan Data Barang Milik Daerah Berbasis SIMBADA dan Realisasi Pemanfaatan Barang/Aset Daerah.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 4: Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Wilayah Untuk Menopang Konektivitas								
5. Meningkatkan infrastruktur dasar dan wilayah.	16. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah/Kawasan yang mendorong produktivitas sektor utama, sektor pendukung dan produktivitas Kawasan Perdesaan.	Meningkatkan Produktivitas Sektor Utama dan Pendukung pada tiap wilayah maupun terhadap Kawasan Perdesaan	Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur dasar dan wilayah	Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur dasar dan wilayah	Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur dasar dan wilayah.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan wilayah	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan wilayah	Pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar dan wilayah.
	17. Meningkatnya Konektivitas Wilayah/Kawasan Perdesaan serta ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan perdesaan.	Meningkatkan keterhubungan antar wilayah/kawasan perdesaan dan perluasan akses rumah tangga terhadap sistem sanitasi.	Peningkatan keterhubungan antar wilayah serta peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi.	Peningkatan keterhubungan antar wilayah serta peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi.	Peningkatan kualitas keterhubungan antar wilayah serta peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi.	Peningkatan kualitas keterhubungan antar wilayah serta peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi.	Peningkatan kualitas keterhubungan dan kualitas sanitasi .	Pemantapan kualitas keterhubungan antar wilayah dan peningkatan kualitas sanitasi warga.

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, dengan strategi dan arah kebijakan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, pada bab ini disajikan gambaran pendanaan yang meliputi kondisi pendanaan sebelumnya dan prediksi atau rencana pendanaan program kerja setiap perangkat daerah di Kabupaten Konawe Selatan.

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Di bagian ini tersaji dua tabel yang menampilkan Proyeksi Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 serta Proyeksi Kerangka Pendanaan Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021–2026. Angka proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2021 sebesar Rp1.436.394.065.113,00. Dengan mempertimbangkan segala faktor yang berkontribusi pada pendapatan daerah, tahun 2026 angka tersebut diproyeksikan dapat bergerak naik menjadi Rp1.594.401.694.204,22. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Proyeksi belanja di tahun 2021 sebesar Rp 1.416.136.585.852,00. Belanja ini meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Mengikuti kecenderungan meningkatnya pendapatan, belanja di tahun 2026 juga akan bergerak naik di titik proyeksi Rp1.576.040.288.379,13.

Dari proyeksi pendapatan dan belanja ini total surplus di tahun 2021 mencapai Rp20.257.479.261,00 dan di tahun 2026 terkoreksi di titik Rp18.361.405.825,09. Adapun terkait dengan pembiayaan, proyeksi dari tahun 2021 hingga 2026 sebesar Rp22.500.000.000,00. Angka ini meliputi: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (atau disebut Penerimaan Pembiayaan), serta Penyertaan Modal Pemerintah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo (atau dikenal dengan istilah Pengeluaran Pembiayaan Daerah). Adapun Proyeksi Kerangka Pendanaan keseluruhan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan di tahun 2021 sebesar Rp1.416.136.585.852,00 dan

menjadi Rp1.576.043.440.459,70 di tahun 2026.

Salah satu ikhtiar pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan memperoleh komitmen pinjaman dengan jumlah total Rp.251.500.000.000 dari pemerintah pusat melalui PT.Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Komitmen pinjaman ini direalisasikan secara bertahap mulai tahun 2021 hingga tahun 2023 dengan rincian 35% pada tahun pertama, 50% pada tahap kedua dan 15% pada tahap ketiga. Realisasi pinjaman pada tahun 2021 senilai Rp. 88.025.000.000 kemudian pada tahun 2022 senilai Rp.125.750.000 dan tahun 2023 berjumlah Rp.37.725.000. Komitmen pembayaran pinjaman akan direalisasikan hingga tahun 2030. Adapun proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2021-2026 diuraikan melalui Tabel 7.1.

**Tabel 7.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 - 2026**

No. Urut	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	65,869,933,256.00	68,241,250,853.22	70,697,935,883.93	73,243,061,575.75	75,879,811,792.48	78,611,485,017.01
4.1.01	Pajak Daerah	22,510,000,000.00	23,320,360,000.00	24,159,892,960.00	25,029,649,106.56	25,930,716,474.40	26,864,222,267.47
4.1.02	Retribusi Daerah	21,150,000,000.00	21,911,400,000.00	22,700,210,400.00	23,517,417,974.40	24,364,045,021.48	25,241,150,642.25
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,904,456,046.00	7,153,016,463.66	7,410,525,056.35	7,677,303,958.38	7,953,686,900.88	8,240,019,629.31
4.1.04	Lain-lain Pendapatan yang Sah	15,305,477,210.00	15,856,474,389.56	16,427,307,467.58	17,018,690,536.42	17,631,363,395.73	18,266,092,477.97
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,323,039,631,857.00	1,349,500,424,494.14	1,376,490,432,984.02	1,404,020,241,643.70	1,432,100,646,476.58	1,460,742,659,406.11
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,294,141,645,000.00	1,320,024,477,900.00	1,346,424,967,458.00	1,373,353,466,807.16	1,400,820,536,143.30	1,428,836,946,866.17
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28,897,986,857.00	29,475,946,594.14	30,065,465,526.02	30,666,774,836.54	31,280,110,333.27	31,905,712,539.94
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	47,484,500,000.00	48,909,035,000.00	50,376,306,050.00	51,887,595,231.50	53,444,223,088.45	55,047,549,781.10
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	47,484,500,000.00	48,909,035,000.00	50,376,306,050.00	51,887,595,231.50	53,444,223,088.45	55,047,549,781.10
	JUMLAH PENDAPATAN	1,436,394,065,113.00	1,466,650,710,347.36	1,497,564,674,917.95	1,529,150,898,450.96	1,561,424,681,357.50	1,594,401,694,204.22

... bersambung

... sambungan 2/3

No. Urut	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	BELANJA						
5.1	BELANJA OPERASI	822,342,637,631.00	843,941,998,696.59	861,716,293,509.08	879,876,987,731.83	898,432,871,753.75	917,392,948,503.37
5.1.01	Belanja Pegawai	541,866,880,312.00	557,327,269,932.00	569,074,576,468.82	581,077,341,411.36	593,341,378,915.85	605,872,643,797.60
5.1.01	Belanja Barang dan Jasa	266,730,936,036.00	272,914,872,371.47	278,663,634,966.00	284,537,288,234.41	290,538,670,705.68	296,670,689,457.93
5.1.01	Belanja Bunga	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
5.1.01	Belanja Hibah	4,949,971,283.00	4,399,952,131.04	4,492,694,024.75	4,587,452,695.35	4,684,274,044.07	4,783,205,082.61
5.1.01	Belanja Bantuan Sosial	8,294,850,000.00	8,799,904,262.08	8,985,388,049.51	9,174,905,390.71	9,368,548,088.15	9,566,410,165.23
5.2	BELANJA MODAL	258,077,988,871.00	262,530,477,152.18	268,064,076,810.31	273,718,010,822.72	279,495,017,962.99	285,397,903,262.56
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90,391,341,463.00	92,398,994,751.88	94,346,574,519.83	96,336,506,602.41	98,369,754,925.52	100,447,306,734.87
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78,164,940,378.00	79,199,138,358.76	80,868,492,445.57	82,574,148,516.35	84,316,932,793.31	86,097,691,487.03
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80,815,326,000.00	82,132,439,779.45	83,863,621,795.41	85,632,450,313.25	87,439,782,156.02	89,286,494,875.44
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8,706,381,030.00	8,799,904,262.08	8,985,388,049.51	9,174,905,390.71	9,368,548,088.15	9,566,410,165.23
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3,080,000,000.00	3,079,966,491.73	3,144,885,817.33	3,211,216,886.75	3,278,991,830.85	3,348,243,557.83
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3,080,000,000.00	3,079,966,491.73	3,144,885,817.33	3,211,216,886.75	3,278,991,830.85	3,348,243,557.83
5.4	BELANJA TRANSFER	332,635,959,350.00	340,262,964,800.59	347,435,004,580.97	354,763,008,440.62	362,250,526,074.94	369,901,193,055.38
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	332,635,959,350.00	340,262,964,800.59	347,435,004,580.97	354,763,008,440.62	362,250,526,074.94	369,901,193,055.38
	JUMLAH BELANJA	1,416,136,585,852.00	1,449,815,407,141.08	1,480,360,260,717.69	1,511,569,223,881.92	1,543,457,407,622.53	1,576,040,288,379.13
	TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)	20,257,479,261.00	16,835,303,206.27	17,204,414,200.27	17,581,674,569.03	17,967,273,734.97	18,361,405,825.09

... bersambung

... sambungan 3/3

No. Urut	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	PEMBIAYAAN						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	91.400.458.838	294.967.580.827	259.668.317.171	169.217.580.827	169.217.580.827	169.217.580.827
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.375.458.838,	169.217.580.827	221.943.317.171	169.217.580.827	169.217.580.827	169.217.580.827
6.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	88.025.000.000	125.750.000.000	37.725.000.000	0.00	0.00	0.00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	22.492.298.734	32.492.298.734	27.492.298.734	27.492.298.734	27.492.298.734	27.492.298.734
6.2.02	Penyertaan Modal Pemerintah	0,00	10.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	22.492.298.734,00	22.492.298.734,00	22.492.298.734,00	22.492.298.734,00	22.492.298.734,00	22.492.298.734,00
	PEMBIAYAAN NETTO	68.908.160.104	262.475.282.093	232.176.018.437	141.725.282.093	141.725.282.093	141.725.282.093
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA)	111.657.938.099	311.802.884.033	276.872.731.371	186.799.255.396	187.184.854.561	187.578.986.652

**Tabel 7.2. Proyeksi Kerangka Pendanaan Per-OPD
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 - 2026**

No. Urut	OPD	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	386,039,067,734.00	395,219,679,987	403,546,207,072	412,053,770,430	420,746,489,318	429,628,582,612
2	Dinas Kesehatan	133,302,003,602.00	136,472,574,090	139,347,791,702	142,285,522,613	145,287,189,237	148,354,248,385
3	RS Konawe Selatan	100,808,033,353.00	103,205,109,757	105,379,445,159	107,601,055,202	109,871,015,562	112,190,427,928
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	92,617,531,796.00	94,820,827,258	96,818,521,771	98,859,650,380	100,945,201,373	103,076,186,941
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7,939,692,132.00	8,129,114,988	8,300,379,982	8,475,368,638	8,654,165,685	8,836,857,897
6	Satuan Polisi Pamong Praja	6,871,646,225.00	5.188.513,696	3.787.133.797	3.734.825.235	3.673.588.184	3.602.764.292
7	Pemadam Kebakaran	0	1.845.990.659	3.395.574.188	3.599.308.639	3.815.267.158	4.044.183.187
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,628,951,440.00	3,715,876,889	3,794,163,348	3,874,151,921	3,955,881,336	4,039,391,259
8	Dinas Sosial	5,495,680,919.00	5,626,733,595	5,745,278,172	5,866,400,158	5,990,158,199	6,116,612,359
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7,105,875,730.00	7,275,173,713	7,428,447,788	7,585,054,365	7,745,069,271	7,908,570,167
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,552,076,633.00	3,636,137,041	3,712,743,534	3,791,015,613	3,870,991,178	3,952,709,043

... bersambung

... sambungan 2/3

No. Urut	OPD	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Dinas Ketahanan Pangan	4,288,095,137.00	4,390,041,053	4,482,530,869	4,577,031,610	4,673,589,030	4,772,249,993
12	Dinas Lingkungan Hidup	4,923,893,297.00	5,041,008,171	5,147,212,627	5,255,726,191	5,366,601,406	5,479,892,083
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,048,050,274.00	6,192,161,604	6,322,618,674	6,455,912,155	6,592,106,588	6,731,268,072
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4,642,264,458.00	4,752,494,905	4,852,620,935	4,954,923,916	5,059,453,382	5,166,260,065
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12,534,724,849.00	12,832,316,169	13,102,668,668	13,378,899,201	13,661,141,515	13,949,532,592
16	Dinas Perhubungan	7,592,046,432.00	7,772,460,398	7,936,211,358	8,103,522,609	8,274,475,162	8,449,151,986
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	4,784,865,260.00	4,898,926,261	5,002,137,321	5,107,592,407	5,215,342,580	5,325,440,134
18	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	4,152,322,188.00	4,250,858,774	4,340,416,284	4,431,920,964	4,525,417,119	4,620,950,126
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,701,587,571.00	4,813,387,152	4,914,796,066	5,018,409,823	5,124,278,593	5,232,453,757
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	4,424,214,686.00	4,529,223,332	4,624,645,454	4,722,142,255	4,821,760,941	4,923,549,861
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3,053,036,282.00	3,125,802,018	3,191,656,722	3,258,943,247	3,327,694,171	3,397,942,862
22	Dinas Perikanan	8,798,494,926.00	9,007,703,125	9,197,478,300	9,391,379,588	9,589,500,874	9,791,938,312
23	Dinas Pariwisata	6,454,411,500.00	6,608,258,626	6,747,482,068	6,889,732,522	7,035,078,864	7,183,591,634

... bersambung

... sambungan 3/3

No. Urut	OPD	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	22,782,157,880.00	23,324,630,270	23,816,035,874	24,318,125,674	24,831,142,774	25,355,336,159
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7,576,780,485.00	7,756,512,428	7,919,927,395	8,086,895,348	8,257,497,131	8,431,815,543
26	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	6,814,192,816.00	6,976,511,739	7,123,493,575	7,273,671,105	7,427,117,045	7,583,905,868
27	Sekretariat Daerah	33,415,941,949.00	34,211,294,162	34,932,061,072	35,668,498,976	36,420,964,448	37,189,822,685
28	Sekretariat DPRD	42,216,245,788.00	43,220,447,102	44,131,019,732	45,061,390,133	46,012,008,779	46,983,337,037
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6,892,259,823.00	7,056,251,587	7,204,913,389	7,356,807,413	7,512,007,203	7,670,588,084
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	378,659,654,519.00	387,664,691,900	395,832,049,753	404,176,983,205	412,703,532,767	421,415,836,669
31	Badan Pendapatan Daerah	7,179,359,358.00	7,350,564,114	7,505,426,522	7,663,655,965	7,825,329,057	7,990,524,262
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6,308,517,011.00	6,458,927,639	6,595,004,961	6,734,040,892	6,876,102,751	7,021,259,485
33	Badan Penelitian dan Pengembangan	6,055,787,549.00	6,199,410,681	6,330,020,475	6,463,470,001	6,599,823,875	6,739,148,273
34	Inspektorat Daerah	8,383,861,298.00	8,582,907,210	8,763,732,743	8,948,489,805	9,137,267,853	9,330,158,507
35	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4,000,567,304.00	4,095,728,525	4,182,017,737	4,270,183,057	4,360,267,177	4,452,313,815
36	Kecamatan	62,092,693,648.00	63,570,056,157	64,909,356,352	66,277,775,760	67,675,976,952	69,104,638,525
TOTAL		1,416,136,585,852.00	1,449,818,306,771.90	1,480,363,221,438.21	1,511,572,247,020.37	1,543,460,494,537.35	1,576,043,440,459.70

7.2. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah merupakan keseluruhan program yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD. Semua hal yang dimaksudkan berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah meliputi urusan pemerintahan wajib dan pilihan serta unsur penunjang pemerintahan. Program Perangkat daerah meliputi program OPD beserta indikator program, target tahunan dan indikasi pendanaan yang akan dibiayai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.3

Indikasi Rencana Program Prioritas disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kab. Konawe Selatan Tahun 2021 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar															
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan															
1.01	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan				386.039.067.734		395.219.679.987		403.546.207.072		412.053.770.430		420.746.489.318		429.628.582.612	
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	276.072.575.734	100%	280.999.879.987	100%	287.499.217.072	100%	293.638.840.630	100%	299.917.260.922	100%	306.382.769.648	DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Peningkatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (%)	80%	82%	109.919.392.000	84%	113.575.000.000	88%	115.846.500.000	90%	118.163.430.000	93%	120.526.698.600	95%	122.937.232.572	DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Peningkatan Pengembangan Kurikulum Pendidikan (%)	75%	77%	-	78%	120.000.000	80%	150.000.000	84%	200.000.000	87%	250.000.000	90%	255.000.000	DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (%)	80%	81%	47.100.000	82%	49.500.000	84%	50.490.000	86%	51.499.800	90%	52.529.796	95%	53.580.392	DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan															
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Pembinaan Kebudayaan lokal (Kegiatan)	1	1	408.308.000	2	450.000.000	2	459.000.000	2	468.180.000	2	477.543.600	11	487.094.472	DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Kesenian Tradisional yang terbina (Kegiatan)	1	1	20.000.000	1	25.300.000	1	25.806.000	2	26.322.120	2	26.848.562	9	27.385.534	DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan (Buah)			-			-		1	500.000.000	1	500.000.000	3	510.000.000	DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan															
1.02	Dinas Kesehatan				133.302.002.000		136.472.574.090		139.347.791.702		142.285.522.613		145.287.189.237		148.354.248.385	
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	44.916.972.000	100%	45.966.303.370	100%	47.031.395.567	100%	48.122.798.556	100%	49.241.210.699	100%	50.387.350.276	DINAS KESEHATAN
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat	90%	90%	85.559.900.000	90%	87.613.337.600	90%	89.365.604.352	90%	91.152.916.439	90%	92.975.974.768	100%	94.835.494.263	DINAS KESEHATAN
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	90%	90%	2.436.230.000	90%	2.494.699.520	90%	2.544.593.510	90%	2.595.485.381	90%	2.647.395.088	100%	2.700.342.990	DINAS KESEHATAN
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Peningkatan Ketersediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	90%	90%	248.312.000	90%	254.271.488	90%	259.356.918	90%	264.544.056	90%	269.834.937	100%	275.231.636	DINAS KESEHATAN
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	90%	90%	140.588.000	90%	143.962.112	90%	146.841.354	90%	149.778.181	90%	152.773.745	100%	155.829.220	DINAS KESEHATAN
1.02	RS Konawe Selatan				100.808.033.000		103.205.109.757		105.379.445.159		107.601.055.202		109.871.015.562		112.190.427.928	
1.02.01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	23.633.134.000	100%	24.486.712.777	100%	25.086.680.240	100%	25.702.434.984	100%	26.334.422.939	100%	26.983.103.453	DINAS KESEHATAN
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan, masyarakat	Persentase ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan pendukung fasilitas pelajaran RS serta pemeliharannya dengan	85%	93%	70.304.899.000	93%	71.710.996.980	94%	73.145.216.920	95%	74.608.121.258	97%	76.100.283.683	100%	77.622.289.357	DINAS KESEHATAN
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase ketersediaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar, melalui perencanaan SDMK, peningkatan mutu dan kompetensi SDM kesehatan (%)	80%	81%	6.870.000.000	85%	7.007.400.000	88%	7.147.548.000	92%	7.290.498.960	96%	7.436.308.939	100%	7.585.035.118	DINAS KESEHATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan															
1.03	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang				100.496.365.000		96.818.521.771		98.859.650.380		100.945.201.373		420.746.489.318		103.076.186.941	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	8.466.219.000	100%	9.232.791.478	100%	9.518.725.276	100%	9.813.857.955	100%	10.118.493.099	100%	10.432.944.501	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Luas daerah irigasi dan rawa yang fungsional (ha)	628 Ha	628 Ha	10.650.788.000	628 Ha	9.905.232.840	628 Ha	10.103.337.497	628 Ha	10.305.404.247	628 Ha	10.511.512.332	3,768 Ha		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (%)	19%	19%	9.980.750.000	20%	9.282.097.500	21%	9.467.739.450	22%	9.657.094.239	23%	9.850.236.124	24%6	10.047.240.84	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (%)	65%	65%	1.940.624.000	69%	1.804.780.320	71%	1.840.875.926	73%	1.877.693.445	75%	1.915.247.314	77%	1.953.552.260	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.06	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (%)	50%	50%	1.667.855.000	55%	1.551.105.150	60%	1.582.127.253	65%	1.613.769.798	70%	1.646.045.194	75%	1.678.966.098	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Yang Terbangun	5 gedung	5 gedung	293.705.000	10 gedung	273.145.650	10 gedung	278.608.563	15 gedung	284.180.734	17 gedung	289.884.349	17 Gedung	295.661.636	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.09	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Jumlah dokumen penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung	5 Dok	5 Dok	250.000.000	10 Dok	232.500.000	0 Dok	237.150.000	0 Dok	241.893.000	0 Dok	246.730.860	15 Dok	251.665.477	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.10	Program penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dan Jembatan Kondisi Baik Dan Sedang	26%	27,6%	64.791.984.000	29,0	60.256.545.120	30,5	61.461.676.022	32,0%	62.690.909.543	33,5%	63.944.727.734	35,1%	65.223.622.288	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang yang terlaksana (%)	82,50%	82,50%	2.388.770.000	85%	2.221.556.100	87,50%	2.265.987.222	90%	2.311.306.966	92,50%	2.357.533.106	95%	2.404.683.768	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman															
1.04	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				7.095.693.000		8.129.114.988		8.300.379.982		8.475.368.638		8.654.165.685		8.836.857.897	
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	2.304.166.800	100%	3.219.470.561	100%	3.376.744.204	100%	3.453.260.145	100%	3.531.615.021	100%	3.611.856.220	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Proporsi rumah tangga yang Memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)	83%	83%	690.897.000	86%	704.714.940	90%	772.913.160	93%	788.371.423	95%	804.138.852	97%	820.221.629	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Proporsi rumah tangga yang Memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)	83%	83%	2.367.313.550	86%	2.414.658.852	90%	2.462.952.029	93%	2.512.211.070	95%	2.562.455.291	97%	2.613.704.397	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.04	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	83%	83%	1.452.707.890	86%	1.481.762.048	90%	1.511.397.289	93%	1.541.625.234	95%	1.572.457.739	97%	1.603.906.894	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (%)	10%	10%	124.595.450	10%	127.087.308	15%	129.629.054	20%	132.221.635	25%	134.866.068	30%	137.563.389	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan															
1.05	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan															
1.05.01	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	10	10	242.757.850	10	292.188.362	20	298.466.264	30	304.884.643	40	311.446.819	50	318.156.200	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.05.02	Program Pengadaan Tanah untuk Kebutuhan Umum	Peningkatan Penggunaan tanah untuk Kebutuhan Umum (%)	5%	5%	126.884.850	5%	129.422.547	5%	619.000.998	10%	134.651.218	15%	137.344.242	20%	140.091.127	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.05.03	Pogram Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Peningkatan Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	10%	10%	124.595.450	10%	127.087.308	20%	129.629.054	30%	132.221.635	40%	134.866.068	50%	137.563.389	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.05.04	Program Survey, Pengukuran dan Pemetaan Tanah	Peningkatan Luas Pengukuran dan Pemetaan Tanah (%)	10%	10%	44.929.110	10%	45.827.692	20%	46.744.246	30%	47.679.131	40%	48.632.714	50%	49.605.368	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

1.05.05	Program Penataan Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar (%)	5%	5%	118.162.400	6%	165.101.054	7%	168.837.210	8%	172.663.007	9%	176.580.751	10%	180.592.811	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.05.06	Program Pengembangan Sistem Persampahan Daerah	Peningkatan Sistem Pengelolaan Persampahan (%)	20%	20%	121.378.925	30%	146.094.181	40%	149.233.132	45%	152.442.321	50%	155.723.410	55%	159.078.100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan															
1.05	Satuan Polisi Pamong Praja				6.871.644.000		7.034.504.355		7.182.707.985		7.334.133.874		7.488.855.342		7.646.947.479	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	4.990.833.000	100%	5.116.077.135	100%	5.225.912.221	100%	5.338.202.194	100%	5.453.005.029	100%	5.570.380.160	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kasus)	12 Kasus	14 Kasus	1.864.916.000	14 Kasus	1.902.214.320	14 Kasus	1.940.258.606	14 Kasus	1.979.063.779	14 Kasus	2.018.645.054	14 Kasus	2.059.017.955	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.06	Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				1.864.916.000		1.845.990.659		3.395.574.188		3.599.308.639		3.815.267.158		4.044.183.187	
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (%)	0	0	0	90.93	369.198.139	92.50%	679.114.838	95.00%	719.861.728	97.00%	763.053.432	100%	808.836.637	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.06.02	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Peningkatan standarisasi sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran (%)	0	0	0-	25%	922.995.348	35%	1.697.787.094	50	1.799.654.320	75%	1.907.633.579	100%	2.022.091.594	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.06.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Pencegahan Kebakaran	Peningkatan jumlah relawan kebakaran di kecamatan dan desa (orang)	0	0	0-	50	553.797.209	75	1.018.672.256	100	1.079.792.592	125	1.144.580.147	150	1.213.254.956	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.07	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial															
1.07	Dinas Sosial				5.505.639.000		5.626.733.595		5.745.278.172		5.866.400.158		5.990.158.199		6.116.612.359	
1.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	3.938.881.000	100%	4.028.640.435	100%	4.115.223.149	100%	4.203.744.035	100%	4.294.248.952	100%	4.386.784.928	DINAS SOSIAL
1.07.02	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial yang Diberikan oleh Petugas Sumber Kesejahteraan Sosial Terlatih (PSKS) (%)	90 %	90 %	1.013.601.000	90 %	1.033.873.020	90 %	1.054.550.480	90 %	1.075.641.490	90 %	1.097.154.320	100 %	1.119.097.406	DINAS SOSIAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Penangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang tertangani	90 %	90 %	250.000.000	90 %	255.000.000	90 %	260.100.000	90 %	265.302.000	90 %	270.608.040	100 %	276.020.201	DINAS SOSIAL
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi sosial Terlatih (%)	90 %	90 %	9.900.000	90 %	10.098.000	90 %	10.299.960	90 %	10.505.959	90 %	10.716.078	100 %	10.930.400	DINAS SOSIAL
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rasio PMKS dibanding jumlah penduduk yang mendapatkan Bansos (%)	90 %	90 %	110.167.000	90 %	112.370.340	90 %	114.617.747	90 %	116.910.102	90 %	119.248.304	100 %	121.633.270	DINAS SOSIAL
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana alam/sosial yang di tangani (%)	90 %	90 %	33.090.000	90 %	33.751.800	90 %	34.426.836	90 %	35.115.373	90 %	35.817.680	100 %	36.534.034	DINAS SOSIAL
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola	90 %	90 %	150.000.000	90 %	153.000.000	90 %	156.060.000	90 %	159.181.200	90 %	162.364.824	100 %	165.612.120	DINAS SOSIAL
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				3.628.951.000		3.715.876.889		3.794.163.348		3.874.151.921		3.955.881.336		4.039.391.259	
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	2.648.023.000	100%	2.715.330.329	100%	2.773.605.857	100%	2.833.183.280	100%	2.894.093.322	100%	2.956.367.485	BADAN PENANGGULANGAN, BENCANA DAERAH
1.06.02	Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan Indeks Ketangguhan Daerah/IKD	75%	76%	980.928.000	77%	1.000.546.560	80%	1.020.557.491	85%	1.040.968.641	90%	1.061.788.014	95%	1.083.023.774	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Rasio mitigasi dan pengurangan resiko bencana (%)	75%	76%	980.928.000	77%	1.000.546.560	80%	1.020.557.491	85%	1.040.968.641	90%	1.061.788.014	95%	1.083.023.774	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025					
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja																
2.07	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi				7.105.872.000		7.275.173.713		7.428.447.788		7.585.054.365		7.745.069.271		7.908.570.167		
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	3.871.067.000	100%	3.775.672.613	100%	3.862.956.666	100%	3.952.253.421	100%	4.043.612.308	100%	4.137.084.064	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kebutuhan Tenaga kerja (%)	0%	0%	0-	5%	100.000.000	5%	100.000.000	5%	100.000.000	5%	100.000.000	5%	100.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang di latih sesuai dengan standar kompetensi (%)	30%	30%	247.681.000	32%	252.634.620	34%	257.687.312	35%	262.841.059	35%	268.097.880	35%	273.459.837	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang di tempatkan (%)	85%	85%	292.208.000	40%	298.052.160	40%	304.013.203	40%	310.093.467	40%	316.295.337	40%	322.621.243	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan (Kasus)	10%	10%	37.012.000	12%	37.752.240	15%	38.507.285	15%	39.277.430	15%	40.062.979	15%	40.864.239	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
3.32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi																
3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan Perencanaan pembangunan Transmigrasi		2 Kawasan	14.410.000	2 Kawasan	14.698.200	2 Kawasan	14.992.164	2 Kawasan	15.292.007	2 Kawasan	15.597.847	2 Kawasan	15.909.804	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan pembangunan Transmigrasi	0-	2 Kawasan	0-	2 Kawasan	100.000.000	2 Kawasan	100.000.000	2 Kawasan	100.000.000	2 Kawasan	100.000.000	2 Kawasan	100.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Lokasi/kawasan dan KTM yang di kembangkan	2 Lokasi	2 Kawasan	2.643.494.000	2 Kawasan	2.696.363.880	2 Kawasan	2.750.291.158	2 Kawasan	2.805.296.981	2 Kawasan	2.861.402.920	2 Kawasan	2.918.630.979	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak															
2.08	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				3.552.074.000		3.636.137.041		3.712.743.534		3.791.015.613		3.870.991.178		3.952.709.043	
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	2.153.880.000	100%	1.979.979.161	100%	2.023.462.496	100%	2.067.948.955	100%	2.113.463.187	100%	2.160.030.492	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	39%	39,2%	721.612.000	39,4%	736.044.240	39,5%	750.765.125	39,6%	765.780.427	39,8%	781.096.036	40%	796.717.957	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan (%)	100%	100%	163.827.000	100%	167.103.540	100%	170.445.611	100%	173.854.523	100%	177.331.613	100%	180.878.246	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase ketersediaan unit layanan informasi & konseling keluarga (%)	100%	100%	-	100%	120.000.000	100%	122.400.000	100%	124.848.000	100%	127.344.960	100%	129.891.859	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase ketersediaan data gender dan anak di tingkat kabupaten (%)	100%	100%	-	100%	110.000.000	100%	112.200.000	100%	114.444.000	100%	116.732.880	100%	119.067.538	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Jumlah forum anak daerah yang dibentuk	11	13	434.445.000	15	443.133.900	17	451.996.578	20	461.036.510	23	470.257.240	26	479.662.385	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap anak yang dilaporkan (%)	100%	100%	78.310.000	100%	79.876.200	100%	81.473.724	100%	83.103.198	100%	84.765.262	100%	86.460.568	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan															
2.09	Dinas Ketahanan Pangan				4.288.093.000		4.390.041.053		4.482.530.869		4.577.031.610		4.673.589.030		4.772.249.993	
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	2.187.647.000	100%	2.247.586.133	100%	2.297.226.851	100%	2.348.021.511	100%	2.399.998.730	100%	2.453.187.886	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase meningkatnya jumlah ketersediaan dan Cadangan pangan masyarakat (%)	75%	75%	1.050.000.000	80%	1.071.000.000	85%	1.092.420.000	90%	1.114.268.400	95%	1.136.553.768	100%	1.159.284.843	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan kecukupan gizi dan keamanan pangan (%)	75%	75%	890.876.000	80%	908.693.520	85%	926.867.390	90%	945.404.738	95%	964.312.833	100%	983.599.090	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase menurunnya desa yang masuk rentan/sangat rentan/rawan pangan dan jumlah stunting (%)	80%	80%	159.570.000	80%	81.380.700	85%	83.008.314	90%	84.668.480	95%	86.361.850	100%	88.089.087	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Keamanan Pangan	0%	0%	-	80%	81.380.700	85%	83.008.314	90%	84.668.480	95%	86.361.850	100%	88.089.087	DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup															
2.11	Dinas Lingkungan Hidup				4.265.222.000		5.041.008.171		5.147.212.627		5.255.726.191		5.366.601.406		5.479.892.083	
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	3.851.782.000	100%	3.928.817.640	100%	4.081.069.651	100%	4.144.860.356	100%	4.210.718.254	100%	4.278.691.267	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen yang tertangani (%)	25%	25%	38.000.000	40%	38.760.000	50%	39.535.200	60%	40.325.904	70%	41.132.422	80%	41.955.071	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (%)	30%	-	-	30%	300.000.000	40%	306.000.000	50%	312.120.000	60%	318.362.400	75%	324.729.648	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase hutan kota dan RTH yang terkelola (%)	80%	80%	93.595.000	30%	95.466.900	50%	97.376.238	50%	99.323.763	56%	101.310.238	70%	103.336.443	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai Peraturan perundangan (sektor industri) (%)	5%	-	-	5%	50.000.000	20%	55.000.000	35%	60.000.000	40%	65.000.000	70%	70.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase produk ramah lingkungan yang teregister (%)	45%	-	-	45%	50.000.000	55%	55.000.000	65%	60.000.000	70%	65.000.000	80%	70.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang	Persentase pelestarian masyarakat hukum adat (MHA) dan kearifan lokal (%)	35%	-	-	35%	50.000.000	45%	55.000.000	55%	60.000.000	65%	65.000.000	75%	70.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat (%)	40%	-	-	40%	50.000.000	50%	55.000.000	60%	60.000.000	70%	65.000.000	80%	70.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase program penghargaan LH untuk masyarakat (%)	50%	-	-	50%	50.000.000	55%	55.000.000	60%	60.000.000	75%	65.000.000	80%	70.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	50%	-	-	50%	50.000.000	55%	55.000.000	65%	60.000.000	70%	65.000.000	75%	70.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah perkotaan yang tertangani (%)	80%	80%	281.845.000	80%	287.481.900	82%	293.231.538	80%	299.096.169	70%	305.078.092	75%	311.179.654	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil															
2.12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				6.048.047.000		6.192.161.604		6.322.618.674		6.455.912.155		6.592.106.588		6.731.268.072	
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	4.726.210.000	100%	4.843.887.864	100%	4.947.379.458	100%	5.053.168.156	100%	5.161.307.709	100%	5.271.853.215	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Jasa Pendaftaran Penduduk	95%	95%	547.179.000	96%	558.122.580	97%	569.285.032	98%	580.670.732	99%	592.284.147	100%	604.129.830	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Tersedianya Jasa pencatatan sipil	95%	95%	432.378.000	96%	441.025.560	97%	449.846.071	98%	458.842.993	99%	468.019.852	100%	477.380.250	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya Jasa Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	95%	95%	334.845.000	96%	341.541.900	97%	348.372.738	98%	355.340.193	99%	362.446.997	100%	369.695.937	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Tersedianya Jasa profil kependudukan	95%	95%	7.435.000	96%	7.583.700	97%	7.735.374	98%	7.890.081	99%	8.047.883	100%	8.208.841	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa															
2.13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				4.891.354.000		4.752.494.905		4.852.620.935		4.954.923.916		5.059.453.382		5.166.260.065	
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	3.301.342.000	100%	2.926.118.665	100%	2.989.717.170	100%	3.054.762.076	100%	3.121.288.305	100%	3.189.331.687	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase peningkatan desa yang memiliki infrastruktur dasar memadai (%)	80%	80%	-	83%	204.564.000	86%	208.655.280	90%	212.828.386	94%	217.084.953	96%	221.426.652	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang memiliki kelompok kegiatan masyarakat produktif (%) & Persentase desa yang memiliki kelompok usaha ekonomi produktif (%)	75%	75 & 70	104.964.000	78 & 74	107.063.280	84 & 79	109.204.546	89 & 85	111.388.637	94 & 89	113.616.409	96 & 90	115.888.737	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang memiliki Aparatur terampil dan mampu mengelola keuangan desa dengan baik dan benar (%)	75%	75%	1.160.164.000	78%	1.183.367.280	84%	1.207.034.626	89%	1.231.175.318	94%	1.255.798.824	96%	1.280.914.801	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan keterampilan Tenaga Kerja Perempuan/Ibu Rumah Tangga/PKK yang memiliki standar kualifikasi/kompetensi (%)	60%	60%	324.884.000	65%	331.381.680	70%	338.009.314	75%	344.769.500	80%	351.664.890	85%	358.698.188	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana															
2.14	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				12.868.684.000		12.832.316.169		13.102.668.668		13.378.899.201		13.661.141.515		13.949.532.592	
2.14.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	7.058.463.000	100%	7.199.632.260	100%	7.343.624.905	100%	7.490.497.403	100%	7.640.307.351	100%	7.793.113.498	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Presentase Pengendalian Penduduk (%)	50%	60%	34.538.000	70%	35.228.760	80%	35.933.335	85%	36.652.002	90%	37.385.042	100%	38.132.743	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Presentase Pembinaan Keleuarga Berencana (KB) (%)	50%	60%	5.213.308.000	70%	5.023.832.649	80%	5.138.015.477	85%	5.254.952.947	90%	5.374.716.335	100%	5.497.378.909	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (%)	50%	60%	562.375.000	70%	573.622.500	80%	585.094.950	85%	596.796.849	90%	608.732.786	100%	620.907.442	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan															
2.15	Dinas Perhubungan				7.414.538.000		7.772.460.398		7.936.211.358		8.103.522.609		8.274.475.162		8.449.151.986	
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	3.974.074.000	100%	4.263.187.118	100%	4.356.752.612	100%	4.452.474.689	100%	4.550.406.283	100%	4.650.601.729	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Pembangunan /Pengadaan Sarana dan Prasanana Lalulintas Jalan yang Terlaksana	23%	25%	3.276.883.000	35%	3.342.420.660	45%	3.409.269.073	55%	3.477.454.455	65%	3.547.003.544	75%	3.617.943.615	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah Fasilitas, dan pembangunan sarana dan prasarana Angkutan Pelayaran Rakyat yang Terlaksana	11%	15%	163.581.000	35%	166.852.620	45%	170.189.672	55%	173.593.466	65%	177.065.335	75%	180.606.642	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.16	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian				4.714.917.000		4.898.926.261		5.002.137.321		5.107.592.407		5.215.342.580		5.325.440.134	
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	3.049.311.000	100%	3.110.297.220	100%	3.172.503.164	100%	3.235.953.228	100%	3.300.672.292	100%	3.366.685.738	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Pelaksanaan Program Informasi dan Komunikasi Publik (%)	70%	70%	701.754.000	70%	715.789.080	75%	730.104.862	75%	744.706.959	80%	759.601.098	80%	774.793.120	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Pengelolaan Aplikasi informatika yang terintegrasi (%)	70%	70%	840.631.325	70%	947.154.873	75%	971.330.505	75%	996.169.455	80%	1.021.691.169	100%	1.047.915.695	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik															
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang data sektorannya terintegrasi dengan pemerintah daerah (%)	70%	70%	93.220.675	70%	95.085.089	75%	96.986.790	75%	98.926.526	80%	100.905.057	100%	102.923.158	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian															
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan keamanan informasi (%)	70%	70%	30.000.000	70%	30.600.000	75%	31.212.000	75%	31.836.240	80%	32.472.965	100%	33.122.424	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah															
2.17	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah				4.328.101.000		4.250.858.774		4.340.416.284		4.431.920.964		4.525.417.119		4.620.950.126	
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	2.936.080.000	100%	2.830.997.354	100%	2.892.157.636	100%	2.954.697.143	100%	3.018.648.822	100%	3.084.046.462	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.17.04	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi	100%	5%	127.291.000	5%	129.836.820	5%	132.433.556	5%	135.082.228	5%	137.783.872	100%	140.539.550	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pertumbuhan Koperasi	100%	5%	82.617.000	5%	84.269.340	5%	85.954.727	5%	87.673.821	5%	89.427.298	100%	91.215.844	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi	100%	5%	38.490.000	5%	39.259.800	5%	40.044.996	5%	40.845.896	5%	41.662.814	100%	42.496.070	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertumbuhan UMKM Mandiri	100%	5%	125.793.000	5%	128.308.860	5%	130.875.037	5%	133.492.538	5%	136.162.389	100%	138.885.636	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Pertumbuhan UMKM Mandiri	100%	5%	1.005.000.000	5%	1.025.100.000	5%	1.045.602.000	5%	1.066.514.040	5%	1.087.844.321	100%	1.109.601.207	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.27.09	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Pertumbuhan KSP/USP	5	5	120.830.000	10	130.086.600	15	130.348.332	20	130.615.299	25	130.887.605	25	140.165.357	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal															
2.18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				4.701.586.000		4.813.387.152		4.914.796.066		5.018.409.823		5.124.278.593		5.232.453.757	
2.18.01	Program Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Perizinan	75	89,51	4.071.392.000	90	3.920.589.272	90	4.009.142.228	95	4.099.642.909	100	4.192.136.340	100	4.286.668.660	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal (PMDN dan PMA) (%)	15	10		15										DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Meningkatnya Perkembangan Iklim penanaman Modal (%)	56	10	-	60	125.000.000	20 & 65	125.000.000	25 & 70	125.000.000	30 & 80	125.000.000	35 & 85	125.000.000	
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal (PMDN dan PMA) (%)	15	15	248.443.000	15	253.411.860	20	258.480.097	25	263.649.699	30	268.922.693	35	274.301.147	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Persentase Penyelesaian Izin (%))	75	85	-	85	125.000.000	85	125.000.000	90	125.000.000	90	125.000.000	90	125.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (%)	50	65		70										DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Meningkatnya Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	30	30	347.572.000	35	354.523.440	65	361.613.909	75	368.846.187	85	376.223.111	95	383.747.573	
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terlaksananya Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal (%)	0	70	34.179.000	75	34.862.580	75	35.559.832	80	36.271.028	80	36.996.449	85	37.736.378	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga															
2.19	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga				4.523.203.000		4.529.223.332		4.624.645.454		4.722.142.255		4.821.760.941		4.923.549.861	
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	2.651.817.000	100%	2.620.409.612	100%	2.677.655.460	100%	2.736.212.461	100%	2.796.112.552	100%	2.857.388.503	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Terlaksananya Seleksi Paskibaraka Nasional dan Paskibraka Daerah	1 Keg	2 Keg	1.461.708.000	2 Keg	1.490.942.160	2 Keg	1.520.761.003	2 Keg	1.551.176.223	2 Keg	1.582.199.748	2 Keg	1.613.843.743	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Terlaksananya Kegiatan Keolahragaan	0 Keg	3 Keg	334.678.000	3 Keg	341.371.560	3 Keg	348.198.991	3 Keg	355.162.971	3 Keg	362.266.230	3 Keg	369.511.555	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Terlaksananya Kegiatan Kepramukaan	0 Keg	1 Keg	75.000.000	1 Keg	76.500.000	1 Keg	78.030.000	1 Keg	79.590.600	1 Keg	81.182.412	1 Keg	82.806.060	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan															
2.23	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah				3.031.932.000		3.125.802.018		3.191.656.722		3.258.943.247		3.327.694.171		3.397.942.862	
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	2.690.625.000	100%	2.402.668.878	100%	2.454.060.920	100%	2.506.595.528	100%	2.560.299.498	100%	2.615.200.295	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Kunjungan ke Perpustakaan (%)	0.31%	0.31%	321.228.000	0.33%	327.652.560	0.35%	334.205.611	0.39%	340.889.723	0.44%	347.707.518	0.50%	354.661.668	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno yang disimpan (Buah)	4	4	120.000.000	10	125.000.000	15	127.500.000	20	130.050.000	25	132.651.000	30	135.304.020	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan															
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase SKPD yang menerapkan Arsip Secara Baik (%)	25%	25%	120.000.000	40%	125.000.000	55%	127.500.000	70%	130.050.000	85%	132.651.000	100%	135.304.020	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Jumlah Arsip yang disimpan di Depo Arsip (Buah)	35	35	20.079.000	70	20.480.580	110	20.890.192	160	21.307.995	220	21.734.155	300	22.168.838	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.24.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah Pengguna Arsip	5	5	120.000.000	10	125.000.000	20	127.500.000	30	130.050.000	40	132.651.000	50	135.304.020	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

3	Urusan Pemerintahan Pilihan															
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan															
3.25	Dinas Perikanan				8.835.474.000		9.007.703.125		9.197.478.300		9.391.379.588		9.589.500.874		9.791.938.312	
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	4.613.653.000	100%	4.576.445.705	100%	4.677.595.731	100%	4.781.099.368	100%	4.887.015.049	100%	4.995.402.771	DINAS PERIKANAN
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	8.657,959 Ton	8.700 Ton	1.637.486.000	8.800 Ton	1.670.235.720	8900 Ton	1.703.640.434	8950 Ton	1.737.713.243	9.050 Ton	1.772.467.508	8600 Ton	1.807.916.858	DINAS PERIKANAN
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	53.257,90 Ton	54.257 Ton	2.471.710.000	55.257 Ton	2.521.144.200	56.257 Ton	2.571.567.084	57.257 Ton	2.622.998.426	58.257 Ton	2.675.458.394	59.257 Ton	2.728.967.562	DINAS PERIKANAN
3.25.05	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya jumlah produk olahan hasil perikanan (Ton)	85 Ton	90 Ton	237.625.500	5 Ton	239.877.500	105 Ton	244.675.050	115 Ton	249.568.551	125 Ton	254.559.922	135 Ton	259.651.120	DINAS PERIKANAN
3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata															
3.26	Dinas Pariwisata				6.554.410.000		6.608.258.626		6.747.482.068		6.889.732.522		7.035.078.864		7.183.591.634	
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	3.696.947.000	100%	3.693.646.366	100%	3.774.577.563	100%	3.857.369.928	100%	3.942.069.017	100%	4.028.721.590	DINAS PARIWISATA
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang memiliki fasilitas memadai (%)	80%	25%	1.895.519.000	25%	1.933.429.380	25%	1.972.097.968	25%	2.011.539.927	25%	2.051.770.725	100%	2.092.806.140	DINAS PARIWISATA
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kegiatan promosi wisata daerah (Kegiatan)	2 Keg	3 Keg	722.416.000	3 Keg	736.864.320	3 Keg	751.601.606	4 Keg	766.633.639	4 Keg	781.966.311	4 Keg	797.605.638	DINAS PARIWISATA
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Peningkatan Jumlah jenis produk kreatif (Produk)	1 Produk	1 Produk	111.451.000	1 Produk	113.680.020	1 Produk	115.953.620	1 Produk	118.272.693	1 Produk	120.638.147	5 Produk	123.050.910	DINAS PARIWISATA
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan jumlah kelompok kreatif (Kelompok)	10 Klp	1 Klp	128.077.000	1 Klp	130.638.540	1 Klp	133.251.311	1 Klp	135.916.337	1 Klp	138.634.664	15 Klpk	141.407.357	DINAS PARIWISATA

3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian															
3.27	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan				23.406.999.000		23.324.630.270		23.816.035.874		24.318.125.674		24.831.142.774		25.355.336.159	
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	13.034.651.000	100%	12.900.420.530	100%	13.183.341.940	100%	13.472.777.860	100%	13.768.888.004	100%	14.071.836.295	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Provitas/Luas Areal	Padi (Kuintal/Ha)	35,00	2.744.744.000	37,50	2.758.467.720	39,00	2.813.637.074	42,50	2.869.909.816	45,00	2.927.308.012	50	2.985.854.172	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Jagung (Kuintal/Ha)	42,50		45,00		47,50		50,00		52,50		53		
			Kedelei (Kuintal/Ha)	18,00		20,00		22,00		24,00		25,00		25		
			Peorang (Ha)	200		500		900		1.500		2.000		2.500		
			Kelapa Sawit (Ha)	3.672		4.172		4.672		5.172		5.672		6.000		
			Kelapa (Ha)	7.086		7.586		8.086		8.586		9.086		9.300		
			Nilam (Ha)	3.182		3.482		3.882		4.382		4.982		5.000		
			Kopi (Ha)	1.341		1.541		1.741		2.041		2.341		2.500		
			Nenas (Kuintal)	7.000		7.500		8.000		8.500		9.000		9.500		
			Jeruk (Kuintal)	220.000		230.000		240.000		250.000		260.000		270.000		
			Cabe (Ha)	250		275		300		325		350		400		
			3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Peningkatan Provitas/Luas Areal		Padi (Kuintal/Ha)		35,00		7.572.820.000		37,50		
Jagung (Kuintal/Ha)	42,50	45,00			47,50		50,00	52,50	53							
Kedelei (Kuintal/Ha)	18,00	20,00			22,00		24,00	25,00	25							
Porang (Ha)	200	500			900		1.500	2.000	2.500							
Kelapa Sawit (Ha)	3.672	4.172			4.672		5.172	5.672	6.000							
Kelapa (Ha)	7.086	7.586			8.086		8.586	9.086	9.300							
Nilam (Ha)	3.182	3.482			3.882		4.382	4.982	5.000							
Kopi (Ha)	1.341	1.541			1.741		2.041	2.341	2.500							

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Nenas (Kuintal)	7.000		7.500		8.000		8.500		9.000		9.500		
			Jeruk (Kuintal)	220.000		230.000		240.000		250.000		260.000		270.000		
			Cabe (Ha)	250		275		300		325		350		400		
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani Madya	%	4,46	54.784.000	6,73	55.057.920	8,96	56.159.078	11,20	57.282.260	13,45	58.427.905	15,68	59.596.463	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan				7.613.749.000		7.756.512.428		7.919.927.395		8.086.895.348		8.257.497.131		8.431.815.543	
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	5.906.035.000	100%	6.014.644.148	100%	6.143.221.749	100%	6.274.655.589	100%	6.409.012.577	100%	6.546.361.298	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Populasi Ternak, Ketersediaan Daging dan telur serta Sarana Peternakan(%)	100%	25%	1.035.029.000	25%	1.055.729.580	25%	1.076.844.172	25%	1.098.381.055	25%	1.120.348.676	100%	1.142.755.650	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Peternakan yang tersedia (Paket)	1 Paket	1 Paket	233.677.000	1 Paket	238.350.540	1 Paket	243.117.551	1 Paket	247.979.902	1 Paket	252.939.500	1 Paket	257.998.290	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan Pencegahan Penyakit Hewan dan Peningkatan Penyediaan Produk Hewan yang asuh (%)	42,29%	15%	412.823.000	20%	421.079.460	20%	429.501.049	20%	438.091.070	20%	446.852.892	100%	455.789.949	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Jumlah Kelompok Peternakan (Kelompok)	9 Klp	1 Klp	26.185.000	2 Klp	26.708.700	2 Klp	27.242.874	2 Klp	27.787.731	2 Klp	28.343.486	2 Klp	28.910.356	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan															
3.30	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan				6.178.195.000		6.976.511.739		7.123.493.575		7.273.671.105		7.427.117.045		7.583.905.868	
3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	3.736.021.000	100%	3.810.741.420	100%	3.886.956.248	100%	3.964.695.373	100%	4.043.989.281	100%	4.124.869.066	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Jumlah Pasar yang Representatif (%)	100%	100%	625.396.000	100%	1.312.656.759	100%	1.346.361.495	100%	1.380.996.384	100%	1.416.588.830	100%	1.453.167.087	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase peningkatan ekspor	100%	100%	237.702.000	100%	242.456.040	100%	247.305.161	100%	252.251.264	100%	257.296.289	100%	262.442.215	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06	Progra Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase penurunan temuan barang & jasa yang tidak sesuai UU Perlindungan Konsumen (%)	100%	50%	42.402.000	40%	43.250.040	40%	44.115.041	30%	44.997.342	20%	45.897.288	10%	46.815.234	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian															
3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	1.063.241.000	100%	1.084.505.820	100%	1.106.195.936	100%	1.128.319.855	100%	1.150.886.252	100%	1.173.903.977	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan industri	100%	100%	473.433.000	100%	482.901.660	100%	492.559.693	100%	502.410.887	100%	512.459.105	100%	522.708.287	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan															
4.01	Sekretariat Daerah				34.496.568.000		34.211.294.162		34.932.061.072		35.668.498.976		36.420.964.448		37.189.822.685	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	28.426.799.000	100%	28.020.129.782	100%	28.617.073.405	100%	29.227.211.555	100%	29.850.851.278	100%	30.488.307.252	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02 P	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi pengadministrasian, pengembangan dan penyelenggaraan pemerintahan umum (%)	70%	70%	4.226.799.000	75%	4.311.334.980	80%	4.397.561.680	85%	4.485.512.913	90%	4.575.223.171	100%	4.666.727.635	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase fasilitasi perencanaan dan penataan administrasi pembangunan (%)	100%	100%	1.842.970.000	100%	1.879.829.400	100%	1.917.425.988	100%	1.955.774.508	100%	1.994.889.998	100%	2.034.787.798	SEKRETARIAT DAERAH
4.02	Sekretariat DPRD				42.216.245.000		43.220.447.102		44.131.019.732		45.061.390.133		46.012.008.779		46.983.337.037	
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	33.919.165.000	100%	34.757.425.502	100%	35.498.737.700	100%	36.256.462.460	100%	37.030.982.552	100%	37.822.690.286	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase terselenggaranya Fungsi DPRD (Penyusunan Perda, Anggaran & Pengawasan)	100%	100%	8.297.080.000	100%	8.463.021.600	100%	8.632.282.032	100%	8.804.927.673	100%	8.981.026.226	100%	9.160.646.751	SEKRETARIAT DPRD
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan															
5.01	Perencanaan															
5.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				6.892.259.000		7.056.251.587		7.204.913.389		7.356.807.413		7.512.007.203		7.670.588.084	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	4.585.983.000	100%	4.703.850.067	100%	4.805.463.838	100%	4.909.368.871	100%	5.015.619.891	100%	5.124.273.025	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kelengkapan Dokumen utama Perencanaan (RPJMD, RKPD, RKPD-P) (%)	100%	100%	775.549.000	100%	791.059.980	100%	806.881.180	100%	823.018.803	100%	839.479.179	100%	856.268.763	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Ketersediaan Dokumen Sektoral Perencanaan Pembangunan Daerah (Bidang Pemerintahan, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur) (Dokumen)	3	3	1.530.727.000	3	1.561.341.540	3	1.592.568.371	3	1.624.419.738	3	1.656.908.133	21	1.690.046.296	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5.02	Keuangan															
5.02	Badan Keuangan Dan Aset Daerah				385.553.653.000		387.664.691.900		395.832.049.753		404.176.983.205		412.703.532.767		421.415.836.669	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	37.299.694.000	100%	32.445.653.720	100%	33.508.630.809	100%	34.607.095.883	100%	35.742.247.698	100%	36.915.325.899	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya pengelolaan keuangan daerah (%)	100%	100%	347.097.129.000	100%	354.039.071.580	100%	361.119.853.012	100%	368.342.250.072	100%	375.709.095.073	100%	383.223.276.975	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkatnya pengelolaan barang milik daerah (%)	100%	100%	1.156.830.000	100%	1.179.966.600	100%	1.203.565.932	100%	1.227.637.251	100%	1.252.189.996	100%	1.277.233.796	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02	Badan Pendapatan Daerah				6.705.792.000		7.350.564.114		7.505.426.522		7.663.655.965		7.825.329.057		7.990.524.262	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	5.813.774.000	100%	5.930.049.480	100%	6.048.650.470	100%	6.169.623.479	100%	6.293.015.949	100%	6.418.876.268	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Peningkatan Penerimaan PAD (Kegiatan)	4 Keg.	4 Keg.	892.018.000	4 Keg.	1.420.514.634	5 Keg.	1.456.776.053	5 Keg.	1.494.032.486	6 Keg.	1.532.313.108	30 Keg.	1.571.647.995	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.03	Kepegawaian															
5.03	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				5.965.651.000		6.458.927.639		6.595.004.961		6.734.040.892		6.876.102.751		7.021.259.485	
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	4.480.839.000	100%	4.570.455.780	100%	4.661.864.896	100%	4.755.102.194	100%	4.850.204.237	100%	4.947.208.322	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian (%)	100%	100%	348.962.000	100%	355.941.240	100%	363.060.065	100%	370.321.266	100%	377.727.691	100%	385.282.245	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04	Pendidikan Dan Pelatihan															
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi (%)	100%	100%	1.135.850.000	100%	1.532.530.619	100%	1.570.080.001	100%	1.608.617.432	100%	1.648.170.822	100%	1.688.768.917	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.05	Penelitian dan Inovasi															
5.05	Badan Riset dan Inovasi Daerah				6.655.787.000		6.199.410.681		6.330.020.475		6.463.470.001		6.599.823.875		6.739.148.273	
5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	2.835.787.000	100%	2.892.502.740	100%	2.950.352.795	100%	3.009.359.851	100%	3.069.547.048	100%	3.130.937.989	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi Daerah		11	3.820.000.000	13	3.306.907.941	14	3.379.667.680	62.67	3.454.110.150	70.30	3.530.276.827	75,50	3.608.210.284	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan															
6.01	Inspektorat Daerah				8.383.860.000		8.582.907.210		8.763.732.743		8.948.489.805		9.137.267.853		9.330.158.507	
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	5.918.155.000	100%	6.036.518.100	100%	6.157.248.462	100%	6.280.393.431	100%	6.406.001.300	100%	6.534.121.326	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti (%)	86%	100%	1.641.863.000	100%	1.706.070.270	100%	1.749.359.064	100%	1.793.828.653	100%	1.839.513.478	100%	1.886.449.044	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Maturitas SPIP	3	3	823.842.000	3	840.318.840	3	857.125.217	4	874.267.721	4	891.753.076	4	909.588.137	INSPEKTORAT DAERAH
8.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				4.000.566.000		4.095.728.525		4.182.017.737		4.270.183.057		4.360.267.177		4.452.313.815	
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	2.136.473.000	100%	2.034.353.665	100%	2.075.040.738	100%	2.116.541.553	100%	2.158.872.384	100%	2.202.049.832	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Koordinasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan(%)	75%	75%	91.732.000	80%	93.566.640	83%	99.812.614	85%	106.333.832	86%	113.140.967	90%	120.245.081	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Koordinasi, Pemantauan Peran Partai Politik dan Situasi Perkembangan Politik Daerah (%)	75%	75%	1.539.971.000	80%	1.570.770.420	85%	1.602.185.828	90%	1.634.229.545	93%	1.666.914.136	97%	1.700.252.419	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas / LSM yang Aktif (%)	-	70%	160.000.000	75%	163.200.000	80%	166.464.000	85%	169.793.280	90%	173.189.146			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Koordinasi Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	75%	75%	133.188.000	80%	135.851.760	85%	138.568.795	90%	141.340.171	93%	144.166.975	97%	147.050.314	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Koordinasi Pemantapan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial (%)	75%	75%	99.202.000	80%	101.186.040	85%	103.209.761	85%	105.273.956	86%	107.379.435	90%	109.527.024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Unsur Kewilayahan															
7.01	Kecamatan Palangga				2.443.260.020		2.535.282.698		2.485.229.922		2.540.091.459		2.591.404.511		2.646.238.293	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	2.300.116.920	100%	2.389.876.736	100%	2.336.915.841	100%	2.388.811.096	100%	2.437.098.541	100%	2.488.846.203	KECAMATAN PALANGGA
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.200.000	80%	10.404.000	90%	10.612.080	100%	10.824.322	100%	11.040.808	KECAMATAN PALANGGA
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	60%	60%	103.143.100	70%	105.205.962	80%	107.310.081	90%	109.456.283	100%	111.645.409	100%	113.878.317	KECAMATAN PALANGGA
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN PALANGGA
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN PALANGGA
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN PALANGGA
7.01	Kecamatan Landono				2.912.261.057		2.908.591.373		2.973.790.597		3.038.423.351		3.099.703.041		3.164.702.783	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	2.862.261.057	100%	2.858.191.373	100%	2.922.382.597	100%	2.985.987.191	100%	3.046.218.158	100%	3.110.148.202	KECAMATAN LANDONO
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.200.000	80%	10.404.000	90%	10.612.080	100%	10.824.322	100%	11.040.808	KECAMATAN LANDONO
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.200.000	80%	10.404.000	90%	10.612.080	100%	10.824.322	100%	11.040.808	KECAMATAN LANDONO
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN LANDONO
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN LANDONO
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN LANDONO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01	Kecamatan Lainea				1.892.703.300		2.908.591.373		2.973.790.597		3.038.423.351		3.125.264.222		3.164.702.783	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	1.842.703.300	100%	2.858.191.373	100%	2.922.382.597	100%	2.985.987.191	100%	3.071.779.339	100%	3.110.148.202	KECAMATAN LAINEA
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan PelayananPublik	Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.200.000	80%	10.404.000	90%	10.612.080	100%	10.824.322	100%	11.040.808	KECAMATAN LAINEA
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.200.000	80%	10.404.000	90%	10.612.080	100%	10.824.322	100%	11.040.808	KECAMATAN LAINEA
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN LAINEA
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN LAINEA
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN LAINEA
7.01	Kecamatan Tinanggea				3.820.250.610		3.834.740.717		3.918.462.928		3.943.297.859		4.082.540.135		4.167.196.618	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	3.637.950.610	100%	3.649.394.717	100%	3.729.410.008	100%	3.750.463.881	100%	3.885.849.477	100%	3.966.572.147	KECAMATAN TINANGGEEA
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan PelayananPublik	Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.200.000	80%	10.404.000	90%	10.612.080	100%	10.824.322	100%	11.040.808	KECAMATAN TINANGGEEA
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	60%	60%	142.300.000	70%	145.146.000	80%	148.048.920	90%	151.009.898	100%	154.030.096	100%	157.110.698	KECAMATAN TINANGGEEA
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN TINANGGEEA
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN TINANGGEEA
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN TINANGGEEA

7.01	Kecamatan Ranomeeto				4.154.999.536		4.176.184.626		4.266.735.710		4.357.227.367		4.419.321.949		4.536.786.481	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	4.028.619.899	100%	4.047.877.396	100%	4.135.862.336	100%	4.223.736.525	100%	4.283.161.290	100%	4.397.902.609	KECAMATAN RANOMEETO
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik (%)	60%	60%	12.153.300	70%	12.396.366	80%	12.644.293	90%	12.897.179	100%	13.155.123	100%	13.418.225	KECAMATAN RANOMEETO
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	60%	60%	84.226.337	70%	85.910.864	80%	87.629.081	90%	89.381.663	100%	91.169.296	100%	92.992.682	KECAMATAN RANOMEETO
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN RANOMEETO
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN RANOMEETO
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN RANOMEETO
7.01	Kecamatan Konda				4.410.508.500		4.436.803.765		4.532.567.236		4.628.375.523		4.721.454.257		4.818.889.023	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	4.288.224.500	100%	4.312.674.085	100%	4.405.954.963	100%	4.499.231.004	100%	4.589.726.848	100%	4.684.527.065	KECAMATAN KONDA
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik (%)	60%	60%	11.464.000	70%	11.693.280	80%	11.927.146	90%	12.165.689	100%	12.409.002	100%	12.657.182	KECAMATAN KONDA
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	60%	60%	80.820.000	70%	82.436.400	80%	84.085.128	90%	85.766.831	100%	87.482.167	100%	89.231.811	KECAMATAN KONDA
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN KONDA
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN KONDA
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN KONDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01	Kecamatan Kolono				2.325.739.081		2.310.338.958		2.363.573.133		2.416.001.538		2.464.832.792		2.517.135.129	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	2.186.139.081	100%	2.168.546.958	100%	2.218.945.293	100%	2.268.481.141	100%	2.314.361.987	100%	2.363.654.908	KECAMATAN KOLONO
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Umum Pemerinttahan Kecamatan dan Pelayanan Publik (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.200.000	80%	10.404.000	90%	10.612.080	100%	10.824.322	100%	11.040.808	KECAMATAN KOLONO
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	60%	60%	99.600.000	70%	101.592.000	80%	103.623.840	90%	105.696.317	100%	107.810.243	100%	109.966.448	KECAMATAN KOLONO
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN KOLONO
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN KOLONO
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN KOLONO
7.01	Kecamatan Moramo				2.663.335.685		2.654.687.494		2.714.808.640		2.774.261.755		2.830.258.213		2.889.869.058	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	2.613.335.685	100%	2.604.287.494	100%	2.663.400.640	100%	2.721.825.595	100%	2.776.773.330	100%	2.835.314.477	KECAMATAN MORAMO
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Umum Pemerinttahan Kecamatan dan Pelayanan Publik (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.200.000	80%	10.404.000	90%	10.612.080	100%	10.824.322	100%	11.040.808	KECAMATAN MORAMO
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.200.000	80%	10.404.000	90%	10.612.080	100%	10.824.322	100%	11.040.808	KECAMATAN MORAMO
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN MORAMO
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN MORAMO
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN MORAMO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01	Kecamatan Andoolo				3.044.684.816		3.043.663.607		3.111.564.276		3.178.952.503		3.243.042.777		3.310.909.313	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	2.878.684.816	100%	2.874.943.607	100%	2.939.469.876	100%	3.003.416.215	100%	3.063.995.763	100%	3.128.281.359	KECAMATAN ANDOOLO
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Umum Pemerinttahan Kecamatan dan Pelayanan Publik (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.200.000	80%	10.404.000	90%	10.612.080	100%	10.824.322	100%	11.040.808	KECAMATAN ANDOOLO
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	60%	60%	126.000.000	70%	128.520.000	80%	131.090.400	90%	133.712.208	100%	136.386.452	100%	139.114.181	KECAMATAN ANDOOLO
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN ANDOOLO
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN ANDOOLO
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN ANDOOLO
7.01	Kecamatan Angata				3.775.164.930		3.788.753.324		3.871.555.786		3.954.143.844		4.033.737.945		4.117.418.384	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	3.702.757.430	100%	3.715.497.674	100%	3.796.835.023	100%	3.877.928.666	100%	3.955.998.463	100%	4.038.124.113	KECAMATAN ANGATA
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Umum Pemerinttahan Kecamatan dan Pelayanan Publik (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.200.000	80%	10.404.000	90%	10.612.080	100%	10.824.322	100%	11.040.808	KECAMATAN ANGATA
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	60%	60%	32.407.500	70%	33.055.650	80%	33.716.763	90%	34.391.098	100%	35.078.920	100%	35.780.499	KECAMATAN ANGATA
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN ANGATA
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN ANGATA
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN ANGATA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01	Kecamatan Laonti				1.871.195.133		1.846.704.131		1.890.665.609		1.933.635.864		1.972.819.805		2.015.281.881	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	1.821.777.773	100%	1.796.898.423	100%	1.839.863.788	100%	1.881.818.006	100%	1.919.965.590	100%	1.961.370.582	KECAMATAN LAONTI
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Umum Pemerintah Kecamatan dan Pelayanan Publik (%)	60%	60%	9.417.360	70%	9.605.707	80%	9.797.821	90%	9.993.778	100%	10.193.653	100%	10.397.526	KECAMATAN LAONTI
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.200.000	80%	10.404.000	90%	10.612.080	100%	10.824.322	100%	11.040.808	KECAMATAN LAONTI
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN LAONTI
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN LAONTI
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN LAONTI
7.01	Kecamatan Lalembuu				2.060.009.648		2.039.294.936		2.087.108.231		2.134.007.338		2.177.198.708		2.223.748.363	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	1.984.173.645	100%	1.962.542.213	100%	2.008.820.453	100%	2.054.153.804	100%	2.095.748.104	100%	2.140.668.747	KECAMATAN LALEMBUU
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Umum Pemerintah Kecamatan dan Pelayanan Publik (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.200.000	80%	10.404.000	90%	10.612.080	100%	10.824.322	100%	11.040.808	KECAMATAN LALEMBUU
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	60%	60%	35.836.003	70%	36.552.723	80%	37.283.778	90%	38.029.453	100%	38.790.042	100%	39.565.843	KECAMATAN LALEMBUU
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN LALEMBUU
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN LALEMBUU
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN LALEMBUU

7.01	Kecamatan Mowila				2.491.921.344		2.479.844.866		2.536.469.159		2.592.355.485		2.644.713.818		2.700.613.775	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	2.441.921.344	100%	2.429.444.866	100%	2.485.061.159	100%	2.539.919.325	100%	2.591.228.935	100%	2.646.059.194	KECAMATAN MOWILA
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.200.000	80%	10.404.000	90%	10.612.080	100%	10.824.322	100%	11.040.808	KECAMATAN MOWILA
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.200.000	80%	10.404.000	90%	10.612.080	100%	10.824.322	100%	11.040.808	KECAMATAN MOWILA
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN MOWILA
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN MOWILA
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN MOWILA
7.01	Kecamatan Buke				1.910.307.578		1.886.598.825		1.931.358.197		1.975.142.303		2.015.156.373		2.058.465.181	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	1.860.307.578	100%	1.836.198.825	100%	1.879.950.197	100%	1.922.706.143	100%	1.961.671.490	100%	2.003.910.600	KECAMATAN BUKE
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.200.000	80%	10.404.000	90%	10.612.080	100%	10.824.322	100%	11.040.808	KECAMATAN BUKE
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.200.000	80%	10.404.000	90%	10.612.080	100%	10.824.322	100%	11.040.808	KECAMATAN BUKE
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN BUKE
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN BUKE
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN BUKE

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01	Kecamatan Benua				1.697.432.211		1.669.465.950		1.709.882.665		1.749.237.261		1.784.733.230		1.823.433.575	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	1.633.906.036	100%	1.605.269.252	100%	1.644.402.033	100%	1.682.447.016	100%	1.716.607.180	100%	1.753.945.004	KECAMATAN BENUA
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Umum Pemerinntahan Kecamatan dan Pelayanan Publik (%)	60%	60%	7.100.000	70%	7.242.000	80%	7.386.840	90%	7.534.577	100%	7.685.268	100%	7.838.974	KECAMATAN BENUA
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	60%	60%	26.426.175	70%	26.954.699	80%	27.493.792	90%	28.043.668	100%	28.604.542	100%	29.176.633	KECAMATAN BENUA
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN BENUA
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN BENUA
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN BENUA
7.01	Kecamatan Moramo Utara				2.344.327.848		2.329.299.500		2.382.912.886		2.435.728.086		2.484.953.871		2.537.658.629	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	2.227.610.458	100%	2.210.847.762	100%	2.262.092.114	100%	2.312.490.898	100%	2.359.251.939	100%	2.409.442.659	KECAMATAN MORAMO UTARA
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Umum Pemerinntahan Kecamatan dan Pelayanan Publik (%)	60%	60%	5.942.200	70%	6.061.044	80%	6.182.265	90%	6.305.910	100%	6.432.028	100%	6.560.669	KECAMATAN MORAMO UTARA
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	60%	60%	80.775.190	70%	82.390.694	80%	84.038.508	90%	85.719.278	100%	87.433.663	100%	89.182.337	KECAMATAN MORAMO UTARA
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN MORAMO UTARA
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN MORAMO UTARA
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN MORAMO UTARA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01	Kecamatan Basala				1.517.964.195		1.278.120.237		1.310.710.038		1.342.081.181		1.369.434.028		1.399.828.389	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	1.435.620.195	100%	1.194.729.357	100%	1.225.651.340	100%	1.255.321.309	100%	1.280.938.959	100%	1.309.563.419	KECAMATAN BASALA
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Umum Pemerinttahan Kecamatan dan Pelayanan Publik (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.200.000	80%	10.404.000	90%	10.612.080	100%	10.824.322	100%	11.040.808	KECAMATAN BASALA
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	60%	60%	42.344.000	70%	43.190.880	80%	44.054.698	90%	44.935.792	100%	45.834.507	100%	46.751.198	KECAMATAN BASALA
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN BASALA
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN BASALA
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN BASALA
7.01	Kecamatan Ranomeeto Barat				3.163.218.374		3.164.567.836		3.234.886.589		3.304.741.263		3.371.347.312		3.441.779.939	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	3.085.818.626	100%	3.086.220.094	100%	3.154.971.891	100%	3.223.228.271	100%	3.288.204.061	100%	3.356.973.822	KECAMATAN RANOMEETO BARAT
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Umum Pemerinttahan Kecamatan dan Pelayanan Publik (%)	60%	60%	17.581.475	70%	17.933.105	80%	18.291.767	90%	18.657.602	100%	19.030.754	100%	19.411.369	KECAMATAN RANOMEET O BARAT
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	60%	60%	29.818.273	70%	30.414.638	80%	31.022.931	90%	31.643.390	100%	32.276.258	100%	32.921.783	KECAMATAN RANOMEET O BARAT
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN RANOMEET O BARAT
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN RANOMEETO BARAT
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN RANOMEET O BARAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01	Kecamatan Baito				1.586.128.223		1.555.935.882		1.594.081.996		1.631.120.578		1.664.254.213		1.700.544.978	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	1.536.128.223	100%	1.505.535.882	100%	1.542.673.996	100%	1.578.684.418	100%	1.610.769.330	100%	1.645.990.397	KECAMATAN BAITO
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Umum Pemerinttahan Kecamatan dan Pelayanan Publik (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.200.000	80%	10.404.000	90%	10.612.080	100%	10.824.322	100%	11.040.808	KECAMATAN BAITO
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.200.000	80%	10.404.000	90%	10.612.080	100%	10.824.322	100%	11.040.808	KECAMATAN BAITO
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN BAITO
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN BAITO
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN BAITO
7.01	Kecamatan Laeya				4.206.828.575		4.229.050.242		4.320.658.642		4.412.228.757		4.500.984.556		4.594.009.928	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	3.855.372.445	100%	3.871.164.989	100%	3.955.615.685	100%	4.039.884.941	100%	4.121.193.863	100%	4.206.623.421	KECAMATAN LAEYA
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Umum Pemerinttahan Kecamatan dan Pelayanan Publik (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.200.000	80%	10.404.000	90%	10.612.080	100%	10.824.322	100%	11.040.808	KECAMATAN LAEYA
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	60%	60%	311.456.130	70%	317.685.253	80%	324.038.958	90%	330.519.737	100%	337.130.132	100%	343.872.734	KECAMATAN LAEYA
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN LAEYA
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN LAEYA
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN LAEYA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01	Kecamatan Palangga Selatan				2.300.482.781		2.284.577.532		2.337.296.478		2.389.199.350		2.437.494.561		2.489.250.133	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	2.241.849.280	100%	2.225.371.361	100%	2.276.906.184	100%	2.327.601.250	100%	2.374.664.498	100%	2.425.163.469	KECAMATAN PALANGGA SELATAN
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Umum Pemerinttahan Kecamatan dan Pelayanan Publik (%)	60%	60%	6.200.000	70%	6.324.000	80%	6.450.480	90%	6.579.490	100%	6.711.079	100%	6.845.301	KECAMATAN PALANGGA SELATAN
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	60%	60%	22.433.501	70%	22.882.171	80%	23.339.814	90%	23.806.611	100%	24.282.743	100%	24.768.398	KECAMATAN PALANGGA SELATAN
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN PALANGGA SELATAN
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN PALANGGA SELATAN
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN PALANGGA SELATAN
7.01	Kecamatan Wolasi				1.487.645.184		1.455.483.183		1.491.620.242		1.526.609.589		1.557.653.005		1.591.811.746	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	1.415.707.414	100%	1.382.706.657	100%	1.417.388.187	100%	1.450.892.892	100%	1.480.421.974	100%	1.513.036.094	KECAMATAN WOLASI
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Umum Pemerinttahan Kecamatan dan Pelayanan Publik (%)	60%	60%	12.133.770	70%	12.376.445	80%	12.623.974	90%	12.876.454	100%	13.133.983	100%	13.396.663	KECAMATAN WOLASI
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	60%	60%	29.804.000	70%	30.400.080	80%	31.008.082	90%	31.628.243	100%	32.260.808	100%	32.906.024	KECAMATAN WOLASI
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN WOLASI
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN WOLASI
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN WOLASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01	Kecamatan Andoolo Barat				1.740.445.080		1.713.339.077		1.754.633.254		1.794.882.861		1.831.291.742		1.870.923.258	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	1.676.107.402	100%	1.648.314.645	100%	1.688.308.334	100%	1.727.231.443	100%	1.762.287.295	100%	1.800.538.722	KECAMATAN ANDOOLo BARAT
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Umum Pemerinnntahan Kecamatan dan Pelayanan Publik (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.200.000	80%	10.404.000	90%	10.612.080	100%	10.824.322	100%	11.040.808	KECAMATAN ANDOOLo BARAT
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	60%	60%	24.337.678	70%	24.824.432	80%	25.320.920	90%	25.827.339	100%	26.343.885	100%	26.870.763	KECAMATAN ANDOOLo BARAT
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN ANDOOLo BARAT
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN ANDOOLo BARAT
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN ANDOOLo BARAT
7.01	Kecamatan Kolono Timur				1.325.723.384		1.290.322.947		1.323.156.802		1.354.776.880		1.382.383.641		1.413.036.995	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	1.274.891.584	100%	1.239.074.511	100%	1.270.883.397	100%	1.301.458.007	100%	1.327.998.391	100%	1.357.564.039	KECAMATAN KOLONo TIMUR
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Umum Pemerinnntahan Kecamatan dan Pelayanan Publik (%)	60%	60%	4.999.800	70%	5.099.796	80%	5.201.792	90%	5.305.828	100%	5.411.944	100%	5.520.183	KECAMATAN KOLONo TIMUR
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	60%	60%	15.832.000	70%	16.148.640	80%	16.471.613	90%	16.801.045	100%	17.137.066	100%	17.479.807	KECAMATAN KOLONo TIMUR
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN KOLONo TIMUR
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN KOLONo TIMUR
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN KOLONo TIMUR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01	Kecamatan Sabulakoa				1.776.203.907		1.749.813.080		1.791.836.738		1.832.830.415		1.869.998.247		1.910.403.892	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(%)	90%	100%	1.712.399.907	100%	1.685.333.000	100%	1.726.067.056	100%	1.765.745.340	100%	1.801.571.470	100%	1.840.608.580	KECAMATAN SABULAKOA
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik (%)	60%	60%	6.200.000	70%	6.324.000	80%	6.450.480	90%	6.579.490	100%	6.711.079	100%	6.845.301	KECAMATAN SABULAKOA
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	60%	60%	27.604.000	70%	28.156.080	80%	28.719.202	90%	29.293.586	100%	29.879.457	100%	30.477.046	KECAMATAN SABULAKOA
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN SABULAKOA
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN SABULAKOA
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	60%	60%	10.000.000	70%	10.000.000	80%	10.200.000	90%	10.404.000	100%	10.612.080	100%	10.824.322	KECAMATAN SABULAKOA
					1.431.862.966.734		1.449.818.306.772		1.480.363.221.438		1.511.572.247.020		1.543.460.494.537		1.576.043.440.460	

Tabel 7.4. Prioritas Program Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif Tahun 2021-2025

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/P rogram Pembangunan Daerah	Indikator kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2020	2021		2022		2023		2024		2025		Akhir RPJMD		Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1			MISI 1 MELANJUTKAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA																
1	1		Tujuan 1. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia																
1	1	1	Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat					234,110,036,955.00		239,677,683,846.94		244,727,236,860.81		249,886,577,815.26		255,158,204,798.53		260,544,676,313.68	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat			90%		90%	87,613,337,600	90%	89,365,604,352	90%	91,152,916,439	90%	92,975,974,768	100%	94,835,494,263	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			90%		90%	2,494,699,520	90%	2,544,593,510	90%	2,595,485,381	90%	2,647,395,088	100%	2,700,342,990	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Peningkatan Ketersediaan Farmasi dan Alat Kesehatan			90%		90%	254,271,488	90%	259,356,918	90%	264,544,056	90%	269,834,937	100%	275,231,636	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			90%		90%	143,962,112	90%	146,841,354	90%	149,778,181	90%	152,773,745	100%	155,829,220	Dinas Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan, dan Pendukung Fasilitas Pelayanan RS serta pemeliharaannya dengan dukungan akreditasi RS (%)			93%		93%	71,710,996,980	94%	73,145,216,920	95%	74,608,121,258	97%	76,100,283,683	100%	77,622,289,357	RS Konawe Selatan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase ketersediaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar, melalui perencanaan SDMK, Peningkatan Mutu dan Kompetensi SDM Kesehatan RS (%)			81%		85%	7,007,400,000	88%	7,147,548,000	92%	7,290,498,960	96%	7,436,308,939	100%	7,585,035,118	RS Konawe Selatan

... sambungan 2/16

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2020	2021		2022		2023		2024		2025		Akhir RPJMD		Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Program Pengendalian Penduduk	Presentase Pengendalian Penduduk (%)		60%		70%	35,228,760	80%	35,933,335	85%	36,652,002	90%	37,385,042	100%	38,132,743	Dinas Penegndalian Pebduduk & KB
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Presentase Pembinaan Keleuarga Berencana (KB) (%)		60%		70%	5,023,832,649	80%	5,138,015,477	85%	5,254,952,947	90%	5,374,716,335	100%	5,497,378,909	Dinas Penegndalain Pebduduk & KB
1	1	1		Sasaran 2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat				386,039,067,734.00		295,219,679,966.66		403,546,207,071.64		412,053,770,430.21		420,746,489,317.91		429,628,592,612.15	
				Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Peningkatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (%)		82%		84%	113,575,000,000	88%	115,846,500,000	90%	118,163,430,000	93%	120,526,698,600	95%	122,937,232,572	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
				Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Peningkatan Pengembangan Kurikulum Pendidikan (%)		77%		78%	120,000,000	80%	150,000,000	84%	200,000,000	87%	250,000,000	90%	255,000,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (%)		81%		82%	49,500,000	84%	50,490,000	86%	51,499,800	90%	52,529,796	95%	53,580,392	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
				Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Pembinaan Kebudayaan lokal (Kegiatan)		1		2	450,000,000	2	459,000,000	2	468,180,000	2	477,543,600	11	487,094,472	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Kesenian Tradisional yang terbina (Kegiatan)		1		1	25,300,000	1	25,806,000	2	26,322,120	2	26,848,562	9	27,385,534	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Yang dilestarikan (Buah)						-		1	500,000,000	1	500,000,000	3	510,000,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
				Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Kunjungan ke Perpustakaan (%)		0.31%		0.33%	327,652,560	0.35%	334,205,611	0.39%	340,889,723	0.44%	347,707,518	0.50%	354,661,668	Dinas Perpustakaan
				Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno yang disimpan (Buah)		4		10	125,000,000	15	127,500,000	20	130,050,000	25	132,651,000	30	135,304,020	Dinas Perpustakaan

... sambungan 3/16

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2020	2021		2022		2023		2024		2025		Akhir RPJMD		Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	1	3	Sasaran 3. Terpenuhiya Kebutuhan Pangan Masyarakat					4,288,095,137.00		4,390,041,053.00		4,482,530,869.45		4,577,031,609.91		4,673,589,030.28		4,772,249,993.21	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Presentase meningkatnya jumlah ketersediaan dan Cadangan pangan masyarakat (%)			75%		80%	1,071,000,000	85%	1,092,420,000	90%	1,114,268,400	95%	1,136,553,768	100%	1,159,284,843	Dinas Ketahanan Pangan
1	1	4	Sasaran 4. Meningkatnya Standar Hidup Layak					10,966,515,004.00		11,227,370,613.00		11,463,909,859.00		11,705,592,070.00		11,952,534,165.00		12,204,855,993.00	
			Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi sosial Terlatih (%)			90 %		90 %	1,033,873,020	90 %	1,054,550,480	90 %	1,075,641,490	90 %	1,097,154,320	100 %	1,119,097,406	Dinas Sosial
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Peningkatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran					25	922,995,348	35	1,697,787,094	50	1,799,654,320	75	1,907,633,579	100	2,022,091,594	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	1	5	Sasaran 5. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat					4,000,567,304.00		4,095,728,525.17		4,182,017,736.53		4,270,185,057.47		4,360,267,176.53		4,452,313,814.67	
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Koordinasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)			75%		80%	93,566,640	83%	99,812,614	85%	106,333,832	86%	113,140,967	90%	120,245,081	Badan Kesbangpol
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Koordinasi, Pemantauan Peran Partai Politik dan Situasi Perkembangan Politik Daerah (%)			75%		80%	1,570,770,420	85%	1,602,185,828	90%	1,634,229,545	93%	1,666,914,136	97%	1,700,252,419	Badan Kesbangpol
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas / LSM yang Aktif (%)					70%	160,000,000	75%	163,200,000	80%	166,464,000	85%	169,793,280	90%	173,189,146	Badan Kesbangpol
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Koordinasi Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)			75%		80%	135,851,760	85%	138,568,795	90%	141,340,171	93%	144,166,975	97%	147,050,314	Badan Kesbangpol

... sambungan 4/16

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2020	2021		2022		2023		2024		2025		Akhir RPJMD		Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Koordinasi Pemantapan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial (%)		75%		80%	101,186,040	85%	103,209,761	85%	105,273,956	86%	107,379,435	90%	109,527,024	Badan Kesbangpol
1	1	6		Sasaran 6. Meningkatkan Kesenjangan Gender				4,000,567,304.00		4,095,728,525.17		4,182,017,736.53		4,270,185,057.47		4,360,267,176.53		4,452,313,814.67	
				Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)		39.2%		39.40%	736,044,240	39.50%	750,765,125	####	765,780,427	39,8%	781,096,036	40%	796,717,957	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
				Program Perlindungan Perempuan	Persentase penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan (%)		100%		100%	167,103,540	100%	170,445,611	100%	173,854,523	100%	177,331,613	100%	180,878,246	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase ketersediaan unit layanan informasi & konseling keluarga (%)		100%		100%	120,000,000	100%	122,400,000	100%	124,848,000	100%	127,344,960	100%	129,891,859	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase ketersediaan data gender dan anak di tingkat kabupaten(%)		100%		100%	110,000,000	100%	112,200,000	100%	114,444,000	100%	116,732,880	100%	119,067,538	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
				Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Jumlah forum anak daerah yang dibentuk		13		15	443,133,900	17	451,996,578	20	461,036,510	23	470,257,240	26	479,662,385	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
				Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap anak yang dilaporkan (%)		100%		100%	79,876,200	100%	81,473,724	100%	83,103,198	100%	84,765,262	100%	86,460,568	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Presentase Pemberdayaan dan peningkatn Keluarga Sejahtera (KS) (%)		60%		70%	573,622,500	80%	585,094,950	85%	596,796,849	90%	608,732,786	100%	620,907,442	Dinas Pengendalian Penduduk & KB

... sambungan 5/16

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2020	2021		2022		2023		2024		2025		Akhir RPJMD		Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	1	7	Sasaran 7. Terpeliharanya Kualitas dalam Pengelolaan SumberDaya Alam Berkelanjutan					4,923,893,297.00		5,041,006,171.00		5,147,212,627.00		5,255,726,191.00		5,366,601,406.00		5,479,892,083.00	
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen yang tertangani (%)			25%		40%	38,760,000	50%	39,535,200	60%	40,325,904	70%	41,132,422	80%	41,955,071	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (%)			-		30%	300,000,000	40%	306,000,000	50%	312,120,000	60%	318,362,400	75%	324,729,648	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase hutan kota dan RTH yang terkelola (%)			80%		30%	95,466,900	50%	97,376,238	50%	99,323,763	56%	101,310,238	70%	103,336,443	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (%)			-		5%	50,000,000	20%	55,000,000	35%	60,000,000	40%	65,000,000	70%	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase produk ramah lingkungan yang teregister (%)			-		45%	50,000,000	55%	55,000,000	65%	60,000,000	70%	65,000,000	80%	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Persentase pelestarian masyarakat hukum adat (MHA) dan kearifan lokal (%)			-		35%	50,000,000	45%	55,000,000	55%	60,000,000	65%	65,000,000	75%	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat (%)			-		40%	50,000,000	50%	55,000,000	60%	60,000,000	70%	65,000,000	80%	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase program penghargaan LH untuk masyarakat (%)			-		50%	50,000,000	55%	55,000,000	60%	60,000,000	75%	65,000,000	80%	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)			-		50%	50,000,000	55%	55,000,000	65%	60,000,000	70%	65,000,000	75%	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

... sambungan 6/16

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Pro gram Pembangunan Daerah	Indikator kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2020	2021		2022		2023		2024		2025		Akhir RPJMD		Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah Perkotaan yang tertangani (%)			80%		80%	287,481,900	82%	293,231,538	80%	299,096,169	70%	305,078,092	75%	311,179,654	Dinas Lingkungan Hidup
1			MISI 2 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEREKONOMIAN BERBASIS PEDESAAAN YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN																
1	1		Tujuan 2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi																
1	1	8	Sasaran 8. Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Ekonomi Utama				22,782,157,880.00		23,324,630,270.09		23,816,035,874.43		24,318,125,673.81		24,831,142,773.83		25,355,336,159.44		
			Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi sosial Terlatih (%)			90 %		90 %	10,098,000	90 %	10,299,960	90 %	10,505,959	90 %	10,716,078	100 %	10,930,400	Dinas Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rasio PMKS dibanding jumlah penduduk yang mendapatkan Bansos (%)			90 %		90 %	112,370,340	90 %	114,617,747	90 %	116,910,102	90 %	119,248,304	100 %	121,633,270	Dinas Sosial
			Program Penataan Desa	Persentase peningkatan desa yang memiliki infrastruktur dasar memadai (%)			80%		83%	204,564,000	86%	208,655,280	90%	212,828,386	94%	217,084,953	96%	221,426,652	Dinas Pemberday aan Masyarakat & Desa
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang memiliki kelompok kegiatan masyarakat produktif (%) & Persentase desa yang memiliki kelompok usaha ekonomi produktif (%)			75 & 70		78 & 74	107,063,280	84 & 79	109,204,546	89 & 85	111,388,637	94 & 89	113,616,409	96 & 90	115,888,737	Dinas Pemberday aan Masyarakat & Desa
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Provitas/Luas Areal 1. Padi, Jagung, Kedelai (kuintal/ha) 2.Porang, Klp Sawit, Kelapa, Nilam, Kopi, Cabe (Ha) 3. Nenas, Jeruk (Kuintal)			(95), (15.731), (227.000)		(103), (17.556), (237.500)	2,758,467,720	(109), (19.581), (248.000)	2,813,637,074	(117), (22.006), (258.500)	2,869,909,816	(123), (24.431), (269.000)	2,927,308,012	(128), (25.700), (279.500)	2,985,854,172	Dinas Tanaman Pangan, Horti & Perkebunan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Provitas/Luas Areal ; 1. Padi, Jagung, Kedelai (kuintal/ha) 2.Porang, Klp Sawit, Kelapa, Nilam, Kopi, Cabe (Ha) 3. Nenas, Jeruk (Kuintal)			(95), (15.731), (227.000)		(103), (17.556), (237.500)	2,758,467,720	(109), (19.581), (248.000)	2,813,637,074	(117), (22.006), (258.500)	2,869,909,816	(123), (24.431), (269.000)	2,927,308,012	(128), (25.700), (279.500)	2,985,854,172	Dinas Tanaman Pangan, Horti & Perkebunan

... sambungan 7/16

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2020	2021		2022		2023		2024		2025		Akhir RPJMD		Penanggung Jawab
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani Madya			4.48		6.73	55,057,920	8.96	56,159,078	11.20	57,282,260	13.45	58,427,905	15.68	59,596,463	Dinas Tanaman Pangan, Horti & Perkebunan
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan kecukupan gizi dan keamanan pangan (%)			75%		80%	908,693,520	85%	926,867,390	90%	945,404,738	95%	964,312,833	100%	983,599,090	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Populasi Ternak, Ketersediaan Daging dan telur serta Sarana Peternakan (%)			25%		25%	1,055,729,580	25%	1,076,844,172	25%	1,098,381,055	25%	1,120,348,676	100%	1,142,755,650	Dinas Peternakan & Keswan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Peternakan yang tersedia (Paket)			1 Paket		1 Paket	238,350,540	1 Paket	243,117,551	1 Paket	247,979,902	1 Paket	252,939,500	1 Paket	257,998,290	Dinas Peternakan & Keswan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan Pencegahan Penyakit Hewan dan Peningkatan Penyediaan Produk Hewan yang asuh (%)			15%		20%	421,079,460	20%	429,501,049	20%	438,091,070	20%	446,852,892	100%	455,789,949	Dinas Peternakan & Keswan
	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Jumlah Kelompok Peternakan (Kelompok)			1 Kpl		2 Klp	26,708,700	2 Klp	27,242,874	2 Klp	27,787,731	2 Klp	28,343,486	2 Klp	28,910,356	Dinas Peternakan & Keswan
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan industri			100%		100%	482,901,660	100%	492,559,693	100%	502,410,887	100%	512,459,105	100%	522,708,287	Dinas Perindustrian & Perdagangan
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata Yang memiliki fasilitas memadai (%)			25%		25%	1,933,429,380	25%	1,972,097,968	25%	2,011,539,927	25%	2,051,770,725	100%	2,092,806,140	Dinas Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kegiatan promosi wisata daerah (Kegiatan)			3 Keg		3 Keg	736,864,320	3 Keg	751,601,606	4 Keg	766,633,639	4 Keg	781,966,311	4 Keg	797,605,638	Dinas Pariwisata

... sambungan 8/16

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2020	2021		2022		2023		2024		2025		Akhir RPJMD		Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	1	9	Sasaran 9. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat					6,454,411,500.00		6,608,258,625.75		6,747,482,068.35		6,889,732,522.45		7,035,078,863.94		7,183,591,634.43	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase menurunnya desa yang masuk rentan/sangat rentan/rawan pangan dan jumlah stunting (%)			80%		80%	81,380,700	85%	83,008,314	90%	84,668,480	95%	86,361,850	100%	88,089,087	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Presentase menurunnya desa yang masuk rentan/sangat rentan/rawan pangan dan jumlah stunting (%)			80%		80%	81,380,700	85%	83,008,314	90%	84,668,480	95%	86,361,850	100%	88,089,087	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Jumlah Pasar yang Representatif (%)			100%		100%	1,312,656,759	100%	1,346,361,495	100%	1,380,996,384	100%	1,416,588,830	100%	1,453,167,087	Dinas Perindustrian & Perdagangan
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase peningkatan ekspor (%)			100%		100%	242,456,040	100%	247,305,161	100%	252,251,264	100%	257,296,289	100%	262,442,215	Dinas Perindustrian & Perdagangan
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase penurunan temuan barang & jasa yang tidak sesuai UU Perlindungan Konsumen (%)			50%		40%	43,250,040	40%	44,115,041	30%	44,997,342	20%	45,897,288	10%	46,815,234	Dinas Perindustrian & Perdagangan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertumbuhan UMKM Mandiri (%)			5%		5%	128,308,860	5%	130,875,037	5%	133,492,538	5%	136,162,389	100%	138,885,636	Dinas Koperasi UMKM
			Program Pengembangan UMKM	Persentase Pertumbuhan UMKM Mandiri (%)			5%		5%	1,025,100,000	5%	1,045,602,000	5%	1,066,514,040	5%	1,087,844,321	100%	1,109,601,207	Dinas Koperasi UMKM
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)			8.700 Ton		8.800 Ton	1,670,235,720	8.900 Ton	1,703,640,434	8.950 Ton	1,737,713,243	9.050 Ton	1,772,467,508	8.600 Ton	1,807,916,858	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)			54.257 Ton		55.257 Ton	2,521,144,200	56.257 Ton	2,571,567,084	57.257 Ton	2,622,998,426	58.257 Ton	2,675,458,394	59.257 Ton	2,728,967,562	Dinas Perikanan

... sambungan 9/16

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2020	2021		2022		2023		2024		2025		Akhir RPJMD		Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya jumlah produksi Olahan hasil perikanan (Ton)	Ton	90	90 Ton		95 Ton	114,877,500	105 Ton	117,175,050	115 Ton	119,518,551	125 Ton	121,908,922	135 Ton	124,347,100	Dinas Perikanan
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Peningkatan Jumlah jenis Produk kreatif (Produk)	Produk	1 klp	1 Produk		1 Produk	113,680,020	1 Produk	115,953,620	1 Produk	118,272,693	1 Produk	120,638,147	5 Produk	123,050,910	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan jumlah kelompok kreatif (Kelompok)	Klp	1klp	1 Klp		1 Klp	130,638,540	1 Klp	133,251,311	1 Klp	135,916,337	1 Klp	138,634,664	15 Klp	141,407,357	Dinas Pariwisata
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Pertumbuhan KSP/USP	%	5%	5	120830000	10	130086600	15	130348332	20	130615299	25	130887605	25	140165357	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1	1	10	Sasaran 10. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja				6,454,411,500.00			6,608,258,625.75		6,747,482,068.35		6,889,732,522.45		7,035,078,863.94		7,183,591,634.43	
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kebutuhan Tenaga kerja (%)			0%		5%	100,000,000	5%	100,000,000	5%	100,000,000	5%	100,000,000	5%	100,000,000	Dinas Nakertrans
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang dilatih Sesuai dengan Standar kompetensi (%)			30%		32%	252,634,620	34%	257,687,312	35%	262,841,057	35%	268,097,880	35%	273,459,837	Dinas Nakertrans
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang ditempatkan (%)			85%		40%	298,052,160	40%	304,013,203	40%	310,093,467	40%	316,295,337	40%	322,621,243	Dinas Nakertrans
			Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan (Kasus)			10%		12%	37,752,240	15%	38,507,285	15%	39,277,430	15%	40,062,979	15%	40,864,239	Dinas Nakertrans
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pertumbuhan Koperasi (%)			5%		5%	84,269,340	5%	85,954,727	5%	87,673,821	5%	89,427,298	100%	91,215,844	Dinas Koperasi UMKM

... sambungan 10/16

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2020	2021		2022		2023		2024		2025		Akhir RPJMD		Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	1	11	Sasaran 11. Meningkatnya Pemerataan Pendapatan antar Kelompok Masyarakat					8,798,494,926.00		9,007,703,124.57		9,197,478,299.84		9,391,379,587.98		9,589,500,873.56		9,791,938,311.70	
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi (%)			5%	127,291,000	5%	129,836,820	5%	132,433,556	5%	135,082,228	5%	137,783,872	100%	140,539,550	Dinas Koperasi UMKM
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi (%)			5%		5%	52,346,400	5%	53,393,328	5%	54,461,195	5%	55,550,418	100%	56,661,427	Dinas Koperasi UMKM
1			MISI 3. PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN DAERAH																
1	1		Tujuan 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik																
1	1	1	Sasaran 12. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah					4,784,865,260.00		4,898,926,260.73		5,002,137,320.97		5,107,592,407.50		5,215,342,580.36		5,325,440,134.43	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (%)			100%		100%	28,020,129,782	100%	28,617,073,405	100%	29,227,211,555	100%	29,850,851,278	100%	30,488,307,252	Sekretariat Daerah
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan					90,93	369,198,139	92,50	679,114,838	95	719,861,728	97	763,053,432	100	808,836,637	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	1	1	Sasaran 13. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik					13,200,776,834.00		13,515,179,225.37		13,799,918,350.41		14,090,848,305.03		14,388,109,953.85		14,691,847,568.27	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (%)			100%		100%	608,620,684,959	100%	622,778,299,708	100%	636,673,019,778	100%	650,898,797,890	100%	665,509,027,686	Semua OPD
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi pengadministrasian, pengembangan dan penyelenggaraan pemerintahan umum (%)			70%		75%	4,311,334,980	80%	4,397,561,680	85%	4,485,512,913	90%	4,575,223,171	100%	4,666,727,635	Sekretariat Daerah
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase fasilitasi Perencanaan dan penataan administrasi Pembangunan (%)			100%		100%	1,879,829,400	100%	1,917,425,988	100%	1,955,774,508	100%	1,994,889,998	100%	2,034,787,798	Sekretariat Daerah

... sambungan 11/16

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2020	2021		2022		2023		2024		2025		Akhir RPJMD		Penanggung Jawab
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Terlaksananya Seleksi Paskibraka Nasional dan Paskibraka Daerah			2 Keg		2 Keg	1,490,942,160	2 Keg	1,520,761,003	2 Keg	1,551,176,223	2 Keg	1,582,199,748	2 Keg	1,613,843,743	Dinas Kepemudaan & Olah Raga
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Terlaksananya Kegiatan Keolahragaan			3 Keg		3 Keg	341,371,560	3 Keg	348,198,991	3 Keg	355,162,971	3 Keg	362,266,230	3 Keg	369,511,555	Dinas Kepemudaan & Olah Raga
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Terlaksananya Kegiatan Kepramukaan			1 Keg		1 Keg	76,500,000	1 Keg	78,030,000	1 Keg	79,590,600	1 Keg	81,182,412	1 Keg	82,806,060	Dinas Kepemudaan & Olah Raga
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kelengkapan Dokumen utama perencanaan (RPJMD, RKPD, RKPD-P) (%)			100%		100%	791,059,980	100%	806,881,180	100%	823,018,803	100%	839,479,179	100%	856,268,763	BAPPEDA
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Ketersediaan Dokumen Sektor Perencanaan Pembangunan Daerah (Bidang Pemerintahan, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur) (Dokumen)			3		3	1,561,341,540	3	1,592,568,371	3	1,624,419,738	3	1,656,908,133	21	1,690,046,296	BAPPEDA
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal (PMDN dan PMA) (%) Meningkatnya Perkembangan Iklim penanaman Modal (%)			100%		15 60	125,000,000	20 65	125,000,000	25 70	125,000,000	30 80	125,000,000	35 85	125,000,000	Dinas PM & PTSP
	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal (PMDN dan PMA)		15%	15%		15%	253,411,860	20%	258,480,097	25%	263,649,699	30%	268,922,693	35%	274,301,147	Dinas PM & PTSP
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Persentase Penyelesaian Izin (%)			75%		85	125,000,000	85	125,000,000	90	125,000,000	90	125,000,000	90	125,000,000	Dinas PM & PTSP
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal (PMDN dan PMA) (%) Meningkatnya Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM (%)		50% 30%	65% 30%		70% 35%	354,523,440	75% 65%	361,613,909	80% 75%	368,846,187	85% 85%	376,223,111	85% 95%	383,747,573	Dinas PM & PTSP

... sambungan 12/16

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2020	2021		2022		2023		2024		2025		Akhir RPJMD		Penanggung Jawab
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terlaksananya Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal (%)		0	70%		75%	34,862,580	75%	35,559,832	80%	36,271,028	80%	36,996,449	85%	37,736,378	Dinas PM & PTSP
	Program Penanganan Bencana	Rasio mitigasi dan Pengurangan resiko bencana (%)			76%		77%	1,000,546,560	80%	1,020,557,491	85%	1,040,968,641	90%	1,061,788,014	95%	1,083,023,774	BPBD
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah pelatihan dalam 1 Tahun (pelatihan)			3 Pelatihan		3 Pelatihan	61,073,100	3 Pelatihan	62,294,562	3 Pelatihan	63,540,453	3 Pelatihan	64,811,262	18 Pelatihan	66,107,488	Dinas PU & Tata Ruang
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Pelaksanaan Program Informasi dan Komunikasi Publik (%)			70%		70%	715,789,080	75%	730,104,862	75%	744,706,959	80%	759,601,098	80%	774,793,120	Dinas Kominfo & Persandian
	Program Aplikasi Informatika	Persentase Pengelolaan Aplikasi informatika yang terintegrasi (%)			70%		70%	947,154,873	75%	971,330,505	75%	996,169,455	80%	1,021,691,169	100%	1,047,915,695	Dinas Kominfo & Persandian
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang data sektorannya terintegrasi dengan pemerintah daerah (%)			70%		70%	95,085,089	75%	96,986,790	75%	98,926,526	80%	100,905,057	100%	102,923,158	Dinas Kominfo & Persandian
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang Menggunakan layanan keamanan informasi (%)			70%		70%	30,600,000	75%	31,212,000	75%	31,836,240	80%	32,472,965	100%	33,122,424	Dinas Kominfo & Persandian
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase rekomendasi Hasil pengawasan ditindaklanjuti (%)			100%		100%	1,706,070,270	100%	1,749,359,064	100%	1,793,828,653	100%	1,839,513,478	100%	1,886,449,044	Inspektorat Daerah
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Maturitas SPIP			3		3	840,318,840	3	857,125,217	4	874,267,721	4	891,753,076	4	909,588,137	Inspektorat Daerah
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase SKPD yang menerapkan Arsip Secara Baik (%)			25%		40%	125,000,000	55%	127,500,000	70%	130,050,000	85%	132,651,000	100%	135,304,020	Dinas Perpustakaan
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Jumlah Arsip yang disimpan di Depo Arsip (Buah)			35		70	20,480,580	110	20,890,192	160	21,307,995	220	21,734,155	300	22,168,838	Dinas Perpustakaan
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah Pengguna Arsip			5		10	125,000,000	20	127,500,000	30	130,050,000	40	132,651,000	50	135,304,020	Dinas Perpustakaan
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Penangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani (%)			90 %		90 %	255,000,000	90 %	260,100,000	90 %	265,302,000	90 %	270,608,040	100 %	276,020,201	Dinas Sosial

... sambungan 13/16

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2020	2021		2022		2023		2024		2025		Akhir RPJMD		Penanggung Jawab
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam/sosial yang ditangani (%)			90 %		90 %	33,751,800	90 %	34,426,836	90 %	35,115,373	90 %	35,817,680	100 %	36,534,034	Dinas Sosial
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola (%)			90 %		90 %	153,000,000	90 %	156,060,000	90 %	159,181,200	90 %	162,364,824	100 %	165,612,120	Dinas Sosial
	Program Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Jasa Pendaftaran Penduduk			95%		96%	558,122,580	97%	569,285,032	98%	580,670,732	99%	592,284,147	100%	604,129,830	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Jasa pencatatan sipil			95%		96%	441,025,560	97%	449,846,071	98%	458,842,993	99%	468,019,852	100%	477,380,250	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya Jasa Pengelolaan informasi administrasi kependudukan			95%		96%	341,541,900	97%	348,372,738	98%	355,340,193	99%	362,446,997	100%	369,695,937	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Tersedianya Jasa profil kependudukan			95%		96%	7,583,700	97%	7,735,374	98%	7,890,081	99%	8,047,883	100%	8,208,841	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kasus)			14 Kasus		14 Kasus	1,902,214,320	14 Kasus	1,940,258,606	14 Kasus	1,979,063,779	14 Kasus	2,018,645,054	14 Kasus	2,059,017,955	Satpol PP
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Peningkatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran			14 Kec		14 Kec	160,212,900	14 Kec	160,537,158	15 Kec	160,867,901	15 Kec	170,205,259	15 Kec	170,549,364	Dinas Damkar dan Penyelamatan
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase terselenggaranya Fungsi DPRD (Penyusunan Perda, Anggaran & Pengawasan)			100%		100%	8,463,021,600	100%	8,632,282,032	100%	8,804,927,673	100%	8,981,026,226	100%	9,160,646,751	Sekretariat DPRD
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi Daerah			11		13	3,820,000,000	14	3,306,907,941	62,67	3,379,667,680	70,30	3,454,110,150	75,50	3,530,276,827	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian (%)			100%		100%	355,941,240	100%	363,060,065	100%	370,321,266	100%	377,727,691	100%	385,282,245	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

... sambungan 14/16

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2020	2021		2022		2023		2024		2025		Akhir RPJMD		Penanggung Jawab
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi (%)			100%		100%	1,532,530,619	100%	1,570,080,001	100%	1,608,617,432	100%	1,648,170,822	100%	1,688,768,917	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1	1			Tujuan 4. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah																
1	1	1		Sasaran 14. Meningkatkan Kapasitas Fiskal																
				Program Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah Peningkatan Penerimaan PAD	Keg	4 Keg	4 Keg	892018000	4 Keg	1420514634	5 Keg	1456776053	5 Keg	1949032486	6 Keg	1532313108	3 Keg	1571647995	Badan Pendapatan Daerah
1	1	1		Sasaran 15. Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah																
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkatnya pengelolaan barang milik daerah (%)	%	100%	100%	1156830000	100%	1179966600	100%	1203565932	100%	1227637251	100%	1252189996	100%	1277233796	Badan Keuan
1				MISI 4. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN WILAYAH UNTUK MENOPANG KONEKTIVITAS																
1	1			Tujuan 5. Meningkatkan Infrastruktur Dasar dan Wilayah																
1	1	1	1	Sasaran 16. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah yang mendorong Produktivitas Sektor Utama dan Sektor Pendukung dan produktivitas Kawasan Perdesaan.					4,642,264,458.00		4,752,494,905.00		4,852,620,935.00		4,954,923,916.00		5,059,453,382.00		5,166,260,065.00	
				Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan Perencanaan pembangunan Transmigrasi (Kawasan)			2 Kawasan		2 Kawasan	14,698,200	2 Kawasan	14,992,164	2 Kawasan	15,292,007	2 Kawasan	15,597,847	2 Kawasan	15,909,804	Dinas Nakertrans
				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan pembangunan Transmigrasi (Kawasan)			2 Kawasan		2 Kawasan	100,000,000	2 Kawasan	100,000,000	2 Kawasan	100,000,000	2 Kawasan	100,000,000	2 Kawasan	100,000,000	Dinas Nakertrans
				Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Lokasi/kawasan dan KTM yang di kembangkan (Kawasan)			2 Kawasan		2 Kawasan	2,696,363,880	2 Kawasan	2,750,291,158	2 Kawasan	2,805,296,981	2 Kawasan	2,861,402,920	2 Kawasan	2,918,630,979	Dinas Nakertrans
				Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Jumlah dokumen penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung (Dokumen)			5 Dok		10 Dok	232,500,000	10 Dok	237,150,000	10 Dok	241,893,000	10 Dok	246,730,860	15 Dok	251,665,477	Dinas PU & Tata Ruang

			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Yang terlaksana (Pelatihan)			3 Pelatihan		3 Pelatihan	61,073,100	3 Pelatihan	62,294,562	3 Pelatihan	63,540,453	3 Pelatihan	64,811,262	18 Pelatihan	66,107,488	Dinas PU & Tata Ruang
--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	------------	--------------------------

... sambungan 15/16

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2020	2021		2022		2023		2024		2025		Akhir RPJMD		Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	1	1	Sasaran 17. Meningkatkan Konektivitas Wilayah Pedesaan/Kawasan Perdesaan Serta Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Perdesaan					4,642,264,458.00		4,752,494,905.00		4,852,620,935.00		4,954,923,916.00		5,059,453,382.00		5,166,260,065.00	
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang memiliki Aparatur terampil dan mampu mengelola keuangan desa dengan baik dan benar (%)			75%		78%	1,183,367,280	84%	1,207,034,626	89%	1,231,175,318	94%	1,255,798,824	96%	1,280,914,801	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan keterampilan Tenaga Kerja Perempuan/Ibu Rumah Tangga/PKK yang memiliki standar kualifikasi/kompetensi (%)			60%		65%	331,381,680	70%	338,009,314	75%	344,769,500	80%	351,664,890	85%	358,698,188	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Jumlah Pembangunan /Pengadaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan yang Terlaksana (%)			0.25		0.35	3,342,420,660	0.45	3,409,269,073	0.55	3,477,454,455	0.65	3,547,003,544	0.75	3,617,943,615	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah Fasilitas, dan pembangunan sarana dan prasarana Angkutan Pelayaran Rakyat yang Terlaksana (%)			0.15		0.35	166,852,620	0.45	170,189,672	0.55	173,593,466	0.65	177,065,335	0.75	180,606,642	Dinas Perhubungan
			Program Pengembangan Perumahan	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)			83%		86%	757,758,000	90%	772,913,160	93%	788,371,423	95%	804,138,852	97%	820,221,629	Perumahan
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Luas Daerah Irigasi dan Rawa yang fungsional (ha)			628 Ha		628 Ha	9,905,232,840	628 Ha	10,103,337,497	628 Ha	10,305,404,247	628 Ha	10,511,512,332	3,768 Ha	10,721,742,578	Dinas PU & Tata Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (%)			19%		20%	9,282,097,500	21%	9,467,739,450	22%	9,657,094,239	23%	9,850,236,124	24%	10,047,240,846	Dinas PU & Tata Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (%)			65%		69%	1,804,780,320	71%	1,840,875,926	73%	1,877,693,445	75%	1,915,247,314	77%	1,953,552,260	Dinas PU & Tata Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase Skala Kota Sehingga Tidak terjadi Genangan (%)			50%		55%	1,551,105,150	60%	1,582,127,253	65%	1,613,769,798	70%	1,646,045,194	75%	1,678,966,098	Dinas PU & Tata Ruang

... sambungan 16/16

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2020	2021		2022		2023		2024		2025		Akhir RPJMD		Penanggung Jawab
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang terbangun (Gedung)	Gedung		5 Gedung		10 Gedung	273,145,650	10 Gedung	278,608,563	15 Gedung	284,180,734	17 Gedung	289,864,349	17 Gedung	295,661,636	Dinas PU & Tata Ruang
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dan Jembatan kondisi Baik dan sedang (%)	%		65%		71%	60,256,545,120	74%	61,461,676,022	77%	62,690,909,543	80%	63,944,727,734	83%	65,223,622,288	Dinas PU & Tata Ruang
	Program Kawasan Permukiman	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)	%		83%		86%	2,541,746,160	90%	2,592,581,083	93%	2,644,432,705	95%	2,697,321,359	97%	2,751,267,786	Dinas Perumahan, Pemukiman Dan Pertanahan
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (%)	%		83%		86%	1,527,589,740	90%	1,558,141,535	93%	1,589,304,365	95%	1,621,090,453	97%	1,653,512,262	Dinas Perumahan, Pemukiman Dan Pertanahan
	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Peningkatan Penggunaan Tanah Untuk Kebutuhan Umum	%				5	129,422,547	5	619,000,998	10	134,651,218	15	137,344,242	20	140,091,127	Dinas Perumahan, Pemukiman Dan Pertanahan
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Ha				10	292,188,362	20	298,466,264	30	304,884,643	40	311,446,819	50	318,156,200	Dinas Perumahan, Pemukiman Dan Pertanahan
	Program Penyelesaian Ganti Kerugiann dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Peningkatan Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	%				10	127,087,308	20	129,629,054	30	132,221,635	40	134,866,068	50	137,563,389	Dinas Perumahan, Pemukiman Dan Pertanahan
	Program Survey, Pengukuran dan Pemetaan	Peningkatan Luas Pengukuran dan Pemetaan Tanah	%				10	45,827,692	20	46,744,246	30	47,679,131	40	48,632,714	50	49,605,368	Dinas Perumahan, Pemukiman Dan Pertanahan

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggara pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 pada tabel berikut ini:

Tabel 8.1.
Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Kabupaten Konawe Selatan 2021-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Periode RPJMD					Kondisi Akhir RPJMD
		Target	Target	Target	Target	Target	
		2021	2022	2023	2024	2025	
	Pertumbuhan PDRB (%)	-0,97	3,6	5,4	5,7	5,8	6,2
	Laju Inflasi (%)	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
	PDRB Perkapita (Juta/Kapita/Tahun)	26,83	26,90	27,30	28,30	28,60	28,90
	ASPEK PELAYANAN UMUM						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan						
1.1	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,00	7,90	8,10	8,5	8,7	9,10
1.2	Persentase siswa jenjang TK/RA/Penitipan Anak (%)	65	65	67,5	70	72,5	75
1.3	Persentase penduduk berusia > 15 tahun melek huruf (%)	100	100	100	100	100	100
1.4	Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI (%)	0,50	0,50	0,47	0,45	0,43	0,40
1.5	Angka Putus Sekolah SMP/ MTs (%)	0,65	0,65	0,63	0,60	0,57	0,55
1.6	Angka Kelulusan (AL) SD/ MI (%)	100	100	100	100	100	100
1.7	Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs (%)	100	100	100	100	100	100
1.8	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/ MI (%)	100	100	100	100	100	100
1.9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	100	100	100	100	100	100
1.10	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	100	100	100	100	100	100
1.11	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI / Paket A (%)	100	100	100	100	100	100
1.12	Angka Paartisipasi Murni (APM)SMP/MTs/ Paket B (%)	100	100	100	100	100	100
1.13	Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV (%)	97,5	97,5	97,7	98,0	98,2	98,5
1.14	Persentase peningkatan Indeks Reformasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	65,0	65,0	67,5	70,0	72,5	75,0

... bersambung

... sambungan 2/12

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Periode RPJMD					Kondisi Akhir RPJMD
		Target	Target	Target	Target	Target	
		2021	2022	2023	2024	2025	
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan						
2.1	Persentase Posyandu Aktif (%)	100	100	100	100	100	100
2.2	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,1	70,1	70,2	70,3	70,4	70,5
2.3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	80	80	85	90	100	100
2.4	Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	95,00	95,00	100	100	100	100
2.5	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan (%)	100	100	100	100	100	100
2.6	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	100	100	100	100	100	100
2.7	Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD (%)	100	100	100	100	100	100
2.8	Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	50	50	70	80	90	100
2.9	Cakupan kunjungan bayi (%)	90,00	95	100	100	100	100
2.10	Klasifikasi RSUD	C	C	C	C	C	C
2.11	Standar Akreditasi RSUD	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
2.12	Cakupan pelayanan anak balita (%)	80	80	90	100	100	100
2.13	Jumlah Puskesmas yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi	9	9	11	13	15	17
2.14	Persentase Balita ditimbang berat D/S	58	58	60	70	80	90
2.15	Cakupan penduduk usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	58	60	70	80	90	100

... bersambung

... sambungan 3/12

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Periode RPJMD					Kondisi Akhir RPJMD
		Target	Target	Target	Target	Target	
		2021	2022	2023	2024	2025	
3.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang						
3.1	Persentase jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten dalam kondisi mantap	25,00	25,56	25,77	28,30	29,73	30,10
3.2	Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	7,9	7,9	12,0	16,2	20,5	24,9
3.3	Cakupan Pelayanan Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (%)	90	90	92,5	95	97,5	100
3.4	Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (%)	58,33	58,65	59	59,33	59,65	60
3.5	Cakupan rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	10	10	20	30	40	50
3.6	Rumah Tangga pengguna air bersih (%)	50	50	55	60	65	70
3.7	Cakupan rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	10	10	20	30	40	50
3.8	Pengelolaan persampahan 9%)	30	30	40	45	50	55
4.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan						
4.1	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	0,50	0,45	0,40	0,37	0,33	0,30
4.2	Rumah Layak Huni (%)	52,50	52,00	51,50	51,00	50,50	50,00
4.3	Luas pengukuran dan pemetaan tanah (%)	30	30	50	70	90	100
4.4	Bangunan gedung Negara yang terdaftar (%)	5	6	7	8	9	10
4.5	Penyelesaian sengketa tanah Garapan (%)	10	10	20	30	40	50
4.6	Penggunaan tanah untuk kebutuhan publik (%)	5	5	10	10	15	20
4.7	Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk Pembangunan	10	10	20	30	40	50

... bersambung

... sambungan 4/12

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Periode RPJMD					Kondisi Akhir RPJMD
		Target	Target	Target	Target	Target	
		2021	2022	2023	2024	2025	
5.	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman & Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
5.1.	Tingkat penyelesaian gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (%)	12	12	12	12	12	12
5.2	PERDA dan PERKADA ditegakkan (%)	60	60	70	80	90	100
5.3	Persentase Peningkatan Indeks Ketangguhan Daerah (%)	60	60	65	70	75	80
5.4	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	50	50	55	60	65	70
5.5	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana (%)	60	70	75	80	85	90
5.6	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (%)	50	70	80	90	100	100
5.7	Peningkatan jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang profesional (orang)	10	17	17	18	20	20
5.8	Cakupan Wilayah Pencegahan, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran dan Nonkebakaran (Kecamatan)	20	25	35	55	75	100
5.9	Peningkatan jumlah relawan kebakaran di kecamatan dan desa (orang)	25	50	75	100	125	150
6.	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial						
6.1	Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	9 buah	9 buah	10 buah	10 buah	11 buah	11 buah
6.2	Rasio PMKS dibanding Jumlah Penduduk (%)	7,83	7,73	7,63	7,53	7,43	7,33
6.3	Tingkat Kemiskinan (%)	10,6	10,6	10,3	9,9	9,5	9,1

... bersambung

... sambungan 5/12

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Periode RPJMD					Kondisi Akhir RPJMD
		Target	Target	Target	Target	Target	
		2021	2022	2023	2024	2025	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja						
1.1	Tingkat Partisipasi angkatan kerja (%)	85	88	90	93	95	98
1.2	Jumlah Lokasi bina dan Kelompok Transmigrasi Mandiri (KTM) yang dikembangkan	2	2	2	2	2	2
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak						
2.1	Persentase penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan	100	100	100	100	100	100
2.2	Partisipasi Angkatan kerja perempuan (%)	39,20	39,40	39,50	39,60	39,80	40,00
3.	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan						
3.1	Peningkatan hasil produksi pangan (%)	15	15	18	20	23	25
3.2	Regulasi Ketahanan Pangan/Perlindungan Lahan Pertanian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan (nilai)	93,9	93,9	94,5	94,8	95,3	96,2
7.4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan (Beras)	100	100	100	100	100	100
4.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup						
4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/IKLH (indeks)	68,07	68,07	68,36	68,65	68,4	68,94
4.2	Persentase Penanganan Sampah (%)	30	30	35	40	45	50
4.3	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%)	100	100	100	100	100	100

... bersambung

... sambungan 6/12

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Periode RPJMD					Kondisi Akhir RPJMD
		Target	Target	Target	Target	Target	
		2021	2022	2023	2024	2025	
5	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi kependudukan & Pencatatan Sipil						
5.1	Cakupan penerbitan KTP Perekaman KTP elektronik (%)	95,0	95,2	95,5	95,7	96	96,2
5.2	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran (%)	65,0	65,0	70	73	75	78
6.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat & Desa						
6.1	Persentase PKK Aktif (%)	100	100	100	100	100	100
6.2	Persentase desa yang memiliki kelompok kegiatan masyarakat produktif (%)	75	75	77	80	82	85
6.3	Persentase desa yang memiliki kelompok usaha ekonomi produktif (%)	70	70	72	75	77	80
6.4	Persentase peningkatan keterampilan Tenaga Kerja Perempuan/ Ibu Rumah Tangga/PKK yang memiliki standar kualifikasi/kompetensi (%)	60	60	65	70	75	80
6.5	Jumlah Desa Berkembang (Desa)	260	260	265	270	275	280
6.6	Jumlah Desa Tertinggal (Desa)	11	11	10	9	8	7
6.7	Persentase jumlah desa yang memiliki aparatur terampil dan mampu mengelola keuangan desa dengan baik dan benar (%)	75	75	80	85	90	95
6.8	Persentase peningkatan desa yang memiliki infrastruktur dasar memadai (%)	83	85	90	95	98	100
6.9	Jumlah Desa Mandiri (Desa)	60	60	65	70	75	80

... bersambung

... sambungan 7/12

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Periode RPJMD					Kondisi Akhir RPJMD
		Target	Target	Target	Target	Target	
		2021	2022	2023	2024	2025	
7.	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk & KB						
7.1	Mcpr	60,60	61,90	63,10	64,40	65,60	66,30
7.2	MKJP	25,80	26,80	27,81	28,80	29,80	30,80
7.3	Tingkat Kelahiran Total/TFR (%)	3,07	2,94	2,86	2,80	2,75	2,70
7.4	Meningkatkan kesehatan ber KB (INCPR)	58,10	59,4	60,6	61,9	63,1	64,4
7.5	Menurunkan angka kelahiran pada usia remaja (ASFR)	27,24	27,14	27,04	27	26,96	25,86
7.6	Unmeet Need	12,28	12,11	11,97	11,84	11,73	11,62
7.7	UKP	20	20	20	20	20	20
8.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi & Informatika						
8.1	Website Milik Pemerintah Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8.2	Jumlah OPD yang telah memiliki Website SKPD	5	5	10	15	20	25
8.3	Sistem Informasi Manajemen Daerah	2	2	2	3	3	4
8.4	Buku "Kabupaten dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8.5	Buku "PDRB Kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

... bersambung

... sambungan 8/12

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Periode RPJMD					Kondisi Akhir RPJMD
		Target	Target	Target	Target	Target	
		2021	2022	2023	2024	2025	
8.6	Tersedianya e-statistik sektoral/sistem informasi sektoral	-	5	10	15	20	25
8.7	Tersedianya website desa dan kecamatan per tahun	-	5	10	15	20	25 kecam
8.8	Integrasi akses internet dengan pemerintah daerah per tahun	-	1 kecamatan	2 kecamatan	3 kecamatan	4 kecamatan	5 kecamatan
8.9	Capaian predikat Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) "Baik"	2,6	2,7	2,8	2,9	3,4	3,5
8.10	Pemenuhan layanan informasi dan komunikasi public	-	5 kecamatan	5 kecamatan	5 kecamatan	5 kecamatan	5 kecamatan
8.11	Tersedianya tanda tangan elektronik	-	2	2	2	2	2
8.12	Tersedianya relawan teknologi informasi dan komunikasi (Tik)/tahun	-	25	50	75	100	125
9.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						
9.1	Pembinaan/penilaian kesehatan KSP/USP	10	10	10	10	10	10
9.2	Pertumbuhan Koperasi (%)	35	35	40	45	50	55
9.3	Rasio Koperasi Aktif (%)	50	60	70	80	90	100
9.4	Peningkatan UMKM Mandiri (%)	35	35	40	45	50	55
9.5	Peningkatan KSP/USP (%)	20	30	40	50	60	70
10.	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal						
10.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Perizinan	89,51	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
10.2	Peningkatan nilai realisasi PMDN (%)	85	85	90	95	95	100
10.3	Penyelesaian izin (%)	100	100	100	100	100	100
10.4	Jumlah Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	45	50	60	70	80	90

... bersambung

... sambungan 9/12

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Periode RPJMD					Kondisi Akhir RPJMD
		Target	Target	Target	Target	Target	
		2021	2022	2023	2024	2025	
11.	Urusan Bidang Perhubungan						
11.1	Rasio Kenektivitas Kabupaten	25	35	45	55	65	75
11.2	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	15	35	45	55	65	75
12.	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga						
12.1.	Jumlah lapangan olahraga	1112	1118	1124	1128	1132	1136
12.2	Jumlah cabor yang aktif	7	10	11	12	14	16
12.3	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	25	28	30	33	34	37
13.	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan						
13.1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	5 kali	5 kali
13.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah	5 buah	5 buah
14.	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan						
14.1	Jumlah SKPD yang telah menerapkan Arsip secara baku (%)	100	100	100	100	100	100
14.2	Rasio jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	3,2	3,2	3,5	3,7	4,0	4,2

... bersambung

... sambungan 10/12

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Periode RPJMD					Kondisi Akhir RPJMD
		Target	Target	Target	Target	Target	
		2021	2022	2023	2024	2025	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan						
1.1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	54,2	55,257	56,257	57,257	58,25	58,257
1.2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	8,70	8,800	8,900	8,950	9,050	9,100
1.3	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)	85	90	100	120	135	150
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata						
2.1	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan (%)	30	30	35	40	45	50
2.2	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri (kegiatan)	1	1	1	1	1	1
2.3	Peningkatan Jumlah kunjungan wisatawan (%)	10	12	14	15	18	20
2.4	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan mitra masyarakat	7	2	2	2	2	2
2.5	Tenaga kerja di sektor pariwisata yang bersertifikasi (%)	8,35	9	10	10,5	11	11,5
3.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian						
3.1	Regulasi Ketahanan Pangan/Perlindungan Lahan	A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.2	Jumlah Cadangan Pangan (Bulan)	8	8	8	8	9	9
3.3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan	9	93,9	94,5	94,8	95,3	96,2
3.4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	1	100	100	100	100	100
3.5	Peningkatan Jumlah Populasi Ternak Sapi Melalui	7500	10,000	10,000	10,000	10,00	10,000
3.6	Peningkatan Jumlah Produksi Daging (ton)	1,16	1,204,74	1,240,88	1,240,7	1,240	1,278,1
3.7	Peningkatan Jumlah Produksi Telur (ton)	2,50	2,584,42	2,661,95	2,741,8	2,824	2,908,7
3.8	Jumlah Hewan yang diperiksa dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit						
3.9	Jumlah Hewan yang telah di Vaksin (ekor)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

... bersambung

... sambungan 11/12

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Periode RPJMD					Kondisi Akhir RPJMD
		Target	Target	Target	Target	Target	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	UNSUR PENDUKUNG						
1	Persentase dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	99	99	99	99	99	100
2	Perentase kualitas layanan sekretariat DPRD dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	98	99	99	99	99	100
3	Nilai LAKIP	B	B	B	BB	BB	BB
4	Jumlah OPD Melaksanakan Penilaian Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	6	6	8	10	12	14
5	Jumlah OPD Melaksanakan Penilaian Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	6	6	8	10	12	14
6	Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	100	100	100	100	100	100
7	Jumlah OPD Melaksanakan Penilaian Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	6	6	8	10	12	14
	UNSUR PENUNJANG						
1	Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketersediaan dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Ketersediaan RKPD yang telah ditetapkan dengan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100	100	100	100	100
5	Persentase implementasi rencana kelitbangan	65	67	69	71	73	75
6	Persentase pementaatan hasil kelitbangan	50	55	60	65	70	75
7	Opini Pengelolaan Keuangan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
8	Ketersediaan Manajemen asset	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Ketersediaan Manajemen Kas	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Mobilisasi pendapatan (%)	100	100	100	100	100	100
11	Eksekusi anggaran (%)	100	100	100	100	100	100
12	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	14	18	19	22	27	32
13	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	36	28,07	24,1	17,4	15,3	14,9
14	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	40	40	40	40	40	40
15	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	195	195	195	195	195	195

... bersambung

... sambungan 12/12

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Periode RPJMD					Kondisi Akhir RPJMD
		Target	Target	Target	Target	Target	
		2021	2022	2023	2024	2025	
	UNSUR PENGAWASAN						
1	Level Maturitas SPIP (Skala)	4	4	4	4	4	5
2	Level Kapabilitas APIP (Skala)	3	3	3	4	4	5
3	Indeks capaian penilaian reformasi birokrasi	C	B	BB	A	A	A
4	Capaian nilai monitoring center for prevention (MCP) dari KPK (%)	76,62	76,62	77	78	78,5	79
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
1	Kegiatan pembinaan politik daerah (kegiatan)	12	12	12	12	12	12
2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kegiatan)	26	26	26	26	26	26
3	Cakupan peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu (%)	-	-	-	12	-	-
	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan						
1.1	Peningkatan ekspor (%)	30	30	35	40	45	50
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian						
2.1	Pertumbuhan industri (%)	35	35	40	45	50	55

BAB IX

PENUTUP

Perubahan RPJMD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen strategis bagi pembangunan daerah selama lima tahun ke depan sebagaimana RPJMD induk yang disusun sebelumnya. Dokumen ini tetap menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dengan memadukan tahapan pembangunan jangka panjang daerah serta menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dicerminkan dalam dokumen perubahan RPJMD. Karenanya dokumen perubahan ini menjadi panduan bagi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan serta pemangku kepentingan lainnya dalam sisa waktu perodesasi 3 (tiga) tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan dalam pencapaian target- target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026;
2. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Konawe Selatan agar menyesuaikan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026;
4. Seluruh Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa harus mempedomani Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026;

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RPJMD Konawe Selatan Tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam implementasi Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026.